



# PERUBAHAN RKPD 2025

KABUPATEN SUKABUMI





BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 122);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
Pada tanggal 5 Juni 2025



Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 5 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI



ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025 NOMOR 17

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I - 1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I - 1
1.2 Dasar Hukum .....	I - 3
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	I - 5
1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	I - 5
<b>BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023</b> .....	<b>II - 1</b>
2.1 Capaian Indikator Makro .....	II - 1
2.2 Capaian Program dan Kegiatan hingga Triwulan I Tahun 2025.....	II - 4
2.3 Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal .....	II - 61
2.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja .	II - 64
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH</b> .....	<b>III - 1</b>
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III - 1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III - 21
<b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ...</b>	<b>IV - 1</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV - 1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 .....	IV - 20
4.3 Kebijakan Pembangunan Wilayah .....	IV - 56
<b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b> .....	<b>V - 1</b>
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>VI - 1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Indikator Makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2024 .....	II - 2
Tabel 2.2	Capaian Indikator Program Kabupaten Sukabumi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	II - 5
Tabel 2.3	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah .....	II - 60
Tabel 2.4	Kategori nilai indeks pencapaian SPM.....	II - 61
Tabel 2.5	Capaian SPM Triwulan I .....	II - 62
Tabel 2.6	Capaian Jenis Pelayanan SPM Triwulan I 2025.....	II - 62
Tabel 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2020-2024 .....	III - 5
Tabel 3.2	Produk Domestik Bruto ADHK Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah) ..	III - 9
Tabel 3.3	Produk Domestik Regional Bruto ADHK menurut pengeluaran Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah) .....	III - 9
Tabel 3.4	Produk Domestik Regional Bruto ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah).....	III - 10
Tabel 3.5	Perbandingan Tingkat Inflasi Kota-Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 .....	III - 11
Tabel 3.6	Nilai LQ Sektor Perekonomian di Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 .....	III - 12
Tabel 3.7	Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2022-2024 .....	III - 14
Tabel 3.8	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2025-2026	III - 14
Tabel 3.9	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah).....	III - 15
Tabel 3.10	Produk Domestik Bruto Menurut Jenis Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)	III - 16
Tabel 3.11	Target Indikator Makro Nasional Tahun 2025 .....	III - 17
Tabel 3.12	Target Indikator Makro Jawa Barat Tahun 2025 .....	III - 18
Tabel 3.13	Target Indikator Makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 .....	III - 19
Tabel 3.14	Perubahan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 .....	III - 24
Tabel 3.15	Perubahan Target Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025.....	III - 25
Tabel 3.16	Perubahan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 .....	III - 26
Tabel 4.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Sukabumi .....	IV - 6
Tabel 4.2	Rumusan Sasaran Strategis Arah Kebijakan dan Strategi 2025 .....	IV - 10
Tabel 4.3	Rumusan Sasaran Strategis dan Program Prioritas .....	IV - 23
Tabel 4.4	Dukungan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Terhadap Pelaksanaan SPM.....	IV - 28
Tabel 4.5	Keterkaitan Visi, Misi dan Proyek Prioritas.....	IV - 49
Tabel 4.6	Rumusan Usulan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sukabumi.....	IV - 52
Tabel 5.1	Rekapitulasi Penyesuaian Jumlah Program dan Pagu Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 .....	V - 2

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Realisasi SPM Tahun 2024.....	II – 62
Gambar 2.2	Capaian Per Jenis SPM Triwulan I 2025.....	II – 64
Gambar 3.1	Produk Domestik Bruto (PDB) C 2020-2024 (Triliun Rupiah).....	III - 2
Gambar 3.2	Produk Domestik Regional Bruto ADHK dan ADHB Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah).....	III - 3
Gambar 3.3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB dan ADHK Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah).....	III - 4
Gambar 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (YoY) (%).....	III - 6
Gambar 3.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.....	III - 7
Gambar 3.6	Kolaborasi Pendanaan Pembangunan di Kabupaten Sukabumi.....	III - 23

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perencanaan merupakan proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahap, yaitu: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya dalam menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
7. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

Perencanaan pembangunan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 11 Ayat 2 meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 untuk pembangunan periode 20 (dua puluh) tahun, Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 untuk pembangunan periode 5 (lima) tahun dan RKPD untuk pembangunan 1 (satu) tahun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk perencanaan pembangunan tahun 2025 maka disusunlah dokumen RKPD tahun 2025. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat ringkasan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD menjadi salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan mengevaluasi pelaksanaan RKPD dan mengidentifikasi sejauh mana capaian kinerja RPJMD untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, RKPD menjadi dokumen yang memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan rencana pembangunan daerah, sehingga perlu disajikan dokumen RKPD yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dalam RKPD harus menunjukkan perkembangan terhadap kondisi daerah, sehingga perlu dilengkapi dengan indikator dan hasil kegiatan yang terukur, realistis, dan progresif. Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai rencana pembangunan dan bahan evaluasi terhadap rencana kegiatan dan pendanaan sampai dengan tahun berjalan. Akan tetapi, apabila dalam pelaksanaannya terdapat hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan daerah dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan RKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 mengacu pada Pasal 9 ayat (1) Dokumen RKPD dapat dilakukan perubahan apabila dalam hasil evaluasinya terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan daerah. Oleh karena itu, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 dilaksanakan karena terdapat ketidaksesuaian antara RKPD Tahun 2025 dengan perkembangan keadaan di Kabupaten Sukabumi, diantaranya: perlu adanya penyesuaian RKPD Tahun 2025 dengan perkembangan kebijakan nasional maupun provinsi Jawa Barat, diantaranya: penyesuaian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2025. Selain itu, RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 perlu disesuaikan dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Memperhatikan visi, misi kepala daerah terpilih serta kondisi, asumsi, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta dinamika yang terjadi sampai dengan tahun berjalan.

Secara umum, dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 mempunyai nilai penting, antara lain: merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026; acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 6);

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi tahun 2025 merupakan dokumen perubahan RKPD yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan Kabupaten Sukabumi dan perkembangan kebijakan nasional dan provinsi Jawa Barat pada tahun 2025. Tujuan dari penyusunan dokumen perubahan RKPD yaitu untuk menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD, perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dalam menyusun dan menetapkan dokumen perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025.

### **1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD**

Sistematika penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi tahun 2025 disusun sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan perubahan, serta sistematika dokumen perubahan RKPD.

#### **BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024**

Bab ini menyampaikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

#### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang: (1) Arah kebijakan ekonomi daerah, memuat kondisi perkembangan ekonomi global hingga daerah; (2) Arah kebijakan keuangan daerah menguraikan mengenai perubahan arah kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan perubahan target anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang berisi tujuan dan sasaran pembangunan serta Prioritas dan Sasaran pembangunan tahun 2025 yang diseleraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat tahun 2025.

#### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Bab ini memuat program dan kegiatan tahun 2025 yang mengalami perubahan, pergeseran anggaran kegiatan antar urusan pemerintah daerah/perangkat daerah, penambahan atau pengurangan pagu indikatif program dan kegiatan tahun 2025.

#### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini memuat penutup dari penyusunan dokumen perubahan RKPD Kabupaten Sukabumi tahun 2025.

## **BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025**

Pada tahap penyusunan RKPDP Perubahan Kabupaten Sukabumi Tahun 2025, telah dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPDP. Hal ini dilaksanakan sejak tahapan persiapan sampai dengan penetapan RKPDP. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa RKPDP Kabupaten Sukabumi telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPDP, serta menjadi pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD.

Evaluasi hasil RKPDP Kabupaten Sukabumi tahun 2025 bertujuan untuk menindaklanjuti capaian program dan kegiatan yang dilakukan, dan disesuaikan pada kondisi aktual daerah. Selain itu, evaluasi bertujuan untuk menilai dan memastikan perubahan pada target rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPDP tahun 2025 dapat dilakukan secara efektif dan efisien, untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Perubahan RKPDP Kabupaten Sukabumi tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan evaluasi terhadap hasil RKPDP triwulan I Tahun 2025 sebagaimana realisasi capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang ditetapkan dalam RKPDP tahun 2025. Evaluasi pelaksanaan RKPDP Kabupaten Sukabumi tahun 2025 menguraikan beberapa hal penting yaitu tentang capaian indikator makro, dan capaian program dan kegiatan RKPDP hingga triwulan I tahun 2025.

### **2.1 Capaian Indikator Makro**

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Kabupaten Sukabumi dari Tahun 2023 sampai dengan 2024 sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Capaian Indikator Makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2024**

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,71	70,18	0,67
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,02	0,99	-2,94
3	Tingkat Kemiskinan	7,01	6,87	-2,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,32	7,11	-2,87
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,17	5,15	-0,39
7	Pendapatan Per Kapita	29.373,82	31.167,47	6,11
8	Indeks Gini	0,355	0,342	-3,66

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2025*

Peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Sukabumi terus menunjukkan trend positif. Seperti yang terlihat dalam Tabel 2.1, IPM Kabupaten Sukabumi mencapai 70,18 pada tahun 2024. Angka ini menempatkan Kabupaten Sukabumi pada level "tinggi" dalam kualitas pembangunan manusia. Angka tersebut naik sebesar 0,47 poin dari angka sebelumnya sebesar 69,71 poin pada tahun 2023. Dan berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026, IPM tahun 2024 ditargetkan sebesar 68,39 poin, dan terealisasi sebesar 70,18 poin atau tercapai 102,62 persen melebihi target yang ditetapkan.

Pada tahun 2022-2023 LPP Kabupaten Sukabumi turun masing-masing menjadi 1,04 dan 1,02 persen. Dan Tahun 2024 Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukabumi turun menjadi 0,99 persen atau tercapai sebesar 115,38 persen dari target yang telah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Sementara itu, kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2024 tertinggi adalah Kecamatan Kebonpedes dengan Laju pertumbuhan penduduk 1,61 persen, dan kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kecamatan Cidolog yaitu sebesar minus 0,54 persen.

Berdasarkan Kabupaten Sukabumi Dalam Angka (KSDA) Tahun 2025, penduduk Kabupaten Sukabumi berdasarkan data proyeksi penduduk tahun 2024 sebanyak 2,828.024 jiwa. Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Sukabumi tahun 2024 adalah Kecamatan Cisaat dengan kepadatan penduduk mencapai 6.203 jiwa/Km<sup>2</sup>, dan kecamatan dengan

kepadatan penduduk terkecil berada di Kecamatan Tegalbuleud yaitu sebesar 145 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Angka kemiskinan di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024 sebesar 6,87 persen dengan penduduk miskin sebanyak 175,93 ribu orang. Pada kurun waktu 2020-2021 angka kemiskinan Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan dari 7,09 persen menjadi 7,70 persen akibat dampak pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2022 sampai dengan 2024 angka kemiskinan Kabupaten Sukabumi turun dari 7,34 persen pada tahun 2022 menjadi 6,87 persen pada tahun 2024. Namun angka kemiskinan tahun 2024 belum mencapai target yang telah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi sebesar 6,60 persen.

Berdasarkan data di atas, TPT Kabupaten Sukabumi cenderung mengalami penurunan, dari angka 7,32 persen pada tahun 2023 menjadi 7,11 persen pada tahun 2024 atau mengalami perubahan sebesar minus 2,87 persen. Hal ini menggambarkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tujuh orang penganggur.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi tahun 2020 mengalami kontraksi hingga minus 0,91 persen, sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan pada semua sektor perekonomian di seluruh wilayah secara global. Kemudian di tahun 2021 tumbuh sebesar 3,74 persen, dan tahun 2022 kembali tumbuh sebesar 5,12 persen dan tahun 2023 tumbuh sebesar 5,17 persen, namun sedikit melambat pada tahun 2024 yaitu sebesar 5,15 persen.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk di Kabupaten Sukabumi. PDRB per kapita Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan pada periode tahun 2023-2024, dari Rp29,37 juta pada tahun 2023 menjadi Rp31,17 juta pada tahun 2024. Artinya satu orang penduduk Kabupaten Sukabumi selama setahun pada tahun 2024 dapat memproduksi barang dan jasa atau memiliki pendapatan senilai Rp31,17 juta rupiah.

Ketimpangan pendapatan antar penduduk Kabupaten Sukabumi diukur menggunakan indeks gini. Pada tahun 2024, indeks gini Kabupaten Sukabumi berada di 0,342 poin, ini termasuk kategori ketimpangan sedang. Angka tersebut turun 0,013 poin dibandingkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,355 poin atau minus 3,66 persen. Lebih lanjut, berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, pada tahun 2024 Indeks Gini Kabupaten Sukabumi ditargetkan berada

pada rentang 0,332 poin. Pada tahun 2024, realisasi rasio gini Kabupaten Sukabumi sebesar 0,342 poin atau baru tercapai 96,99 persen dari target yang ditetapkan

## **2.2 Capaian Program dan Kegiatan hingga Triwulan I Tahun 2025**

Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana telah dibahas di atas, sangat ditentukan oleh pencapaian indikator kinerja program. Indikator kinerja program juga menjadi indikator kinerja kunci tingkat hasil (*Outcome*) sebagaimana dimuat pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa capaian kinerja program belum tersedia data sampai dengan laporan ini disusun. Jika ditinjau dari sisi capaian anggaran, pada tahun 2025 pagu anggaran RKPD Kabupaten Sukabumi sebesar Rp. 4.515.863.306.741,00, sampai dengan triwulan I tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 507.249.297.913,- atau baru terserap 11,23 persen.

Rincian capaian kinerja program sampai dengan triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Capaian Indikator Program Kabupaten Sukabumi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
<b>1</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>									
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>									
01:01:02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase APK Sekolah Dasar	%	101,82	103,42	255.452.644.772	N/A	515.341.000	N/A	0,20
		Persentase APK Sekolah Menengah Pertama	%	99,43	101,03	149.081.278.005	N/A	3.229.566.300	N/A	2,17
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini	%	51,54	53,14	73.825.805.575	N/A	1.410.596.000	N/A	1,91
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	84,1	85,70	23.824.134.670	N/A	89.880.000	N/A	0,38
01:01:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum muatan lokal	%	0,96	77,02	1.619.000.000	N/A	24.709.000	N/A	1,53
01:01:04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang terpenuhi kebutuhan PTKnya	%	50,9	51,10	29.231.500.000	N/A	7.662.507.600	N/A	26,21
01:01:05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang belum memiliki izin operasional menjadi memiliki izin operasional	%	73,14	75,94	513.210.000	N/A	120.880.000	N/A	23,55
01:01:06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Rata-rata nilai peserta didik pada mata pelajaran bahasa sunda	%	7,02	7,54	447.030.000	N/A		N/A	0,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	830.674.800	25,00	41.106.500	25,00	4,95

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	748.194.079.750	25,00	147.647.845.206	25,00	19,73
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	1.671.100.000	25,00	137.333.042	25,00	8,22
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	1.443.163.000	25,00	200.047.550	25,00	13,86
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	1.557.400.000	25,00	664.101.025	25,00	42,64
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	-		-	0,00	#DIV/0!
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	741.660.000	25,00	64.296.000	25,00	8,67
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	1.082.588.000	25,00	276.916.000	25,00	25,58
						<b>1.289.515.268.572</b>		<b>162.085.125.223</b>	<b>21,88</b>	<b>12,57</b>
<b>2</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>										
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar	%	60	68,00	124.577.858.360	N/A	417.704.000	N/A	0,34

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	%	15	19,00	236.567.688.791	N/A	2.775.587.755	N/A	1,17
		Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang berizin	%	100	100,00	738.526.000	N/A	4.327.000	N/A	0,59
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	35	43,00	32.199.052.280	N/A	10.175.523.456	N/A	31,60
01:02:04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang berizin	%	100	100,00	1.509.919.000	N/A	28.350.000	N/A	1,88
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	%	28	40,00	5.538.152.959	N/A	14.740.000	N/A	0,27
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	2.211.129.300	25	119.295.000	25	5,40
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	125.393.447.814	25	38.749.359.345	25	30,90
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	8.787.591.608	25	977.759.998	25	11,13
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	1.358.299.200	25	300.523.000,00	25	22,12
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	10.950.542.500		-	0	0,00

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	4.193.660.000	25	125.966.600,00	25	3,00
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	1.652.363.500	25	89.193.000,00	25	5,40
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	83.244.000	25	50.547.000,00	25	60,72
		Persentase BLUD yang meningkatkan pelayanannya	%	100	100	366.955.717.565	25	32.829.631.195,00	25	8,95
						<b>922.717.192.877</b>		<b>86.658.507.349</b>		<b>9,39</b>
<b>3</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG</b>										
01:03:02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	%	59,28	56,80	29.828.299.155	N/A	28.877.000	N/A	0,10
01:03:10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase tingkat kemandapan kondisi jalan Kabupaten	%	71,42	75,53	122.266.280.817	N/A	6.720.000	N/A	0,01
01:03:11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Pengelolaan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	%	100	100,00	190.796.008	N/A	24.532.000	N/A	12,86
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	275.000.000	25	60.917.000	25,00	22,15
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	23.135.773.534	25	7.148.819.543	25,00	30,90

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	1.167.500.000	25	200.568.200	25,00	17,18
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	478.000.000	25	147.328.000	25,00	30,82
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	8.469.000.000	25	2.352.508.387	25,00	27,78
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	463.000.000		-	0,00	0,00
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	390.000.000	25	4.361.000	25,00	1,12
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	55.000.000	25	10.918.000	25,00	19,85
						<b>186.718.649.514</b>		<b>9.985.549.130</b>		<b>5,35</b>
<b>4</b>	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG</b>										
01:03:03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	%	85,08	89,84	30.900.000.000	N/A	204.881.000	N/A	0,66
01:03:05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	%	79,76	83,09	8.174.071.300	N/A	-	N/A	0,00
01:03:06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota	%	32,5	51,62	3.225.475.000	N/A	4.856.000	N/A	0,15

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
01:03:07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman di kabupaten yang memiliki PSU kualitas baik	%	8	80,00	-	N/A	-	N/A	N/A
01:03:08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah bangunan gedung pemerintahan yang kondisi baik	Unit	27	12,00	77.593.569.474	N/A	32.985.400	N/A	0,04
01:03:09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya	Unit	2	4,00	26.175.828.802	N/A	805.189.550	N/A	3,08
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>										
01:04:02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah tidak layak huni akibat bencana dan relokasi pembangunan yang tertangani.	%	100	100,00	7.100.000.000	N/A	3.760.000	N/A	0,05
01:04:03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang tertata	%	8,81	30,51	22.580.019.200	N/A	294.949.000	N/A	1,31
01:04:04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	%	91,88	94,93	16.000.000.000	N/A	38.500.000	N/A	0,24
01:04:05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah kawasan perumahan yang memiliki PSU kualitas baik	unit	12	15,00	28.786.460.800	N/A	14.210.000	N/A	0,05
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	179.999.800,00	25	54.495.900	25,00	30,28

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	7.705.855.600,00	25	2.099.242.195	25,00	27,24
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	2.219.668.000	25	197.241.700	25,00	8,89
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	565.427.715	25	50.460.000	25,00	8,92
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	4.842.595.880	25	1.128.565.989	25,00	23,30
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	462.500.000		-		
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	150.000.000	25	3.708.000	25,00	2,47
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	130.000.000	25	9.509.000	25,00	7,31
						<b>236.791.471.571</b>		<b>4.942.553.734</b>		<b>2,09</b>
<b>5</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>										
01:05:02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	95	100,00	944.415.000	N/A	256.070.000	N/A	27,11
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	50	75,00	186.200.000	N/A	54.086.000	N/A	29,05

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	%	30	50,00	50.000.000	N/A	14.250.000	N/A	28,50
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	33.530.000	25	6.950.000	25,00	20,73
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	6.148.962.010	25	2.131.327.790	25,00	34,66
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	748.840.000	25	182.015.000	25,00	24,31
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	257.947.400	25	98.341.000	25,00	38,12
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	150.490.000		-	0,00	0,00
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	2.446.446.160	25	697.142.292	25,00	28,50
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	173.150.000	25	175.314.500	25,00	101,25
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	18.970.000	25	5.010.000	25,00	26,41
						<b>11.158.950.570</b>		<b>3.620.506.582</b>		<b>32,44</b>
<b>6</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>										

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
01:05:03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pesentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	1	1,00	2.000.000.000	N/A	91.873.100	N/A	4,59
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	5	5,00	11.232.560.000	N/A	302.541.900	N/A	2,69
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100,00	2.500.000.000	N/A	1.197.185.300	N/A	47,89
		Persentase capaian upaya pendukung terhadap Penataan Sistem dasar penanggulangan Bencana	%	NA	100,00	425.000.000	N/A	160.841.400	N/A	37,85
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	67.000.000	25	11.388.700	25,00	17,00
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	4.877.570.984	25	1.275.881.453	25,00	26,16
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	1.230.000.000	25	78.053.000	25,00	6,35
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	416.898.600	25	77.504.400	25,00	18,59
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	1.782.499.416	25	432.865.210	25,00	24,28

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	423.796.000		-	0,00	0,00
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	340.975.000		-	0,00	0,00
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	19.200.000	25	1.557.000	25,00	8,11
						<b>25.315.500.000</b>		<b>3.629.691.463</b>		<b>14,34</b>
<b>7</b>	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>										
01:05:04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan WMK	Menit	15	13,00	8.771.854.000	N/A	634.838.000	N/A	#VALUE!
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	%	100	100,00	4.372.450.000	N/A	166.839.800	N/A	3,82
		Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran	%	3,97	4,72	333.662.600	N/A	8.800.000	N/A	2,64
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	37.178.000	25	1.990.000	25,00	5,35
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	10.918.910.936	25	3.275.646.071	25,00	30,00
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	910.187.999	25	119.597.900	25,00	13,14

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	1.100.600.700	25	59.550.563	25,00	5,41
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	3.801.975.200	25	1.104.724.839	25,00	29,06
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	608.078.000		-		
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	522.735.800		-	0,00	0,00
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	-		-		
						<b>31.377.633.235</b>		<b>5.371.987.173</b>		<b>17,12</b>
<b>8</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>										
01:06:02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial	%	8,67	18,91	2.332.499.000	N/A	821.555.000	N/A	35,22
01:06:03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pekerja migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	21,63	15,67	5.425.000	N/A	-	N/A	0,00
01:06:04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS/PMKS yang tertangani dan berfungsi sosial di luar panti.	%	8,55	18,29	14.858.110.000	N/A	5.450.000	N/A	0,04

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
01:06:05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	%	17,3	16,27	2.940.000.000	N/A	395.506.000	N/A	13,45
01:06:06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	%	100	100,00	3.055.000.000	N/A	238.691.000	N/A	7,81
		Persentase Relawan (Tagana) dan masyarakat rawan bencana yang mendapat pemberdayaan dan kesiapsiagaan bencana	%	16,55	16,68	299.000.000	N/A	88.300.000	N/A	29,53
01:06:07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman makam Pahlawan yang dikelola	%	100	100,00	93.106.440	N/A	900.000	N/A	0,97
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	29.000.000	25	5.394.000	25,00	18,60
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	4.152.510.715	25	1.289.936.389	25,00	31,06
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100,00	656.320.000	25	128.104.070	25,00	19,52
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100,00	251.996.640	25	90.585.000	25,00	35,95
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100,00	1.040.792.960	25	264.137.560	25,00	25,38

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	77.200.000		-		
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100,00	129.250.000	25	375.000	25,00	0,29
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	30.000.000	25,00	1.479.000	25,00	4,93
						<b>29.950.210.755</b>		<b>3.330.413.019</b>		<b>11,12</b>
<b>9</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>										
02:07:02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	90	98,00	20.000.000	N/A	-	N/A	0,00
02:07:03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2,1	2,90	816.453.200	N/A	4.302.500	N/A	0,53
02:07:04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	27	31,00	1.125.719.800	N/A	8.974.000	N/A	0,80
02:07:05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100,00	310.000.000	N/A	14.850.000	N/A	4,79

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100.000.000	25	21.499.500	25,00	21,50
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	7.548.784.854	25	2.142.430.987	25,00	28,38
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	625.000.000	25	84.032.000	25,00	13,45
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	675.000.000	25	199.158.500	25,00	29,50
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	1.331.922.400	25	352.008.870	25,00	26,43
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	250.000.000		-	0,00	0,00
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	263.000.000	25	1.718.500	25,00	0,65
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	60.000.000	25,00	1.684.000	25,00	2,81
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>										
03:32:03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase jumlah KK transmigran yang difasilitasi	%	20	20,00	130.000.000	N/A	2.921.000	N/A	2,25
03:32:04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase jumlah KK transmigran yang dilatih	%	16,6	21,20	73.000.000	N/A	12.984.000	N/A	17,79

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
						13.328.880.254		2.846.563.857		21,36
<b>10</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>										
02:08:02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Nilai Anugerah Parahyta Ekapraya (APE)	Nilai	80	95,00	325.000.000	N/A	-	N/A	0,00
02:08:03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Tingkat kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,00	0,0032	300.000.000	N/A	27.557.000	N/A	9,19
02:08:04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase sasaran keluarga yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas keluarga	%	97,99	98,12	2.950.000.000	N/A	-	N/A	0,00
02:08:05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat akurasi data gender dan anak	%	100	100,00	90.000.000	N/A	40.000.000	N/A	44,44
02:08:06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	%	12,17	100,00	235.000.000	N/A	32.016.600	N/A	13,62
02:08:07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	0,02	0,0187 4	295.000.000	N/A	9.993.000	N/A	3,39
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	94.000.000	25	52.358.000	25,00	55,70
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	4.440.850.011	25	1.468.113.103	25,00	33,06

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	584.040.000	25	103.505.000	25,00	17,72
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	317.460.000	25	179.121.000	25,00	56,42
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	626.979.400	25	115.983.412	25,00	18,50
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100.000.000		-	0,00	0,00
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	5.000.000	25	103.117.500	25,00	2062,35
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	8.000.000		-	0,00	0,00
						<b>10.371.329.411</b>		<b>2.131.764.615</b>		<b>20,55</b>
<b>11</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>										
02:09:02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan Infrastruktur Pangan	%	14,29	18,18	255.000.000	N/A	9.079.000	N/A	3,56
02:09:03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan yang Dikelola	%	23,37	44,61	4.687.142.500	N/A	72.577.000	N/A	1,55
02:09:04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	%	14,47	17,11	345.000.000	N/A	4.306.000	N/A	1,25

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
02:09:05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	%	100	100,00	940.861.000	N/A	15.700.000	N/A	1,67
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	171.028.500	25	22.850.000	25,00	13,36
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	4.367.880.814	25	1.426.411.041	25,00	32,66
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	869.820.000	25	103.184.850	25,00	11,86
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	362.186.400	25	76.522.200	25,00	21,13
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	826.400.000	25	194.800.300	25,00	23,57
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	112.950.000		-		
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	123.890.000	25	2.452.000	25,00	1,98
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	40.540.000	25,00	3.312.000	25,00	8,17
						<b>13.102.699.214</b>		<b>1.931.194.391</b>		<b>14,74</b>
<b>12</b>	<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>									
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>									

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
02:10:04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan permasalahan pertanahan	%	100	100,00	250.000.000	N/A	57.460.000	N/A	22,98
02:10:05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Bidang Tanah / Tahun	9	9,00	6.061.000.000	N/A	108.186.000	N/A	1,78
02:10:06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Presentase Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	%	3	3,00	100.000.000	N/A	11.050.000	N/A	11,05
02:10:07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan Tanah Ulayat	%	0	0,00	100.000.000	N/A	-	N/A	0,00
02:10:10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Percepatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)	Bidang Tanah / Tahun	100386	100386,00	1.500.000.000	-	154.932.000	0,00	10,33
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	50.000.000	25	12.009.700	25,00	24,02
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	4.015.320.832	25	1.315.485.520	25,00	32,76
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	890.180.000	25	78.125.533	25,00	8,78
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	120.541.060	25	66.952.900	25,00	55,54
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	438.370.640	25	96.562.258	25,00	22,03

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	-		-	0,00	#DIV/0!
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	20.000.000	25	2.560.000	25,00	12,80
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	15.000.000	25,00	402.000	25,00	2,68
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG</b>										
01:03:12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang	%	80	87,60	1.500.000.000	N/A	27.994.000	N/A	1,87
						<b>15.060.412.532</b>		<b>1.931.719.911</b>		<b>12,83</b>
<b>13</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>										
02:11:02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disusun per tahun	%	100	100,00	370.000.000	N/A	3.123.000	N/A	0,84
02:11:03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik pantau pengendalian pencemaran lingkungan yang sesuai baku mutu	%	68	68,00	695.769.500	N/A	145.791.750	N/A	20,95
02:11:04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kawasan keanekaragaman hayati yang dikelola	%	10	10,00	163.000.000	N/A	3.028.000	N/A	1,86

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
02:11:05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	%	1,73	1,73	22.000.000	N/A	1.376.000	N/A	6,25
02:11:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan rekomendasi lingkungan yang diterbitkan	%	4,33	4,33	65.000.000	N/A	17.930.000	N/A	27,58
02:11:07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase masyarakat hukum adat (MHA) yang dibina	%	67	100,00	12.500.000	N/A	1.907.000	N/A	15,26
02:11:08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan lingkungan hidup	%	5	5,00	40.000.000	N/A	1.590.000	N/A	3,98
02:11:09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	%	1,2	1,20	50.000.000	N/A	1.590.000	N/A	3,18
02:11:10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan	%	90	90,00	20.000.000	N/A	2.813.000	N/A	14,07
02:11:11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	%	50,4	66,40	14.376.657.880	N/A	2.660.874.383	N/A	18,51
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	65.600.000	25	4.746.000	25,00	7,23

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	9.013.258.030	25	2.848.582.965	25,00	31,60
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	10.000.000		-	0,00	0,00
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	617.955.500	25	264.344.300	25,00	42,78
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	10.603.006.000	25	903.738.071	25,00	8,52
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	60.583.300		-		
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	70.000.000		-	0,00	0,00
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	968.800.000	25,00	120.360.950	25,00	12,42
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	100	101,00				0,00	#DIV/0!
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>										
01:03:04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sistem Pengelolaan Persampahan	%	9,68	11,29	-	N/A	-	N/A	
						<b>37.224.130.210</b>		<b>6.981.795.419</b>		<b>18,76</b>
<b>14</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>									

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>										
02:12:02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	76	96,00	302.891.000	N/A	42.952.000	N/A	14,18
02:12:03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	95	99,00	420.398.000	N/A	208.026.000	N/A	49,48
02:12:04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase PD/Instansi/Badan Hukum Indonesia yang bekerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	25	80,00	459.462.000	N/A	129.870.418	N/A	28,27
02:12:05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase PD/Instansi yang memanfaatkan Data Profil Kependudukan	%	75	95,00	96.998.000	N/A	26.980.000	N/A	27,82
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	116.802.000	25	9.460.000	25,00	8,10
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	8.464.398.275	25	2.906.415.893	25,00	34,34
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	40.171.000	25	11.030.000	25,00	27,46
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	1.807.983.000	25	2.882.061.900	25,00	159,41
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	3.687.488.360	25	1.080.566.901	25,00	29,30
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	2.645.102.000		-		

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	268.655.000	25	5.527.000	25,00	2,06
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	1.145.293.600	25,00	134.225.000	25,00	11,72
						<b>19.455.642.235</b>		<b>7.437.115.112</b>		<b>38,23</b>
<b>15</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>										
02:13:02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase status desa mandiri	%	5	25,98	300.000.000	N/A	42.040.000	N/A	14,01
02:13:03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang telah melakukan kerjasama	%	9,19	14,44	150.000.000	N/A	21.216.000	N/A	14,14
02:13:04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Desa yang Telah Dikelola dengan Baik	%	12,34	33,33	1.566.000.000	N/A	144.277.600	N/A	9,21
02:13:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berprestasi	%	1,05	2,10	13.760.000.000	N/A	2.071.875.000	N/A	15,06
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	46.000.000	25	17.393.000	25,00	37,81
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	5.954.809.208	25	1.820.514.998	25,00	30,57
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	600.000.000	25	110.524.200	25,00	18,42

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	428.200.000	25	104.609.600	25,00	24,43
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	1.110.264.800	25	155.443.606	25,00	14,00
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	384.000.000		-		
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	-		-		
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	-		-		
						<b>24.299.274.008</b>		<b>4.487.894.004</b>		<b>18,47</b>
<b>16</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>										
02:14:02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya berusia dibawah 20 Tahun	%	NA	2,40	965.920.000	N/A	34.360.000	N/A	3,56
02:14:03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peningkatan pemakaian kontrasepsi	%	69,62	68,45	15.703.000.000	N/A	103.450.000	N/A	0,66
02:14:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera yang ber-KB Di Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	82,5	82,85	13.480.000.000	N/A	-	N/A	0,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	323.700.000	25	13.600.000	25,00	4,20

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	13.843.531.961	25	4.592.426.156	25,00	33,17
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	1.358.400.000	25	204.908.000	25,00	15,08
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	805.110.000	25	55.871.100	25,00	6,94
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	9.042.930.800	25	2.509.785.270	25,00	27,75
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	-		-		
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	50.000.000		-	0,00	0,00
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	147.104.000	25	11.362.600	25,00	7,72
						<b>55.719.696.761</b>		<b>7.525.763.126</b>		<b>13,51</b>
<b>17</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>										
02:15:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Rasio	0,26	0,22	21.015.807.771	N/A	3.211.487.779	N/A	#REF!

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
02:15:03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rasio	0,3	0,90	1.369.999.700	N/A	-	N/A	0,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	42.721.400	25	6.845.000	25,00	16,02
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	14.371.440.527	25	4.403.157.836	25,00	30,64
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	900.412.249	25	200.332.400	25,00	22,25
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	587.535.200	25	23.126.000	25,00	3,94
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	20.450.118.320	25	1.041.207.299	25,00	5,09
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	423.800.000		-	0,00	0,00
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	355.221.400	25	7.415.000	25,00	2,09
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	49.740.000	25	8.585.000		
						<b>59.566.796.567</b>		<b>8.902.156.314</b>		<b>14,94</b>
<b>18</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN</b>									

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>										
02:16:02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat	%	10	80,00	4.258.560.000	N/A	1.155.164.652	N/A	27,13
02:16:03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase akses TIK yang tersedia	%	14	83,00	2.335.000.000	N/A	24.122.000	N/A	1,03
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	65.000.000	25	15.099.000	25,00	23,23
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	5.813.782.478	25	2.016.322.393	25,00	34,68
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	747.443.800	25	149.776.347	25,00	20,04
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	310.000.000	25	206.279.987	25,00	66,54
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	3.400.000.000	25	802.076.188	25,00	23,59
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	-		-	0,00	#DIV/0!
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	65.000.000	25	11.232.000	25,00	17,28

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	45.000.000	25	9.099.000	25,00	20,22
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>										
02:20:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang di update secara berkala	%	16	83,00	225.000.000	N/A	92.083.000	N/A	40,93
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>										
02:21:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi	%	13	82,00	310.000.000	N/A	44.911.800	N/A	14,49
						<b>17.574.786.278</b>		<b>4.526.166.367</b>		<b>25,75</b>
<b>19</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>										
02:17:02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP	%	NA	100,00	125.000.000	N/A	3.670.000	N/A	2,94
02:17:03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Akuntabel	%	1	4,00	300.000.000	N/A	26.680.000	N/A	8,89
02:17:04	PROGRAM PENILAIAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan KSP/USP Koperasi yang berpredikat cukup sehat	%	NA	5,00	400.000.000	N/A	-	N/A	0,00
02:17:05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi	%	1	1,00	312.000.000	N/A	109.175.000	N/A	34,99
02:17:06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	NA	4,00	825.000.000	N/A	49.740.000	N/A	6,03

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
02:17:07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dari sisi akses modal dan pemasaran	%	0,5	10,00	1.550.000.000	N/A	110.166.000	N/A	7,11
02:17:08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	0,2	3,10	650.000.000	N/A	275.235.200	N/A	42,34
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	57.500.000	25	9.059.000	25,00	15,75
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	5.270.921.863	25	1.473.326.678	25,00	27,95
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	542.900.000	25	123.789.300	25,00	22,80
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	568.618.860	25	207.265.308	25,00	36,45
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	1.446.039.800	25	329.082.709	25,00	22,76
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	44.773.900		-	0,00	0,00
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	270.775.000	25	52.820.500	25,00	19,51
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	38.000.000	25	5.504.600	25,00	14,49

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
						12.401.529.423		2.775.514.295		22,38
<b>20</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>										
02:18:02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Peta Potensi Investasi Daerah Berbasis Digital	Kecamatan	8	8,00	587.500.000	N/A	-	N/A	0,00
02:18:03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	5	11,36	1.700.000.000	N/A	-	N/A	0,00
02:18:04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Tepat Waktu	%	90	100,00	700.000.000	N/A	81.842.000	N/A	11,69
02:18:05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan Terhadap Peraturan Penanaman Modal	%	6	19,48	777.679.000	N/A	32.433.000	N/A	4,17
02:18:06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Investasi yang memenuhi Standar Persyaratan OSS	%	25	65,00	100.000.000	N/A	4.519.000	N/A	4,52
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	135.000.000	25	17.047.000	25,00	12,63
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	5.281.480.302	25	1.369.648.846	25,00	25,93
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	969.991.600	25	134.608.400	25,00	13,88
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	769.457.100	25	215.588.000	25,00	28,02
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	1.201.111.080	25	275.332.064	25,00	22,92

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	982.840.000		-	0,00	0,00
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	197.940.000	25	3.000.000	25,00	1,52
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	21.000.000	25	1.630.000	25,00	7,76
						<b>13.423.999.082</b>		<b>2.135.648.310</b>		<b>15,91</b>
<b>21</b>	<b>DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>										
02:19:02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan Penysadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	%	6	19,00	3.350.000.000	N/A	539.000	N/A	0,02
02:19:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentase Peningkatan Olahraga Pendidikan, penyelenggaraan olahraga tingkat Kabupaten dan Provinsi, Organisasi Olahraga dan Olahraga Rekreasi yang dibina dan dikembangkan	%	50	100,00	18.433.000.000	N/A	378.047.800	N/A	2,05
02:19:04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan	%	0	100,00	1.872.440.000	N/A	4.533.000	N/A	0,24
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	130.000.000	25	9.360.000	25,00	7,20

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	4.582.621.198	25	1.328.805.705	25,00	29,00
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	941.120.000	25	66.078.000	25,00	7,02
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	1.493.344.800	25	198.018.000	25,00	13,26
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	1.979.866.960	25	501.408.812	25,00	25,33
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	216.725.000		-		
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	227.820.000	25	4.320.000	25,00	1,90
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	20.000.000	25	6.120.000	25,00	30,60
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				5.000.000		-		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>										
02:22:02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Budaya / OPK dan lembaga adat daerah yang dilindungi, dimanfaatkan, dikembangkan dan dibina	%	45	100,00	1.300.000.000	N/A	50.502.000	N/A	3,88

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
02:22:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Peningkatan Kesenian Tradisional daerah yang dilindungi, dimanfaatkan, dikembangkan dan dibina	%	5	20,00	100.000.000	N/A	-	N/A	0,00
02:22:04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Peningkatan Sejarah Lokal yang dibina	%	2	20,00	200.000.000	N/A	-	N/A	0,00
02:22:05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Peningkatan Cagar Budaya yang ditetapkan dan dikelola	%	10	20,00	250.000.000	N/A	-	N/A	0,00
02:22:06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan Layanan Museum terhadap masyarakat	%	10	25,00	1.450.000.000	N/A	32.250.000	N/A	2,22
						<b>36.551.937.958</b>		<b>2.579.982.317</b>		
<b>22</b>	<b>DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>										
02:23:02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	NA	6,50	1.200.000.000	N/A	-	N/A	0,00
02:23:03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara dan naskah kuno yang diinventarisasi dan dilestarikan	Eksemplar	30	830,00	300.000.000	N/A	-	N/A	0,00
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>										
02:24:02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	25	80,00	700.000.000	N/A	64.216.100	N/A	9,17
02:24:03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	%	25	80,00	607.149.689	N/A	32.944.300	N/A	5,43



Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN</b>										
03:25:03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	2	2,00	10.644.093.601	N/A	2.716.847.000	N/A	25,52
03:25:04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	2	2,00	10.478.986.308	N/A	230.068.000	N/A	2,20
03:25:05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Presentase penurunan tingkat pelanggaran bidang Perikanan di PUD	%	0	2,00	325.000.000	N/A	3.499.600	N/A	1,08
03:25:06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Presentase Peningkatan Produksi Produk Unggulan Pengolahan Hasil Perikanan (PHP)	%	2	2,00	4.330.000.000	N/A	157.357.500	N/A	3,63
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	88.553.000	25	23.712.000	25,00	26,78
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	6.134.371.763	25	1.881.544.712	25,00	30,67
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	810.280.000	25	121.054.000	25,00	14,94
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	281.380.100	25	24.192.000	25,00	8,60
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	3.188.894.000	25	665.874.943	25,00	20,88
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	314.221.000		-	0,00	0,00

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	-		-		
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	47.460.000	25	4.189.000	25,00	8,83
						<b>36.643.239.772</b>		<b>5.828.338.755</b>		<b>15,91</b>
<b>24</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>										
03:26:02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Wisata Yang Dibangun	%	4	4,00	5.474.000.000	N/A	-	N/A	0,00
03:26:03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Promosi Daya Tarik Wisata	%	5	5,00	6.097.758.000	N/A	10.620.000	N/A	0,17
03:26:04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan prasarana dan ekosistem ekonomi kreatif	%	20	20,00	150.000.000	N/A	-	N/A	0,00
03:26:05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina	%	10	10,00	924.533.000	N/A	49.995.000	N/A	5,41
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	102.000.000	25	7.518.000	25,00	7,37
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	2.658.376.238	25	2.007.327.325	25,00	75,51

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	387.490.000	25	69.279.619	25,00	17,88
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	1.016.526.360	25	38.838.000	25,00	3,82
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	2.329.114.380	25	605.376.161	25,00	25,99
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	431.170.600		-		
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	251.435.000	25	2.146.000	25,00	0,85
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	13.775.000	25	1.046.000	25,00	7,59
						<b>19.836.178.578</b>		<b>2.792.146.105</b>		<b>14,08</b>
<b>25</b>	<b>DINAS PERTANIAN</b>									
<b>URUSAN PEMRINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>										
03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani	%	100	100,00	17.825.000.000	N/A	1.142.875.100	N/A	6,41
03:27:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani	%	100	100,00	61.400.000.000	N/A	1.278.166.200	N/A	2,08
03:27:05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang difasilitasi	%	0	100,00	1.550.000.000	N/A	5.130.000	N/A	0,33

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
03:27:06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan usaha pertanian	%	0	100,00	900.000.000	N/A	9.308.000	N/A	1,03
03:27:07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	%	100	100,00	9.100.000.000	N/A	59.256.000	N/A	0,65
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	545.000.000	25	97.753.500	25,00	17,94
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	28.335.297.116	25	7.282.979.621	25,00	25,70
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	2.463.840.000	25	148.188.271	25,00	6,01
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	2.203.149.800	25	473.447.800	25,00	21,49
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	2.994.102.880	25	896.325.768	25,00	29,94
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	4.885.466.900		-	0,00	0,00
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	510.000.000	25	36.400.000	25,00	7,14
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	50.000.000	25	1.095.000	25,00	2,19

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
						<b>132.761.856.696</b>		<b>11.430.925.260</b>		<b>8,61</b>
<b>26</b>	<b>DINAS PETERNAKAN</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>										
03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana peternakan yang dimanfaatkan oleh peternak	%	100	100,00	4.734.372.000	N/A	110.085.854	N/A	2,33
03:27:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana peternakan yang dimanfaatkan oleh peternak	%	100	100,00	5.164.743.300	N/A	2.255.000	N/A	0,04
03:27:04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	%	5	5,00	1.846.581.000	N/A	365.248.500	N/A	19,78
03:27:05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan yang difasilitasi	%	100	100,00	50.000.000	N/A	-	N/A	0,00
03:27:06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan usaha peternakan	%	0	100,00	43.200.000	N/A	8.705.000	N/A	20,15
03:27:07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan peternak yang meningkat kapasitasnya	%	100	100,00	186.580.000	N/A	9.430.000	N/A	5,05
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	226.421.900	25	10.179.456	25,00	4,50
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	8.125.710.800	25	2.674.982.428	25,00	32,92
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	580.440.000	25	139.438.300	25,00	24,02

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	509.748.000	25	64.127.692	25,00	12,58
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	858.945.440	25	187.047.423	25,00	21,78
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	60.000.000		-		
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	-		-		
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	11.326.000	25	1.137.000	25,00	10,04
						<b>22.398.068.440</b>		<b>3.572.636.653</b>		<b>15,95</b>
<b>27</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>									
<b>URUSAN PEMRINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>										
03:29:05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase layanan fasilitasi izin pemanfaatan panas bumi daerah	%	100	100,00	200.000.000	N/A	22.324.000	N/A	11,16
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>										
03:30:02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran perusahaan yang Difasilitasi	%	0	100,00	250.000.000	N/A	18.272.000	N/A	7,31
03:30:03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	100,00	7.314.053.000	N/A	152.574.000	N/A	2,09
03:30:04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Jaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Daerah	%	100	100,00	750.000.000	N/A	37.864.500	N/A	5,05

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
03:30:05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Produk daerah Siap Ekspor	%	0	16,00	950.000.000	N/A	-	N/A	0,00
03:30:06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	0	44,00	908.611.000	N/A	59.015.500	N/A	6,50
03:30:07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Produk unggulan Lokal yang masuk pusat sarana distribusi perdagangan	Produk	0	20,00	600.000.000	N/A	110.183.000	N/A	18,36
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	770.000.000	25	35.676.000	25,00	4,63
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	13.418.653.512	25	3.602.151.766	25,00	26,84
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100,00	3.639.525.400	25	193.383.100	25,00	5,31
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100,00	1.582.688.000	25	297.156.000	25,00	18,78
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100,00	2.313.286.560	25	390.705.823	25,00	16,89
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	787.380.000	-	-		

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100,00	511.066.600	-	-	0,00	0,00
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	-	-	-	0,00	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>										
03:31:02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Jumlah IKM Mandiri	%	9,1	10,05	4.820.000.000	N/A	537.746.980	N/A	11,16
03:31:03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase Jumlah perusahaan yang memiliki izin usaha	%	1,34	2,20	250.000.000	N/A	-	N/A	0,00
03:31:04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Presentase IKM yang melaporkan data industry melalui akun SIINAS	%	100	100,00	900.000.000	N/A	167.285.000	N/A	18,59
						<b>39.965.264.072</b>		<b>5.624.337.669</b>		<b>14,07</b>
<b>28</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>										
04:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	324.895.000	25,00	56.112.200	25,00	17,27
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	30.946.530.127	25,00	9.642.768.255	25,00	31,16
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100,00	9.219.040.000	25,00	1.603.640.523	25,00	17,39

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100,00	10.990.503.750	25,00	2.551.003.554	25,00	23,21
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100,00	5.916.514.000	25,00	1.771.209.022	25,00	29,94
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	5.169.040.030	25,00	583.380.000	25,00	11,29
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100,00	1.267.750.000	25,00	16.492.200	25,00	1,30
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100,00	1.440.885.000	0,00	-	0,00	0,00
		Nilai komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	11	13,50	962.000.000	N/A	359.323.200	N/A	37,35
		Persentase kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi yang terlaksana	%	100	100,00	765.000.000	N/A	208.687.000	N/A	27,28
		Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan, keuangan dan Pelaporan tepat waktu	%	100	100,00	1.856.500.000	N/A	427.949.615	N/A	23,05
		Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Daerah	%	88	90,00	780.000.000	N/A	110.000.000	N/A	14,10
04:01:02		Skoring LPPD Kabupaten	Poin	3,62	3,80	1.250.350.000	N/A	403.581.031	N/A	32,28

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan dibidang Perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	%	100	100,00	1.198.245.000	N/A	173.493.283	N/A	14,48
		Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti	%	75	75,00	700.000.000	N/A	43.864.200	N/A	6,27
		Persentase kebijakan dibidang bina mental dan spritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	%	100	100,00	18.105.717.000	N/A	21.352.652.500	N/A	117,93
04:01:03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian yang terlaksana	%	100	100,00	2.507.100.000	N/A	619.938.574	N/A	24,73
		Persentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi	%	95	98,00	670.000.000	N/A	38.382.300	N/A	5,73
		Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Predikat	Proaktif	Unggul	1.508.345.000	N/A	714.299.000	N/A	47,36
		Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi sumber daya alam berwawasan lingkungan	%	9	27,00	750.000.000	N/A	28.226.400	N/A	3,76
						<b>96.328.414.907</b>		<b>40.705.002.857</b>		<b>42,26</b>
<b>29</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>									
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>										
04:02:02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Kinerja DPRD pada Kegiatan Yang Difasilitasi Persidangan dan Perundang-undangan	%	95	95,00	3.652.117.250	N/A	364.241.300	N/A	9,97

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Tingkat Kinerja DPRD pada Kegiatan Yang Difasilitasi Bagian Umum	%	95	95,00	5.493.031.400	N/A	1.537.525.506	N/A	27,99
		Tingkat Kinerja DPRD pada Kegiatan Yang Difasilitasi Bagian Fasilitas Pengawasan dan Penganggaran	%	95	95,00	8.293.372.400	N/A	5.143.152.500	N/A	62,02
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	500.230.100	25	67.799.000	25,00	13,55
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	4.453.235.564	25	874.903.324	25,00	19,65
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	1.683.690.000	25	82.831.100	25,00	4,92
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	1.587.107.100	25	245.663.400	25,00	15,48
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	3.656.352.880	25	532.703.192	25,00	14,57
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	531.541.900		-		
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	561.942.600	25	212.044.000	25,00	37,73

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	40.884.900	25	5.575.000	25,00	13,64
		terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	100	100	28.534.542.457	25	8.136.121.671	25,00	28,51
		Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	%	100	100	240.000.000	25	45.000.000	25,00	18,75
						<b>59.228.048.551</b>		<b>17.247.559.993</b>		<b>29,12</b>
<b>30</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>									
<b>PERENCANAAN</b>										
05:01:02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	%	100	100,00	3.125.000.000	N/A	524.337.000	N/A	16,78
05:01:03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai	25,04	26,00	1.865.000.000	N/A	101.174.500	N/A	5,42
		Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai	25,85	26,81	1.750.000.000	N/A	156.115.600	N/A	8,92
		Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai	26,12	27,08	1.750.000.000	N/A	89.142.600	N/A	5,09
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	300.000.000	25	30.909.000	25,00	10,30

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	9.435.000.000	25	2.895.771.805	25,00	30,69
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	915.000.000	25	167.592.193	25,00	18,32
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	1.155.000.000	25	462.312.080	25,00	40,03
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	1.000.000.000	25	231.545.554	25,00	23,15
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	400.000.000	25	69.950.000	25,00	17,49
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	325.000.000	25	56.342.000	25,00	17,34
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	70.000.000	25	6.926.700	25,00	9,90
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>										
05:05:02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan/ diimplementasikan	%	NA	75,00	2.000.000.000	N/A	173.595.000	N/A	8,68
						<b>24.090.000.000</b>		<b>4.965.714.032</b>		<b>20,61</b>
<b>31</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>									
<b>KEUANGAN</b>										

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
05:02:02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketercapaian mandatory APBD	%	100	100,00	4.101.000.000	N/A	149.288.098	N/A	3,64
		Persentase realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah	%	92	94,00	683.949.806.081	N/A	293.617.215	N/A	0,04
		Persentase ketercapaian penyusunan Laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel	%	100	100,00	2.195.824.770	N/A	166.787.000	N/A	7,60
05:02:03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Aset daerah	%	100	100,00	3.897.999.800	N/A	219.388.500	N/A	5,63
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	409.958.000	25	35.329.000	25,00	8,62
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	59.024.723.258	25	14.541.723.744	25,00	24,64
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	357.282.000	25	15.109.400	25,00	4,23
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	1.767.146.000	25	336.261.848	25,00	19,03
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	2.529.968.800	25	284.458.113	25,00	11,24
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	267.000.000		-	0,00	0,00
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	920.330.000	25	180.175.000	25,00	19,58

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	362.823.485	25	65.439.000	25,00	18,04
						<b>759.783.862.194</b>		<b>16.287.576.918</b>		<b>2,14</b>
<b>32</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>									
<b>KEUANGAN</b>										
05:02:04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	28,24	6,74	10.206.378.200	N/A	565.072.400	N/A	5,54
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	222.360.800	25	29.066.000	25,00	13,07
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	19.112.458.260	25	1.267.755.977	25,00	6,63
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	1.924.744.000	25	85.373.600	25,00	4,44
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	1.674.407.090	25	468.421.336	25,00	27,98
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	2.117.822.160	25	497.987.916	25,00	23,51
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	706.460.500	25	68.000.000	25,00	9,63
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	592.870.600	25	7.533.200	25,00	1,27

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	47.153.400	0	-	0,00	0,00
						<b>36.604.655.010</b>		<b>2.989.210.429</b>		<b>8,17</b>
<b>33</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA</b>									
<b>KEPEGAWAIAN</b>										
05:03:02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai dimensi kualifikasi	Nilai	13,13	13,40	2.949.999.800	N/A	323.303.000	N/A	10,96
		Persentase Pemenuhan Pegawai Akibat Pemberhentian	%	100	100,00	1.400.000.000	N/A	135.103.000	N/A	9,65
		Persentase Ketersuaian Jabatan dengan Kualifikasi dan Kompetensi	%	100	100,00	1.300.000.000	N/A	18.790.000	N/A	1,45
		Nilai Dimensi Disiplin dan Kinerja	Nilai	27	29,00	1.051.815.800	N/A	123.791.000	N/A	11,77
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100.000.000	25	25.450.000	25,00	25,45
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	10.923.861.862	25	3.970.698.627	25,00	36,35
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	841.120.000	25	200.351.425	25,00	23,82
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	844.785.230	25	265.500.500	25,00	31,43

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	1.000.599.180	25	338.817.225	25,00	33,86
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	199.486.000		-	0,00	0,00
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	111.250.000		-	0,00	0,00
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	61.194.000	25	14.025.800	25,00	22,92
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>										
05:04:02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Dimensi Kompetensi	Nilai	10,88	32,50	3.175.000.000	N/A	306.828.000	N/A	9,66
						<b>23.959.111.872</b>		<b>5.722.658.577</b>		<b>23,89</b>
<b>34</b>	<b>INSPEKTORAT</b>									
<b>PENGAWASAN</b>										
06:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	3,40	4.605.500.000	N/A	481.245.258	N/A	10,45
06:01:03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	3,00	1.258.610.000	N/A	49.202.500	N/A	3,91
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	106.450.000	25	22.082.000	25,00	20,74

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	8.181.961.147	25	4.265.865.969	25,00	52,14
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	3.007.000.000	25	141.943.850	25,00	4,72
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	864.150.000	25	96.496.700	25,00	11,17
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	909.740.000	25	206.862.045	25,00	22,74
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	705.000.000		-	0,00	0,00
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	1.328.000.000	25	6.281.000	25,00	0,47
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	42.000.000	25	6.394.500	25,00	15,23
						<b>21.008.411.147</b>		<b>5.276.373.822</b>		<b>25,12</b>
<b>35</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>									
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>										
08:01:02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	indeks	80	83,00	1.894.275.200	N/A	433.263.936	N/A	22,87

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
08:01:03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	%	75,5	77,50	12.489.078.000	N/A	908.750.000	N/A	7,28
08:01:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Profesionalisme Ormas	Indeks	70	72,00	990.704.000	N/A	53.210.000	N/A	5,37
08:01:05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Indeks	69	71,00	1.324.862.000	N/A	91.645.000	N/A	6,92
08:01:06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penurunan konflik sosial di masyarakat	%	10	30,00	5.467.376.400	N/A	889.086.000	N/A	16,26
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	332.246.000	25	13.166.100	25,00	3,96
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	4.957.760.530	25	1.382.490.327	25,00	27,89
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	534.250.000	25	89.716.400	25,00	16,79
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	291.094.000	25	155.954.500	25,00	53,58

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	534.008.560	25	112.989.107	25,00	21,16
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	933.000.000	0	-	0,00	0,00
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	985.627.000	25	9.347.000	25,00	0,95
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	53.104.000	25	2.433.500	25,00	4,58
						<b>30.787.385.690</b>		<b>4.142.051.870</b>		<b>13,45</b>
<b>36</b>	<b>KECAMATAN</b>									
<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS</b>										
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan	%	89,4	92,95	547.875.000	N/A	184.708.500	N/A	33,71
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	100	100,00	5.318.471.440	N/A	2.481.448.900	N/A	46,66
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara	%	80	0,00	1.027.655.500	N/A	112.613.500	N/A	10,96
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	%	100	100,00	659.069.000	N/A	87.992.000	N/A	13,35
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rata-rata Kepuasan Masyarakat di tingkat desa	%	89,4	92,95	695.384.000	N/A	119.014.000	N/A	17,11

Kode	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025		Capaian Kinerja	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	517.025.600	25	108.110.900	25,00	20,91
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	98.335.346.751	25	32.634.752.578	25,00	33,19
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100	9.342.944.800	25	1.692.714.500	25,00	18,12
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100	5.837.925.785	25	931.495.580	25,00	15,96
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100	13.273.986.659	25	3.434.810.012	25,00	25,88
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	2.418.629.526	25	811.500	25,00	0,03
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	%	100	100	254.989.000	25	3.978.500	25,00	1,56
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100	156.833.200	25	16.406.000	25,00	10,46
		Penataan Organisasi				15.000.000				
						<b>138.401.136.261</b>		<b>41.808.856.470</b>		<b>30,21</b>

Tabel 2.3. Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah Terhadap RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	
				KINERJA (5%)	Anggaran (%)
1	DINAS PENDIDIKAN	1.289.515.268.572	162.085.125.223	N/A	12,57
2	DINAS KESEHATAN	922.717.192.877	86.658.507.349	N/A	9,39
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	186.718.649.514	9.985.549.130	N/A	5,35
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	236.791.471.571	4.942.553.734	N/A	2,09
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.158.950.570	3.620.506.582	N/A	32,44
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	25.315.500.000	3.629.691.463	N/A	14,34
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	31.377.633.235	5.371.987.173	N/A	17,12
8	DINAS SOSIAL	29.950.210.755	3.330.413.019	N/A	11,12
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	13.328.880.254	2.846.563.857	N/A	21,36
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.371.329.411	2.131.764.615	N/A	20,55
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	13.102.699.214	1.931.194.391	N/A	14,74
12	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	15.060.412.532	1.931.719.911	N/A	12,83
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	37.224.130.210	6.981.795.419	N/A	18,76
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	19.455.642.235	7.437.115.112	N/A	38,23
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	24.299.274.008	4.487.894.004	N/A	18,47
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	55.719.696.761	7.525.763.126	N/A	13,51
17	DINAS PERHUBUNGAN	59.566.796.567	8.902.156.314	N/A	14,94
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	17.574.786.278	4.526.166.367	N/A	25,75
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	12.401.529.423	2.775.514.295	N/A	22,38
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	13.423.999.082	2.135.648.310	N/A	15,91
21	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	36.551.937.958	2.579.982.317	N/A	7,06
22	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	12.441.682.524	3.038.296.792	N/A	24,42
23	DINAS PERIKANAN	36.643.239.772	5.828.338.755	N/A	15,91
24	DINAS PARIWISATA	19.836.178.578	2.792.146.105	N/A	14,08
25	DINAS PERTANIAN	132.761.856.696	11.430.925.260	N/A	8,61
26	DINAS PETERNAKAN	22.398.068.440	3.572.636.653	N/A	15,95
27	DINAS PERDAGANGAN	39.965.264.072	5.624.337.669	N/A	14,07

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	
				KINERJA (5%)	Anggaran (%)
	DAN PERINDUSTRIAN				
28	SEKRETARIAT DAERAH	96.328.414.907	40.705.002.857	N/A	42,26
29	SEKRETARIAT DPRD	59.228.048.551	17.247.559.993	N/A	29,12
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	24.090.000.000	4.965.714.032	N/A	20,61
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	759.783.862.194	16.287.576.918	N/A	2,14
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	36.604.655.010	2.989.210.429	N/A	8,17
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	23.959.111.872	5.722.658.577	N/A	23,89
34	INSPEKTORAT	21.008.411.147	5.276.373.822	N/A	25,12
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30.787.385.690	4.142.051.870	N/A	13,45
36	KECAMATAN	138.401.136.261	41.808.856.470	N/A	30,21
<b>J U M L A H</b>		<b>4.515.863.306.741</b>	<b>507.249.297.913</b>	<b>N/A</b>	<b>11,23</b>

### 2.3. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa perhitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:

- 1) Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia); dan
- 2) Pencapaian Penerima Layanan Dasar.

Indeks pencapaian SPM ( $IP_{SPM}$ ) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima. Dan untuk indeks pencapaian SPM dikelompokkan menjadi beberapa kategori terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar sebagai berikut:

Tabel 2.4. Kategori nilai indeks pencapaian SPM ( $IP_{SPM}$ ) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar

No	Nilai	Kategori	Deskripsi
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90-99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80-89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70-79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79

5	60-69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6	<60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

Secara umum, pemenuhan SPM Kabupaten Sukabumi berdasarkan bidang sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum tercapai sesuai target, seperti yang ditunjukkan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.5. Capaian SPM Kabupaten Sukabumi Triwulan I Tahun 2025

No.	SPM	Target 2025	Realisasi 2025	Kategori
1	Bidang Pendidikan	100,00	89,53	TUNTAS MADYA
2	Bidang Kesehatan	100,00	35,83	BELUM TUNTAS
3	Bidang Pekerjaan Umum	96,49	0,00	BELUM TUNTAS
4	Bidang Perumahan Rakyat	100,00	0,00	BELUM TUNTAS
5	Bidang Trantibumlinmas	100,00	20,79	BELUM TUNTAS
6	Bidang Sosial	100,00	6,13	BELUM TUNTAS

Sumber: e-SPM



Gambar 2.1. Realisasi SPM Kabupaten Sukabumi Tahun 2024



Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hasil evaluasi berdasarkan capaian Jenis pelayanan SPM di Kabupaten Sukabumi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seluruh jenis pelayanan belum mencapai target. Jenis pelayanan SPM yang melebihi 50 persen antara lain: (1) Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 76,90 persen; (2) Pendidikan Dasar sebesar 98,17persen; (3) Pendidikan Kesetaraan sebesar 93,51 persen; (4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar 90,17 persen; (5) Pelayanan informasi rawan bencana sebesar 60,19 persen; (6) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 90,10 persen. Adapun rinciannya seperti yang tertera dalam tabel dan gambar berikut.

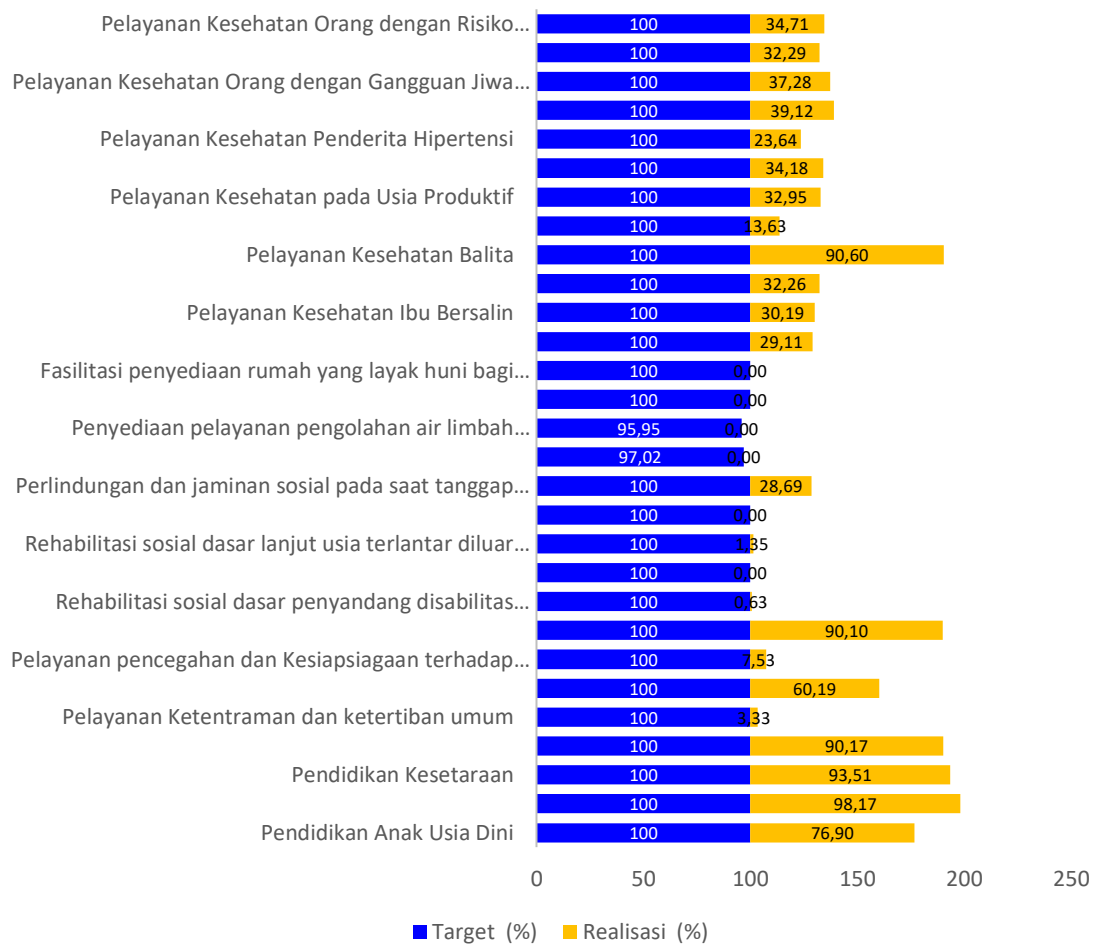
Tabel 2.6. Capaian Jenis Pelayanan SPM Kabupaten Sukabumi Pada Triwulan I Tahun 2025

Bidang Urusan	No	Jenis Pelayanan SPM	2025			PD Pengampu
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Pendidikan	1	Pendidikan Anak Usia Dini	100	76,90	76,90	Dinas Pendidikan
	2	Pendidikan Dasar	100	98,17	98,17	
	3	Pendidikan Kesetaraan	100	93,51	93,51	
Trantibumlinmas	4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	90,17	90,17	Dinas Damkar
	5	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100	3,33	3,33	Satpol PP

Bidang Urusan	No	Jenis Pelayanan SPM	2025			PD Pengampu
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
	6	Pelayanan informasi rawan bencana	100	60,19	60,19	BPBD
	7	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100	7,53	7,53	
	8	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	90,10	90,10	
Sosial	9	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	0,63	0,63	Dinas Sosial
	10	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100	0,00	0,00	
	11	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100	1,35	1,35	
	12	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100	0,00	0,00	
	13	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	100	28,69	28,69	
Pekerjaan Umum	14	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	97,02	0,00	0,00	Dinas Perkim
	15	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	95,95	0,00	0,00	
Perumahan Rakyat	16	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	100	0,00	0,00	
	17	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kab/kota	100	0,00	0,00	
Kesehatan	18	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	29,11	29,11	Dinas Kesehatan
	19	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	30,19	30,19	
	20	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	32,26	32,26	
	21	Pelayanan Kesehatan Balita	100	90,60	90,60	
	22	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	13,63	13,63	
	23	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	32,95	32,95	
	24	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	34,18	34,18	
	25	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	23,64	23,64	
	26	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	39,12	39,12	
	27	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	37,28	37,28	
	28	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	32,29	32,29	
	29	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100	34,71	34,71	

**Keterangan:**

	Melampaui
	Tercapai
	Tidak Tercapai
	Tidak Tersedia data



Gambar 2.2. Capaian Per Jenis Pelayanan SPM Kabupaten Sukabumi Triwulan I Tahun 2025

#### 2.4. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja di atas tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut. faktor-faktor pendukung pencapaian target-target kinerja tersebut, antara lain yaitu :

- Sinergi antar instansi, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota lainnya serta antar perangkat daerah/lembaga di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
- Dukungan kebijakan, sumber daya dan dukungan teknis dalam rangka pelaksanaan pembangunan.
- Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur;
- Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- Adanya dukungan pendanaan dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, dan sumber dana lainnya seperti *Coorporate Social Responsibility* (CSR);

- f. Tingginya komitmen perangkat daerah di Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan kinerja;
- g. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi;
- h. Penerapan teknologi dan inovasi pada beberapa sektor program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja;
- i. Meningkatnya partisipasi masyarakat/*stakeholder* dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di RKPD maupun APBD Tahun 2025. Keterlibatan stakeholder tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Adapun beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja tersebut antara lain :

- a. Dampak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025, tujuannya untuk mengurangi pemborosan anggaran dan mengalokasikan dana secara lebih efektif untuk program-program prioritas. Dengan adanya kebijakan Inpres tersebut juga, kepala daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola daerah. Dampak adanya Inpres tersebut APBD yang telah disusun berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan, dipangkas pada beberapa pos belanja, dan dana transfer dari pusat ke daerah pun pada beberapa bidang terkena efisiensi.
- b. Adanya pergeseran anggaran terkait dengan terbitnya Inpres No. 1 tahun 2025, menyebabkan jadwal pelaksanaan kegiatan pun bergeser.
- c. Penyimpanan Anggaran kas/*Cash Budget* rendah pada awal sampai tengah tahun anggaran, namun meningkat memasuki akhir tahun anggaran.
- d. Terjadinya bencana di beberapa wilayah di Kabupaten Sukabumi di akhir tahun 2024 dan di awal tahun 2025, menyebabkan penganggaran tahun 2025 diprioritaskan untuk penanggulangan bencana, hal tersebut dapat berdampak terhadap pencapaian kinerja bidang lainnya;
- e. Lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar instansi terkait;
- f. Adanya perubahan dan atau tumpang tindih regulasi dari pemerintah pusat/provinsi.
- g. Rendahnya kapasitas fiskal APBD Kabupaten Sukabumi.

## **BAB. III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Penetapan arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sukabumi tahun 2025 tidak terlepas dari gambaran kondisi perekonomian daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Gambaran kondisi ekonomi daerah menjadi salah satu landasan dalam mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan masalah agar pembangunan daerah tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang direncanakan. Adapun kondisi perekonomian pada bab ini terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, PDRB pengeluaran, inflasi, analisis sektor basis daerah, perkembangan dan tantangan daerah, serta target ekonomi makro daerah sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah.

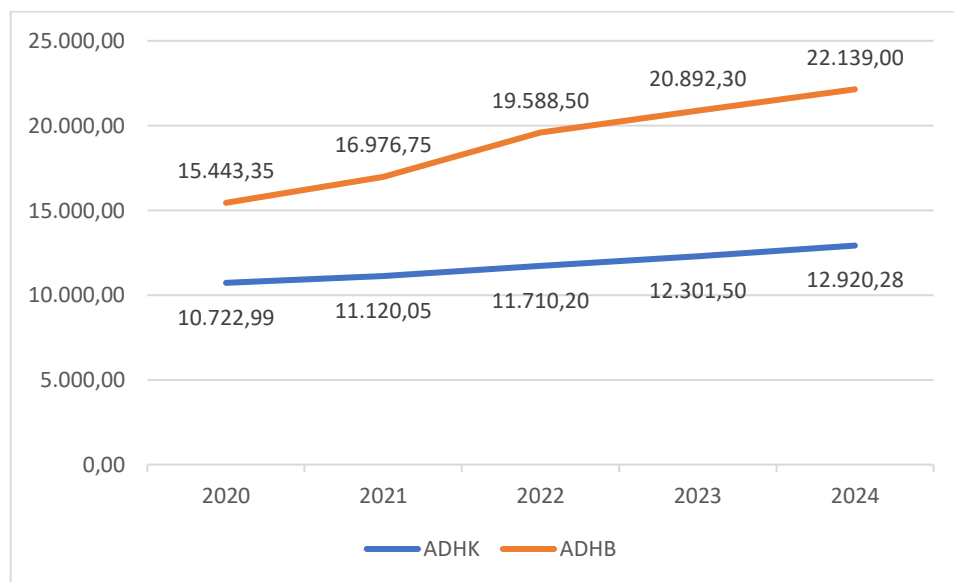
#### **3.1.1 Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi**

Pada tingkat nasional, PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam negara, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Lebih lanjut dalam metode perhitungannya, PDB dibedakan menjadi PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, dan PDB atas dasar harga konstan (ADHK) yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Ditinjau dalam aspek yang lebih detail pada tingkat regional (Provinsi dan Kabupaten) terdapat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota dalam periode tertentu, baik melalui pendekatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Struktur perekonomian Nasional tahun 2024 didominasi oleh sektor lapangan usaha diantaranya industri pengolahan sebesar 18,52 persen; pedagang besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,99 persen; pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,78 persen; pertambangan dan penggalian sebesar 8,78 pesen; dan konstruksi sebesar 9,63 persen. Pada tahun 2024, sektor pertambangan

Indonesia mengalami penurunan harga komoditas dan perlambatan pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh melemahnya permintaan dari pasar internasional, tingginya curah hujan di Sumatera dan Kalimantan serta moderasi harga komoditas.

Dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, PDB Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten baik berdasarkan ADHK maupun ADHB. Pada pendekatan ADHK, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa terpengaruh oleh inflasi, PDB meningkat dari Rp 10.722,99 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 12.920,28 triliun pada tahun 2024. Ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang stabil dan keberlanjutan pertumbuhan sektor-sektor utama. Sementara itu, berdasarkan pendekatan ADHB, yang mencerminkan nilai nominal ekonomi termasuk pengaruh inflasi, PDB tumbuh lebih tajam dari Rp 15.443,35 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 22.139,00 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa di pasar. Perkembangan PDB ADHK dan ADHB Nasional dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada **Gambar 3.1**.



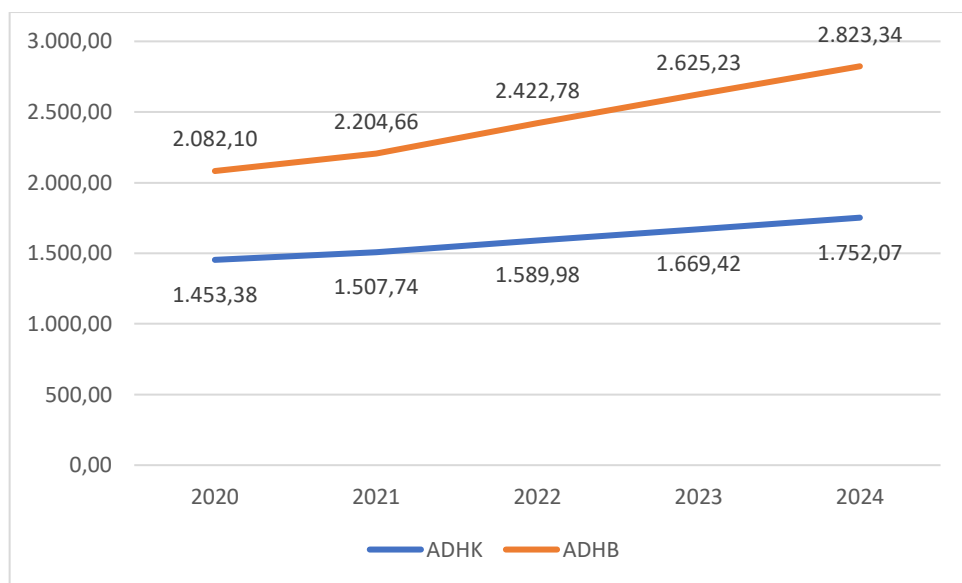
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

**Gambar 3.1** Produk Domestik Bruto (PDB) C 2020-2024 (Triliun Rupiah)

Beranjak pada PDRB Provinsi Jawa Barat, berdasarkan ADHK dan ADHB menunjukkan pergerakan yang serupa dengan nasional. Pada tahun 2024, PDRB Provinsi Jawa Barat atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp 1.752,07 triliun, sementara atas dasar harga berlaku mencapai Rp 2.823,34 triliun. Meskipun terjadi penurunan laju pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 4,95 persen secara kumulatif, ekonomi Provinsi Jawa Barat tetap menunjukkan performa yang positif.

Menguatnya ekonomi Provinsi Jawa Barat didorong oleh pertumbuhan positif pada sebagian besar sektor ekonomi. Perekonomian di Provinsi Jawa Barat tahun 2024 dapat tumbuh baik sebesar 4,95 persen (*c-to-c*), hal ini menunjukkan roda

perekonomian kembali bergerak hampir merata pada beberapa sektor ekonomi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,34 persen seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dengan momen libur Natal dan Tahun Baru. Diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,73 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,20 persen; dan Jasa lainnya sebesar 7,93 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai salah satu lapangan usaha yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 3,52 persen dan 4,85 persen. Produk Domestik Regional Bruto, ADHK dan ADHB Provinsi Jawa Barat dari tahun 2010 hingga tahun 2025 dapat dilihat pada **Gambar 3.2**.



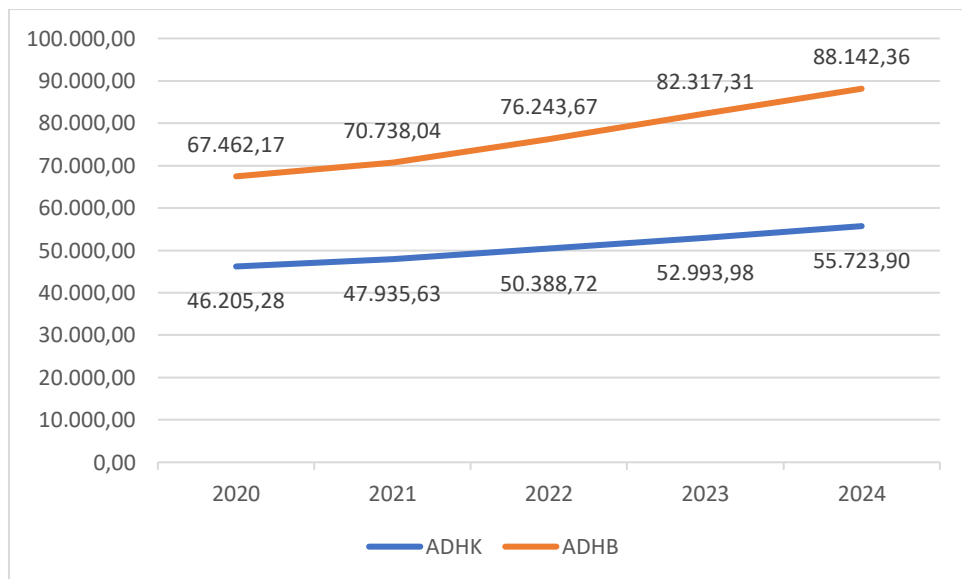
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

**Gambar 3.2** Produk Domestik Regional Bruto ADHK dan ADHB Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)

Selama lima tahun terakhir (2020 – 2024) struktur perekonomian Kabupaten Sukabumi didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Konstruksi; serta Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sukabumi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai sebesar 22,58 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 17,14 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 16,25 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,95 persen serta lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,32 persen. Sementara

peranan lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 6 (enam) persen.

PDRB Kabupaten Sukabumi menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan data ADHK, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa terpengaruh oleh inflasi, PDRB meningkat dari Rp 46.205,28 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp55.723,90 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, berdasarkan data ADHB, yang mencerminkan nilai nominal ekonomi termasuk pengaruh inflasi, PDRB tumbuh dari Rp67.462,17 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp88.142,36 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Adapun Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada **Gambar 3.3**.



Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2025

**Gambar 3.3** Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB dan ADHK Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

### 3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang mencerminkan peningkatan aktivitas produksi dan pendapatan dalam suatu negara dari waktu ke waktu. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing nasional. Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan yang cukup kuat, ditunjukkan oleh peningkatan PDB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor, serta didukung oleh berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang responsif.

Indonesia merupakan salah satu anggota G-20 karena dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya yang cukup baik selama ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Sejak mengalami

kontraksi pada tahun 2020, perekonomian nasional terus bangkit, ditandai dengan meningkatnya nilai PDB baik secara riil maupun nominal. Oleh karena itu, dalam menetapkan kebijakan ekonominya, Indonesia perlu menelaah kondisi perekonomian global khususnya negara maju, negara berkembang dan negara lainnya di ASEAN.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2024 menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang relatif moderat. Berdasarkan laporan World Economic Outlook dari International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mencapai 3,2% pada tahun 2024, meningkat tipis dari capaian tahun 2023 sebesar 3,1%. Di sisi lain, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan global sebesar 2,6% pada tahun yang sama, dengan sedikit peningkatan menuju 2,7% pada tahun-tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi beberapa negara tersebut dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1** Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2020-2024

<b>Negara</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Amerika	-2.8	5.9	2.1	2.1	2,8
Arab Saudi	-5	4.4	7.9	3.4	1,7
Australia	-1.8	5.2	3.7	1.8	1,2
Filipina	-9.5	5.7	7.6	5.3	5,8
Indonesia	-2.1	3.7	5.3	5	5,0
Inggris	-11	7.6	4.1	0.5	0,9
Jepang	-4.2	2.2	1	2	-0,2
Kamboja	-3.1	3	5.2	5.6	5,5
Korea Selatan	-0.7	4.3	2.6	1.4	2,2
Malaysia	-5.5	3.3	8.7	4	4,8
Perancis	-7.7	6.4	2.5	1	1,1
Swiss	-2.3	5.4	2.7	0.9	0,9
Thailand	-6.1	1.5	2.6	2.7	2,7
Tiongkok	2.2	8.4	3	5	5,0
Vietnam	2.9	2.6	8	4.7	6,1

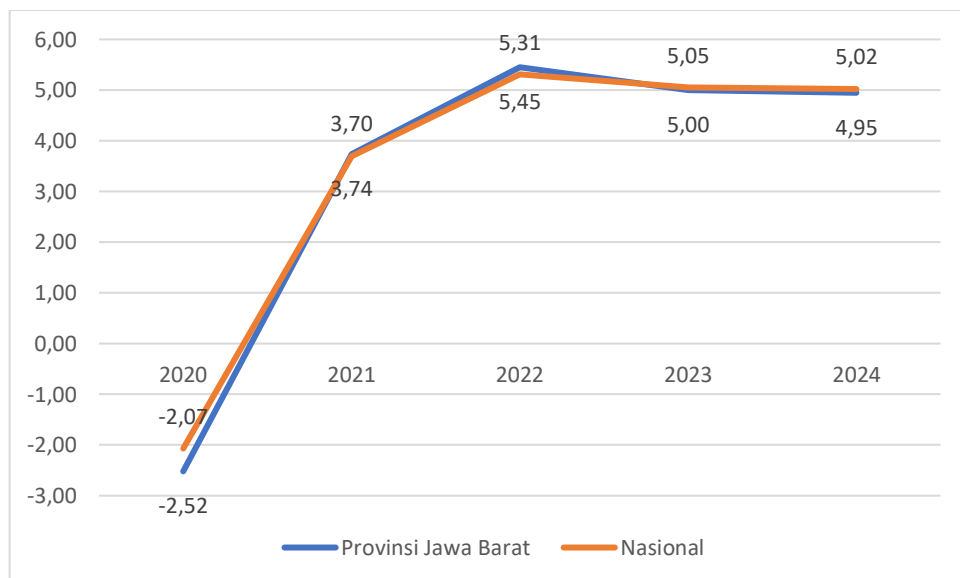
*Sumber: International Monetary Fund, 2025*

Berdasarkan data diatas, Perkembangan ekonomi global selama periode 2020 hingga 2024 mengalami dinamika yang signifikan, serta perlambatan pertumbuhan yang terjadi secara bertahap di banyak negara. Menurut Badan Kebijakan Fiskal pada tinjauan ekonomi, keuangan dan fiskal tahun 2024 menyebutkan kondisi ekonomi global tahun 2024 masih dibayangi oleh sejumlah tantangan struktural seperti ketegangan geopolitik, disrupti rantai pasok, perubahan iklim, dan ketidakpastian pasar keuangan. Meskipun demikian, peluang pemulihan tetap terbuka, terutama

bagi negara-negara yang mampu beradaptasi dengan perubahan global melalui transformasi digital, diversifikasi ekonomi, serta penguatan kerja sama internasional.

Setiap negara di dunia telah merumuskan berbagai langkah strategis dalam merancang kembali sistem perekonomian, disrupsi rantai pasok, krisis energi, serta ketegangan geopolitik internasional. Upaya tersebut pada umumnya mencakup kebijakan pemulihan ekonomi jangka pendek melalui stimulus fiskal dan moneter, antara lain pemberian bantuan sosial, subsidi, serta insentif bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Di samping itu, banyak negara juga mulai mengarahkan perhatian pada reformasi struktural jangka panjang, termasuk digitalisasi sektor ekonomi, penguatan ketahanan pangan dan kesehatan, serta percepatan transisi menuju energi terbarukan.

Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang relatif stabil di tengah tantangan global yang masih berlangsung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,02 persen, sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,05 persen. Meskipun terjadi perlambatan, angka ini tetap mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal, seperti ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi mitra dagang utama, serta fluktuasi harga komoditas global. Adapun Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (YoY) (Persen) dapat dilihat pada **Gambar 3.4**.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

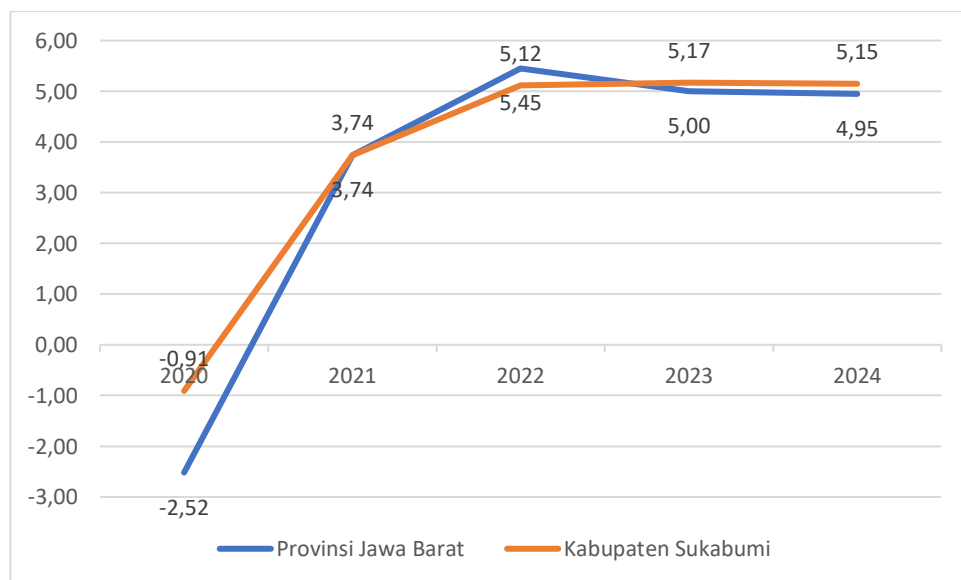
**Gambar 3.4** Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (YoY) (%)

Pertumbuhan ekonomi Nasional dan Jawa Barat yang positif sebagaimana tergambar di atas merupakan hasil dari penanganan ekonomi melalui program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah, termasuk kemampuan berinovasi dan bertahan dari masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah terus berupaya menjaga

stabilitas makroekonomi melalui kebijakan fiskal yang terarah dan reformasi struktural, termasuk percepatan transformasi digital, penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau. Dengan landasan kebijakan yang adaptif dan responsif, perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap tumbuh secara positif dan inklusif dalam jangka menengah.

Bila meninjau laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi menunjukkan tren positif meskipun terdapat fluktuasi tahunan. Sejak tahun 2021, perekonomian Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat menunjukkan pemulihan yang signifikan. Kabupaten Sukabumi mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2024, Kabupaten Sukabumi tumbuh sebesar 5,15 persen, sedikit lebih tinggi dari Provinsi Jawa Barat yang tumbuh 4,95 persen. Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan laju pertumbuhan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi tetap menunjukkan tren positif. Kondisi ini mencerminkan ketahanan ekonomi yang baik di tengah tantangan global dan domestik.

Secara sektoral dengan pertumbuhan yang paling tinggi di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 berasal dari sektor transportasi dan pergudangan. Sektor tersebut apabila ditelaah mengindikasikan aktivitas jasa (tersier) yang tumbuh menguat di Kabupaten Sukabumi dibandingkan sektor primer khususnya pertanian. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada **Gambar 3.5**.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

**Gambar 3.5** Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

### **3.1.3 Produk Domestik Bruto Sisi Pengeluaran**

Produk Domestik Bruto (PDB) / Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak hanya dilihat dari lapangan usaha tetapi juga dapat dilihat berdasarkan pengeluaran. Pendekat ini melihat besaran nilai produk barang dan jasa (output) yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani Rumah Tangga, dan pemerintah ditambah dengan investasi (pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori), serta ekspor neto (ekspor dikurang impor).

Pertumbuhan terjadi pada semua komponen PDB Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada PK-LNPRT sebesar 12,48 persen; diikuti Komponen PK-P sebesar 6,61 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,51 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,94 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,61 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 7,95 persen. Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Perekonomian Indonesia didominasi oleh Komponen PK-RT dengan kontribusi sebesar 54,04 persen. Komponen PMTB memiliki kontribusi terbesar kedua yakni sebesar 29,15 persen, diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,18 persen; Komponen PK-P sebesar 7,73 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 2,25 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,36 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa memiliki kontribusi sebesar 20,39 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut pengeluaran menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dari tahun 2020 hingga 2024. Konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang utama dan terus meningkat dari Rp 5.780,2 triliun pada 2020 menjadi Rp 6.806,4 triliun pada 2024, mencerminkan pemulihan daya beli masyarakat. Investasi melalui Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) juga tumbuh stabil, mencapai Rp 4.001,7 triliun pada 2024. Konsumsi pemerintah, ekspor, dan perubahan inventori turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan, meskipun dibayangi oleh peningkatan impor.

Secara keseluruhan, pertumbuhan PDB ADHB Provinsi Jawa Barat menunjukkan arah yang positif, dengan konsumsi rumah tangga dan PMTDB sebagai penggerak utama. Namun, peningkatan impor dan perlambatan laju pertumbuhan di beberapa sektor menandakan pentingnya diversifikasi dan penguatan ekonomi domestik untuk menjaga momentum pertumbuhan ke depan. Adapun Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pengeluaran berdasarkan harga konstan (ADHK) dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.2** Produk Domestik Bruto ADHK Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Konsumsi Rumah	5.780,2	5.896,6	6.187,9	6.486,3	6.806,4
Konsumsi LNPRT	130,3	132,4	139,9	153,7	173,1
Konsumsi Pemerintah	874,1	911,3	870,5	896,2	956,6
Pembentukan Modal Tetap Tangga Domestik Bruto	3.419,1	3.549,2	3.686,5	3.848,7	4.001,7
Perubahan Inventori	51,3	62,7	70,7	127,7	246,7
Ekspor Barang dan Jasa	2.083,9	2.458,8	2.858,0	2.895,8	3.085,1
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.686,0	2.105,1	2.420,7	2.380,9	2.571,4

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

PDRB ADHK menurut pengeluaran menggambarkan perubahan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, perekonomian Provinsi Jawa Barat menunjukkan perbaikan yang bertahap berdasarkan pendekatan pengeluaran atas dasar harga konstan. Komponen utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga, yang terus meningkat setiap tahunnya, mencerminkan pulihnya daya beli masyarakat dan stabilitas konsumsi domestik. Peningkatan juga terlihat pada pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan pengeluaran konsumsi pemerintah, meskipun kontribusinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan angka yang positif, menandakan adanya peningkatan investasi dan kegiatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, net ekspor antar daerah mengalami peningkatan, menggambarkan semakin baiknya konektivitas dan perdagangan antarwilayah di dalam provinsi. Sementara itu, perubahan inventori mengalami fluktuasi, namun pada 2024 kembali menunjukkan angka positif, mencerminkan adanya perbaikan dalam manajemen persediaan dan rantai pasok barang. Adapun Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3** Produk Domestik Regional Bruto ADHK Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	894,1	905,9	948,3	998,9	1.048,9
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,9	9,1	9,4	10,7	11,6
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	71,4	73,1	71,8	75,6	77,1
Pembentukan Modal Tetap Bruto	336,2	357,9	359,0	386,7	413,6
Perubahan Inventori	16,1	8,4	1,3	1,1	7

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Net Ekspor Antar Daerah	126,4	169,9	199,9	196,1	199,9

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

PDRB ADHK menurut pengeluaran Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan nilai. Sebagaimana nasional dan provinsi, penurunan yang terjadi pada tahun 2020 dikoreksi dengan aktivitas pada tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut pengeluaran Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan mencapai 0,04 persen. Adapun Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi menurut pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4** Produk Domestik Regional Bruto ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Konsumsi Rumah Tangga	29,265.68	28,768.02	29,253.68	30,630.38	32,140.49	33,7070.46
Konsumsi LNPRT	240.65	231.89	236.47	246.75	282.65	303.73
Konsumsi Pemerintah	2,338.67	2,341.29	2,395.87	2,361.75	2,477.96	2,402.52
Pembentukan Modal Tetap Bruto	13,464.78	12,590.38	13,471.70	13,561.34	14,366.01	15,335.09
Perubahan Inventori	2,039.80	816.59	416.35	69.87	57.36	35.92
Net Ekspor	-721.26	1,457.11	2,994.26	3,518.63	3,669.50	3,939.20

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data tersebut, perekonomian mengalami dinamika signifikan pada periode 2019 hingga 2024, sebagai komponen utama pengeluaran, konsumsi rumah tangga mengalami penurunan pada tahun 2020, namun secara konsisten menunjukkan pemulihan hingga 2024, mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat. Konsumsi LNPRT tetap menunjukkan kontribusi yang stabil dengan pertumbuhan yang moderat. Di sisi lain, konsumsi pemerintah mengalami fluktuasi. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang sempat mengalami kontraksi signifikan pada tahun 2020 akibat ketidakpastian ekonomi, mulai pulih secara bertahap seiring meningkatnya kepercayaan investor. Perubahan inventori mencatat volatilitas tinggi, termasuk penurunan signifikan pada tahun 2021, yang menunjukkan dampak penyesuaian pada rantai pasokan. Sementara itu, net ekspor menunjukkan perbaikan substansial dari nilai negatif pada tahun 2019 menjadi tren positif yang

berlanjut hingga 2024, mencerminkan peningkatan daya saing produk domestik dan keberhasilan diversifikasi pasar ekspor. Dengan kombinasi pemulihan konsumsi domestik, peningkatan investasi, dan penguatan sektor ekspor, perekonomian berhasil membangun fondasi yang lebih kokoh untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

### 3.1.4 Inflasi

Inflasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa. Perkembangan inflasi di Kabupaten Sukabumi mengikuti perkembangan inflasi Kota Sukabumi, karena Kota Sukabumi merupakan salah satu dari 7 (tujuh) daerah di Jawa Barat yang menjadi obyek pemantauan inflasi oleh Badan Pusat Statistik. 7 (tujuh) daerah di Jawa Barat yang menjadi obyek pemantauan inflasi oleh BPS diantaranya Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya. Tabel 3.5 memberikan gambaran mengenai tingkat inflasi daerah di Jawa Barat dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

**Tabel 3.5** Perbandingan Tingkat Inflasi Kota-Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

No	Kota di Jawa Barat	Inflasi Tahunan (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	2,18	1,93	5,82	3,36	1,75
2	Sukabumi	1,84	1,71	5,45	2,72	2,59
3	Bandung	1,75	1,65	7,45	0,63	1,61
4	Cirebon	1,16	1,81	4,86	3,22	1,1
5	Bekasi	2,81	1,61	5,37	3,14	1,6
6	Depok	1,78	1,81	6,06	2,49	1,95
7	Tasikmalaya	1,61	1,17	6,65	2,84	1,94
	Jawa Barat	2,18	1,69	6,04	2,48	1,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2025

Berdasarkan data diatas, kota-kota di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal seperti distribusi barang, kebijakan daerah, dan pola konsumsi masyarakat. Kenaikan inflasi yang signifikan pada beberapa kota pada 2022 menunjukkan dampak dari berbagai faktor eksternal dan internal, termasuk gangguan pasokan barang dan lonjakan harga energi. Gejolak tertinggi inflasi yang terjadi pada tahun 2022 tidak terlepas dari tekanan harga global, gangguan supply pangan, dan kebijakan penyesuaian BBM, selain juga karena meningkatnya permintaan masyarakat. Tantangan ini perlu menjadi pencermatan bagi Pemkab Sukabumi agar volatilitas dapat terjaga sehingga seluruh aspek makro lainnya dapat terkendali.

### 3.1.5 Analisis Sektor Basis pada Perekonomian di Kabupaten Sukabumi

Pembangunan perekonomian suatu wilayah tidak terlepas dari kontribusi dan peran setiap sektor yang menyusun perekonomian daerah tersebut. Setiap sektor akan membentuk keragaan perekonomian daerah tersebut. Pada bagian ini akan

dibahas mengenai peran sektor dalam struktur perekonomian dan pengembangan Kawasan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan indikator ekonomi pendapatan wilayah (PDRB) atas harga berlaku, untuk mengetahui suatu sektor basis atau non basis digunakan analisis LQ (*Location Quotient*).

Sektor basis merupakan sektor yang mempunyai nilai LQ lebih besar dari satu, artinya sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan akan sektor tersebut di daerahnya dan mempunyai potensi untuk diekspor ke luar daerah. Apabila nilai LQ kurang dari satu maka termasuk sektor non basis dan harus mengimpor dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan domestik. Berdasarkan analisis LQ dapat diketahui sektor basis dan sektor non basis di wilayah Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan data PDRB berdasarkan harga berlaku untuk periode 2020--2024. Pada analisis ini metode LQ digunakan untuk mengetahui basis dan non basis setiap sektor perekonomian di tingkat Kabupaten Sukabumi (wilayah bawah) terhadap Jawa Barat (wilayah atas). Nilai-nilai LQ tersebut merupakan rasio antara masing-masing sektor di Kabupaten Sukabumi dengan peran sektor-sektor tersebut di Jawa Barat. Nilai-nilai LQ tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.6.

**Tabel 3.6** Nilai LQ Sektor Perekonomian di Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024	Ket
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,65	2,67	2,70	2,76	2,78	B
B	Pertambangan dan Penggalian	3,69	3,78	3,94	3,92	4,00	B
C	Industri Pengolahan	0,41	0,42	0,42	0,41	0,43	NB
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,29	0,28	0,28	0,29	0,31	NB
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,40	0,40	0,41	0,42	0,44	NB
F	Konstruksi	1,53	1,54	1,57	1,53	1,53	B
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,24	1,24	1,25	1,23	1,21	B
H	Transportasi dan Pergudangan	1,46	1,47	1,41	1,38	1,39	B
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,97	0,97	0,96	0,92	0,93	NB
J	Informasi dan Komunikasi	0,76	0,77	0,77	0,76	0,73	NB
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,29	0,29	0,30	0,29	0,30	NB
L	Real Estate	1,60	1,58	1,64	1,66	1,61	B
M,N	Jasa Perusahaan	0,81	0,80	0,78	0,76	0,79	NB
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,41	1,42	1,44	1,39	1,38	B

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024	Ket
P	Jasa Pendidikan	1,63	1,65	1,70	1,69	1,67	B
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	1,25	1,25	1,26	1,22	B
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,83	0,83	0,82	0,81	0,76	NB

Sumber : BPS Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah)

Keterangan : B = Sektor Basis; NB = Sektor Non Basis

Berdasarkan hasil analisis sektor basis Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2024 terdapat sembilan sektor yang termasuk ke dalam sektor basis daerah. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor basis dengan nilai diatas 1 di Kabupaten Sukabumi, disusul oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Suatu sektor dikatakan unggul apabila sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dari kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang paling stabil untuk dijadikan kegiatan basis di wilayah Kabupaten Sukabumi. Apabila diidentifikasi dari kontribusinya, sektor tersebut penyumbang terbesar dalam perekonomian daerah. Dengan nilai LQ dan kontribusi yang tinggi, menjadikan sektor pertanian tetap menjadi kegiatan basis yang baik dan sangat berpotensi untuk dikembangkan di dalam wilayah maupun diluar wilayah Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat bahkan skala nasional sejak tahun 2020 hingga 2024. Selanjutnya melalui sektor pertanian yang tumbuh, upaya hilirisasi dapat dikembangkan untuk meningkatkan geliat ekonomi di Kabupaten Sukabumi.

### 3.1.6 Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Global

Merujuk pada kondisi perekonomian saat ini, pemulihan global berlangsung dengan stabilitas yang konsisten namun lambat, menunjukkan variasi dalam kecepatan pemulihan di setiap negara. Proyeksi dasar menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global diharapkan akan tetap sekitar 3,2 persen pada tahun 2024 dan 2025, ini mencerminkan tingkat yang serupa dengan tahun sebelumnya. Walaupun serupa, terdapat sedikit percepatan pertumbuhan di negara-negara maju yang diperkirakan akan meningkat dari 1,6 persen pada tahun 2023 menjadi 1,7 persen pada tahun 2024 dan 1,8 persen pada tahun 2025. Namun demikian, ada sedikit perlambatan yang diantisipasi di negara-negara berkembang (*emerging market*) dan berkembang, dengan pertumbuhan yang diharapkan turun dari 4,3 persen pada tahun 2023 menjadi 4,2 persen pada tahun 2024 dan 2025. Proyeksi pertumbuhan global lima tahun ke depan, diproyeksi sebesar 3,1 persen, diprediksi mencapai level terendah dalam beberapa dekade.

Prediksi juga menunjukkan penurunan inflasi global dari 6,8 persen pada tahun 2023 menjadi 5,9 persen pada tahun 2024 dan 4,5 persen pada tahun 2025, dengan negara-negara maju kembali ke target inflasi mereka lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara pasar emerging dan berkembang. Selain itu,

inflasi inti diperkirakan akan secara bertahap menurun. Meskipun bank sentral telah meningkatkan suku bunga secara signifikan untuk menjaga stabilitas harga, perekonomian global tetap menunjukkan ketahanan yang cukup. Dijelaskan bahwa perubahan di pasar hipotek dan perumahan selama dekade telah memoderasi dampak jangka pendek dari kenaikan suku bunga kebijakan.

Fokus pada prospek jangka menengah menyoroti bahwa proyeksi pertumbuhan output per kapita yang lebih rendah terutama disebabkan oleh hambatan struktural yang berkelanjutan, yang menghambat aliran modal dan tenaga kerja ke sektor-sektor yang produktif. Selain itu, prospek pertumbuhan yang kurang mengembirakan dari Tiongkok dan negara-negara berkembang lainnya dapat memberikan beban tambahan bagi mitra dagang akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 3.7** Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2022-2024

No	Negara	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Amerika Serikat	2.1	2.1	1.5
2	Jepang	1	2	1
3	Perancis	2.5	1	1.3
4	Tiongkok	3	5	4.2
5	Arab Saudi	7.9	3.4	4
6	Korea	2.6	1.4	2.2
7	Thailand	2.6	2.7	3.2
8	Filipina	7.6	5.3	5.9
9	Malaysia	8.7	4	4.3
10	Indonesia	5.3	5	5

Sumber: IMF (2024)

**Tabel 3.8** Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2025-2026

No	Negara	Proyeksi	
		2025	2026
1	Amerika Serikat	1.8	2.1
2	Jepang	0.6	0.5
3	Perancis	1.8	1.7
4	Tiongkok	4.1	4.1
5	Arab Saudi	4.2	4.3
6	Korea	2.3	2.2
7	Thailand	3.1	3
8	Filipina	6.1	6.2
9	Malaysia	4.4	4.4
10	Indonesia	5	5

Sumber: IMF (2024)

### 3.1.7 Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Nasional

Saat ini Indonesia dihadapkan pada tantangan perubahan iklim yang nyata terjadi. Hal ini diiringi juga dengan cuaca ekstrem yang terus terjadi. Secara langsung

hal ini berkaitan erat dengan daya dukung untuk pengembangan pertanian dan sektor lainnya yang berkaitan erat dengan aspek sumber daya alam. Tidak hanya dari sisi lingkungan, saat ini pembangunan Indonesia juga dihadapkan dengan masalah *aging population* dimana penduduk usia produktif menurun di negara maju sehingga potensial bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor terkait. Selain itu tantangan transisi energi mulai terasa namun ada peluang pemerataan didalamnya. Diperlukan national grid yang mampu mendistribusikan pasokan listrik ke luar pulau. Selain itu perlunya pembangunan pembangkit listrik dengan energi terbarukan. Berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya, dampak hilirisasi yang terlihat positif bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu hilirisasi yang akan dilanjutkan diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Pada aspek hilir, penerapan standar sustainability yang tinggi mengharuskan Indonesia dengan produknya untuk mampu berorientasi ramah lingkungan agar tetap bersaing di pasar global. Serta untuk memastikan seluruh tantangan tersebut berjalan lancar, tantangan sinkronisasi kebijakan makro dan sektor perlu senantiasa didorong.

Tantangan pembangunan tidak dapat lepas dari kerangka ekonomi makro dimana produk domestik bruto (PDB Indonesia menggambarkan kuatnya sektor industri dan primer (pertanian dan pertambangan). Gambaran PDB Tahun 2019 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.9** Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.115.494,5	2.254.541,3	2.428.900,5	2.617.670	2.791.428,00
B	Pertambangan dan Penggalian	993.541,9	1.523.650,1	2.393.390,9	2.198.018,1	2.026.589,20
C	Industri Pengolahan	3.068.041,7	3.266.905,5	3.591.774,7	3.900.061,7	4.202.866,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	179.741,6	190.047,2	204.673,7	218.250,9	227.527,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.305,4	12.026,4	12.536,9	13.285,3	14.258,80
F	Konstruksi	1.652.659,6	1.771.726,7	1.912.978,7	2.072.384,8	2.233.463,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.993.988,7	2.199.934,9	2.516.696,7	2.702.445,6	2.892.694,60
H	Transportasi dan Pergudangan	689.552,4	719.610,3	983.519,5	1.231.241,9	

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
						1.358.116,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	394.055	412.233,8	471.938,7	526.263,5	584.447,10
J	Informasi dan Komunikasi	695.963,3	748.802,9	812.737,3	883.637	960.021,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	696.072,9	736.187,2	809.370,7	869.167,8	922.810,90
L	Real Estate	453.780,9	468.221,7	488.311,2	505.457,4	520.728,10
M,N	Jasa Perusahaan	294.255,5	301.085,2	341.427,3	383.091,9	424.169,80
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	585.960,1	586.757	604.938,5	616.444,4	673.717,50
P	Jasa Pendidikan	201.480,4	227.235,1	236.171,6	251.998,5	621.417,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	201.480,4	227.235,1	236.171,6	251.998,5	278.216,10
R,S,T,U	Jasa Lainnya	302.588,1	312.189	354.181,2	405.191,5	454.309,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		15.443.353,2	16.976.751,4	19.588.089,9	20.892.348,50	22.138.964,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Mengacu pada data tersebut, 17 subsektor di Indonesia pada tahun 2024 dapat tumbuh positif dengan berbagai faktor didalamnya. Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas yang cukup tinggi menjadi *highlight* untuk pembangunan di Kabupaten Sukabumi yang juga sangat bergantung pada sektor tersebut. Sektor pertanian sebagai sektor hulu juga berkaitan dengan aktivitas perindustrian yang terjadi didalamnya hingga praktik sektor tersier yang berkaitan dengan jasa. Selanjutnya melihat aktivitas aktor perekonomian maka diketahui bahwa kegiatan konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama perekonomian melalui pengeluaran yang disusul oleh aktivitas investasi. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.10.

**Tabel 3.10** Produk Domestik Bruto Menurut Jenis Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020–2024 (Triliun Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga	8.899,9	9.236,0	10.161,7	11.109,5	11.964,9
Konsumsi LNPRT	201,4	207,9	228,9	260,7	300,1
Konsumsi Pemerintah	1.491,1	1.569,8	1.505,0	1.555,5	1.711,6

Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.897,0	5.227,8	5.697,2	6.127,7	6.452,5
Perubahan Inventori	97,8	111,1	129,3	248,6	498,3
Ekspor Barang dan Jasa	2.676,5	3.635,8	4.799,8	4.543,3	4.911,2
(Dikurangi) Impor Barang dan Jasa	2.415,4	3.189,6	4.106,0	4.088,4	4.514,0
PDB	15.443.353,2	16.976.751,4	19.588.089,9	20.892.376,7	22.139,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

*Internasional Monetary Fund* (IMF) memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2025-2026 akan stabil pada angka 5 persen. Proyeksi tersebut dapat menjadi motivasi bahwa Indonesia perlu melakukan upaya-upaya akselerasi disertai dengan pemerataan perekonomian didalamnya. Kebijakan fiskal yang diambil oleh Pemerintah Pusat juga berpengaruh pada kecepatan ketercapaian tujuan ekonomi. Oleh karena itu, perlu ada sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkecil *execution lag* melalui program-program strategis sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2025. Adapun target indikator makro nasional pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.11.

**Tabel 3.11** Target Indikator Makro Nasional Tahun 2025

No	Indikator Makro	Satuan	2023 (Realisasi)	2025	Target RPJMN 2025
1	Indeks Modal Manusia	Nilai	0,53	0,56	0,56
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,36	7,0 - 8,0	7,0 - 8,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,32	4,5 - 5,0	4,5 - 5,0
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,05	5,3 - 5,6	5,3 - 5,6

Sumber: Rakorbangpus Tahun 2024

### 3.1.8 Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Jawa Barat

Kondisi perekonomian Jawa Barat ke depan tidak terlepas dari tantangan kondisi perekonomian global dan nasional yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di daerah dari sisi investasi dan daya beli masyarakat. Secara umum masalah lingkungan dan fenomena alam El Nino menjadi tantangan tersendiri yang berkaitan dengan aspek sumber daya alam secara langsung. Sektor pertanian yang terdampak oleh El Nino perlu mendapat perhatian untuk pemenuhan pangan Jawa Barat. Kondisi tersebut diperburuk juga dengan ketidakpastian ekonomi global yang terjadi akibat perang dan hantaman aspek moneter. Selain itu peralihan

jabatan Gubernur kepada Pj Gubernur, akhir masa RPJMD 2018-2023 serta masa transisi RPD 2024-2026 menjadi tantangan tersendiri yang memengaruhi perekonomian Jabar. Adapun target indikator makro Jawa Barat pada Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Tabel 3.12.

**Tabel 3.12** Target Indikator Makro Jawa Barat Tahun 2025

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025
1	Indeks Modal Manusia	Poin	-	-	0,55
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,62	7,34	5,85-6,46
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,44	7,36	6,42-6,99
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,0	5,67	4,96-5,37
5	Indeks Gini	Poin	0,425	0,394	0,383-0,390
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	-	-	6,61

Sumber: *Ranwal RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029*

### 3.1.9 Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Kabupaten Sukabumi

Kondisi perekonomian Kabupaten Sukabumi ke depan tidak terlepas dari tantangan kondisi perekonomian global dan nasional yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di daerah dari sisi investasi dan daya beli masyarakat. Selain itu kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah dan daerah serta kebijakan lainnya seperti halnya kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dan penggajiannya, pembagian dana transfer umum yang sudah di batasi ketentuan penggunaannya dan kebijakan pemberian dana alakosi khusus (DAK) yang sudah ditentukan lokasi prioritasnya, sehingga memepengaruhi kapasitas atau kemampuan fiskal pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Kondisi tersebut juga bertambah dengan adanya transisi kepemimpinan baik pemilihan presiden, anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah, sehingga kita perlu menyesuaikan dengan transisi kebijakan dalam penyusunan dokumen RPJMD tahun 2025-2029 tahun depan. Berkenaan dengan hal tersebut, guna mengurai tantangan yang ada maka pembangunan akan menagcu pada target yang telah ditetapkan. Adapun target indikator makro daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.13

**Tabel 3.13** Target Indikator Makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2025

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025 *)	Target 2026 *)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,18	70,60	71,24
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,99	-	-
3	Tingkat kemiskinan	Persen	6,87	6,25-6,84	5,88-6,43
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,11	6,52-7,03	6,27-6,85
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,15	5,08-5,63	5,14-6,23
6	Pendapatan Per Kapita	Rp (1000) /Kapita	31.167,47	31.810-31.450	35.450-36.420
7	Indeks Gini	Poin	0,342	0,353-0,360	0,337-0,351
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton CO2Eq/Miliar	-	1,25	1,25

Sumber:\*) Rancangan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025-2029; \*)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan sektor pertanian, perdagangan dan perindustrian menjadi *leading sector* dalam pembangunan perekonomian daerah namun adanya pergeseran pertumbuhan sektor yang berdampak pada banyak hal khususnya pada perdagangan dan perindustrian. Kondisi tersebut mendorong upaya pemulihan ekonomi perlu berorientasi pada pengembangan sektor unggulan. Optimalisasi sektor pertanian dapat menjadi solusi pengembangan ekonomi yang inklusif dimana sektor tersebut dapat menjangkau berbagai pelaku ekonomi dari hulu hingga hilir dan tercatat memiliki *share* terbesar pada perekonomian di Kabupaten Sukabumi.

### 3.1.10 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

#### 1. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional

Bappenas dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 menyatakan bahwa dalam rangka mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 2025 upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,6 persen pada tahun 2025. Pembangunan pada tahun 2025 akan difokuskan:

1. Transformasi sosial yang meliputi pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2. Transformasi ekonomi yang mencakup hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja;
3. Transformasi tata kelola dengan cakupan pada kelembagaan yang tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif,

digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil;

4. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia dengan memperkuat hukum dan stabilitas, membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi;
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

## **2. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat**

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2025 difokuskan pada pencapaian target-target makro dan pembangunan yang telah dirancang, pemulihan dan pematapan ekonomi yang diarahkan kepada peningkatan realisasi investasi, optimalisasi industri berbasis bahan baku lokal (TKDN) dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pemulihan kinerja pariwisata, dan penguatan sistem pangan daerah hingga penyelesaian is-isu baik kewilayahan maupun sektoral. Dalam rangka pelaksanaan pemulihan ekonomi tersebut ditetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan antara lain:

1. Pembentukan dan pengembangan kawasan/sentra/klaster produksi sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Perbaikan Tata Kelola Pangan dengan memperhatikan akses, ketersediaan dan pemanfaatan pangan;
3. Penerapan link and match industri kecil-industri besar;
4. Mengembangkan Sarana Prasarana Industri melalui sistem informasi dan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung kolaborasi antara industry besar dan IKM;
5. Pembangunan dan Pengelolaan Daya Tarik, Atraksi dan Amenitas Wisata terintegrasi berskala Nasional dan Internasional;
6. Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui pendidikan vokasional yang bersertifikasi sesuai dengan kebutuhan kerja

## **3. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sukabumi**

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Sukabumi tahun 2025 memperhatikan sinkronisasi dan keterkaitan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Barat. Benang merah dari arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah dari sektor ekonomi. Adapun kebijakan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2025 diarahkan sebagai berikut:

1. Pada sektor pangan dan sektor primer mencakup:
  - a. Mengembangkan Kawasan unggulan berbasis potensi agribisnis
  - b. Meningkatkan kualitas SDM dan layanan infrastruktur di Kawasan unggulan
  - c. Mencetak agripreneur milenial yang potensial
  - d. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pembangunan sektor pertanian dan perikanan
  - e. Mengembangkan skema *closed loop*
2. Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM mencakup:
  - a. Meningkatkan kualitas SDM berbasis skala usaha
  - b. Mendorong branding produk unggulan daerah
  - c. Mendorong pertumbuhan sentra UMKM dan IKM
  - d. Optimalisasi peranan kelembagaan koperasi dan BUMD dalam pengembangan usaha
  - e. Memperluas akses pasar di dalam dan luar negeri
3. Sektor pariwisata mencakup:
  - a. Membangun budaya insan pariwisata kelas dunia
  - b. Mengembangkan produk wisata unggulan daerah
  - c. Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif daerah
  - d. Optimalisasi konsep Based Community Tourism dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah berbasis BUMDes
4. Sektor penanaman modal mencakup:
  - a. Meningkatkan promosi potensi investasi daerah berbasis digital
  - b. Mendorong sinergi antar sektor dan stakeholder dalam peningkatan investasi daerah

### **3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Secara umum komponen APBD terdiri dari:

A. Komponen Pendapatan, terdiri dari:

- 1) Pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah lainnya yang sah;
- 2) Pendapatan transfer yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah;
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Komponen Belanja, terdiri dari:

- 1) Belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
- 2) Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya;
- 3) Belanja tidak terduga;
- 4) Belanja transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

C. Komponen Pembiayaan, terdiri dari:

- 1) Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah (investasi), pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto tersebut dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah. kemampuan daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah salah satunya dicirikan oleh perkembangan PAD. Besaran PAD menjadi salah satu acuan dalam menilai kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, kemampuan keuangan Kabupaten Sukabumi menunjukkan kemampuan kemandirian fiskal yang belum mandiri, ditunjukkan dengan lebih tingginya proporsi pendapatan transfer sebagai sumber pendapatan daerah dibandingkan dari komponen PAD. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, sumber pendanaannya berasal dari kolaborasi antara APBN, APBD Provinsi, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/ *Public Private Partnership* (PPP), APBD Kabupaten/kota, Dana Umat, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Kolaborasi pendanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi 2024 (Diolah)

**Gambar 3.6** Kolaborasi Pendanaan Pembangunan di Kabupaten Sukabumi

### 3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kondisi dan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan memuat realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2025. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 3.14.

**Tabel 3.14** Perubahan target Pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2025

No	Uraian	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	BERTAMBAH / BERKURANG
1.1	Pendapatan Asli Daerah	<b>842,296,862,064.00</b>	<b>858,597,397,104</b>	<b>16,300,535,040</b>
1.1.1	Pajak Daerah	443,656,072,547.00	459,936,607,587	16,280,535,040
1.1.2	Retribusi Daerah	373,932,314,583.00	373,952,314,583	20,000,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,202,474,953.00	11,202,474,953	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah	13,505,999,981.00	13,505,999,981	-
1.2	Pendapatan Transfer	<b>3,698,064,969,027.00</b>	<b>3,793,760,923,979</b>	<b>95,695,954,952</b>
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3,392,123,751,000.00	3,428,161,236,500	36,037,485,500
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	-	-	-
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	-	-	-
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	-	-	-
1.2.1.4	Dana Penyesuaian	-	-	-
1.2.2	Pendapatan Transfer Antardaerah	305.941.218.027	365,599,687,479	59,658,469,452
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-
1.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	-	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<b>8,000,000,000</b>	<b>8,000,000,000</b>	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	8.000.000.000	8,000,000,000	-
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
Total Pendapatan Daerah		<b>4,548,361,831,091</b>	<b>4,660,358,321,083</b>	<b>111,996,489,992</b>

Kebijakan perubahan target pendapatan Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.14. Pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perubahan Pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar berdasarkan hasil proyeksi sebesar Rp 4,660,358,321,083. Pendapatan daerah Rp. 858,597,397,104, pendapatan transfer sebesar Rp 3,793,760,923,979 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 8,000,000,000. Proyeksi Pendapatan pada RKPD Perubahan 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 111,996,489,992.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja daerah merupakan kewajiban seluruh pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Data belanja daerah Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 3.15.

**Tabel 3.15** Perubahan target belanja daerah kabupaten Sukabumi tahun 2025

No	Uraian	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA				
2.1	Belanja Operasi	<b>3,397,118,525,744</b>	<b>3,521,789,231,338</b>	<b>124,670,705,594</b>	
2.1.1	Belanja Pegawai	1,608,507,341,659	1,666,546,408,188	58,039,066,529	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,372,453,493,684	1,438,685,132,749	66,231,639,065	
2.1.3	Belanja Bunga			0	
2.1.4	Belanja Subsidi			0	
2.1.5	Belanja Hibah	399,937,690,401	400,337,690,401	400,000,000	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	16,220,000,000	16,220,000,000	-	
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>352,490,379,560.00</b>	<b>359,459,519,641</b>	<b>6,969,140,081</b>	
2.2.1	Belanja Modal Tanah	5,324,968,460	5,210,184,000	(114,784,460)	
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88,568,337,957	92,701,627,017	4,133,289,060	
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112,372,077,487	114,110,851,968	1,738,774,481	
2.2.4	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	126,885,100,597	128,114,661,597	1,229,561,000	
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18,939,895,059	18,922,195,059	(17,700,000)	
2.2.6	Belanja Mosal Aset Lainnya	400,000,000	400,000,000	-	
2.3	Belanja Tidak Terduga	<b>30,465,979,305</b>	<b>29,774,218,305</b>	<b>(691,761,000)</b>	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	30,465,979,305	29,774,218,305	(691,761,000)	
2.4	Belanja Transfer	<b>723,161,004,243</b>	<b>723,161,004,243</b>	-	
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	49,800,701,755	49,800,701,755	-	
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	673,360,302,488	673,360,302,488	-	
Total Belanja Daerah		<b>4,503,235,888,852</b>	<b>4,634,183,973,527</b>	<b>130,948,084,675</b>	

Total belanja daerah Kabupaten Sukabumi pada perubahan RKPD tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 4.634.183.973.527, dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 3,521,789,231,338, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja modal sebesar Rp 359,459,519,641, merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga sebesar Rp 29,774,218,305, merupakan pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer sebesar Rp 723,161,004,243, merupakan pengeluaran uang pemerintah Kabupaten Sukabumi kepada pemerintah desa. Total belanja daerah sebelum dan sesudah perubahan mengalami peningkatan sebesar Rp 130,948,084,675.

**Tabel 3.16** Perubahan target pembiayaan daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2025

No	Uraian	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
3.1	Penerimaan Pembiayaan	88,584,157,761.00	88,497,652,444	-86,505,317	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	88,584,157,761.00	88,497,652,444	-86,505,317	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	114.672.000.000	114,672,000,000	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	114.672.000.000	114,672,000,000	-	
Jumlah Pembiayaan Netto		(26,087,842,239)	-26,174,347,556	-86,505,317	

### 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan analisis realisasi dan target pendapatan daerah, maka arah kebijakan pendapatan daerah menjadi hal yang sangat penting dalam upaya pencapaian target pendapatan daerah pada tahun 2025. Untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama dinas penghasil.
2. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
3. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
5. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
6. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
7. Melaksanakan akurasi data atas objek pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah.
8. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat.
9. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak daerah.

### **3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja daerah diarahkan agar terlaksananya pola pembelanjaan yang akuntabel, profesional, efisien, dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal.
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah.
3. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah lainnya yang terdapat dalam program-program perangkat daerah.

### **3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Apabila terjadi defisit anggaran, maka dapat diantisipasi dengan kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sedangkan apabila terjadi surplus anggaran, harus diantisipasi dengan kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah. Kondisi pembiayaan daerah Kabupaten Sukabumi mengalami defisit, atau jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan daerah. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan daerah dirumuskan agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah sehingga dapat memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

## **BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

#### **4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional**

Tahun 2025 adalah tahun pertama untuk pemenuhan target sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029. Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2025 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 diarahkan pada untuk mendukung tema dan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029. Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025 – 2029 diarahkan untuk Penguatan Fondasi Transformasi yang terdiri atas :

1. Transformasi Sosial

Transformasi Sosial ditempuh melalui Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

2. Transformasi Ekonomi

Transformasi Ekonomi ditempuh melalui hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.

3. Transformasi Tata Kelola

Transformasi Tata Kelola ditempuh melalui kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan kepemimpinan Indonesia

Supremasi Hukum, Stabilitas dan kepemimpinan Indonesia ditempuh melalui memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi ditempuh melalui memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Sasaran pembangunan nasional menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan, Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Represesentasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju

- 2) Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat
- 3) Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang
- 4) Daya saing Sumber Daya Manusia Meningkat
- 5) Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

Prioritas pembangunan yang terukur dan tersinergi dengan baik, strategi pembangunan wilayah yang konkret, serta tata kelola dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang kuat menjadi daya ungkit RPJMN Tahun 2025-2029 dalam mencapai sasaran pembangunan

#### **4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat**

Pembangunan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 mengusung tema “penyiapan infrastruktur dasar dan penguatan fondasi pembangunan” melalui penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dan sasaran pada rancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang *Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer*, dengan sasaran yaitu: Meningkatnya derajat kesehatan individu; Terbentuknya individu beretika dan berbudaya; Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum; Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan; dan Terbentuknya individu kreatif dan inovatif.
2. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi, dengan sasaran: Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri; Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan untuk Swasembada Pangan; Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa; dan Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif
3. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha, dengan sasaran: Meningkatnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja; Meningkatnya Kualifikasi, Kompetensi, dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja; dan Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan.
4. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang berbasis lingkungan, dengan sasaran: Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan; Meningkatnya Keterampilan, Akses Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil; dan Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat.

5. Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi, dengan sasaran: Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan; dan Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan.
6. Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan, dengan sasaran: Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif.

### **4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sukabumi**

#### **4.1.3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 Tujuan dan sasaran pembangunan menyesuaikan dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2025-2029 yang diturunkan dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sukabumi dan tema pembangunan tahun 2025 adalah "Pemerataan Infrastruktur Daerah untuk penguatan agroindustri dan pariwisata . Visi Kabupaten Sukabumi untuk perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarakah)"**. Pernyataan visi Kabupaten Sukabumi tersebut memiliki makna sebagai berikut:

#### **1. Maju**

Kabupaten Sukabumi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat, infrastruktur yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Kemajuan ini mencerminkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang prima.

#### **2. Unggul**

Kabupaten Sukabumi yang memiliki daya saing tinggi di berbagai sektor, terutama dalam bidang agribisnis, perikanan, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya lokal. Keunggulan ini juga mencerminkan peningkatan kualitas SDM yang berkompeten, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

#### **3. Berbudaya**

Kabupaten Sukabumi yang tetap mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal serta kearifan tradisional dalam kehidupan masyarakat. Ini mencakup pelestarian adat, seni, bahasa daerah, dan penguatan karakter masyarakat yang berlandaskan budaya luhur serta nilai-nilai keislaman.

#### **4. Berkah (Mubarakah)**

Kabupaten Sukabumi yang menjalankan pembangunan dengan prinsip keberlanjutan dan keberkahan, sehingga memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Keberkahan ini tercermin dalam kehidupan sosial yang harmonis, lingkungan yang lestari, serta pemerintahan yang amanah dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

Visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025-2029 diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

**Misi 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Melalui Pengembangan Agroindustri dan Pariwisata**

**Tujuan**

- 1.1 Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkah melalui pengembangan agroindustri dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan
- 1.2 Terwujudnya pembangunan daerah yang penuh keberkahan untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan melalui pemberdayaan masyarakat, pemerataan akses terhadap sumber daya, serta penguatan nilai-nilai spiritual dan sosial yang mendukung kesejahteraan berkelanjutan

**Sasaran Strategis**

- 1.1.1 Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah
- 1.1.2 Meningkatnya pertumbuhan investasi dan perdagangan daerah
- 1.2.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
- 1.2.2 Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif (sesuai dengan standar hidup yang layak)
- 1.2.3 Menurunnya tingkat kekurangan gizi

**Misi 2 : Membangun Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Penunjang Perekonomian yang Merata Dan Inklusif**

**Tujuan**

- 2.1 Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian yang merata dan inklusif, guna menciptakan daerah yang berkeadilan, sejahtera, dan penuh berkah

**Sasaran Strategis**

- 2.1.1. Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang fungsi permukiman yang berkualitas dan inklusif
- 2.1.2. Meningkatnya infrastruktur fisik penunjang perekonomian yang berkualitas dan merata

### **Misi 3 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya, Berbasis Iptek dan Imtaq**

#### **Tujuan**

- 3.1 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah dan berkelanjutan melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia yang unggul berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek)
- 3.2 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah dan harmonis melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia yang berbudaya dan berakhlak mulia berbasis iman dan takwa (Imtaq)

#### **Sasaran Strategis**

- 3.1.1 Meningkatkan integrasi layanan kesehatan secara merata
- 3.1.2 Meningkatkan pendidikan berkualitas yang merata
- 3.2.1 Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya lokal
- 3.2.2 Meningkatkan ketahanan keluarga, perlindungan anak, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender

### **Misi 4 : Membangun Pemerintahan yang Kolaboratif, Profesional, dan Akuntabel**

#### **Tujuan**

- 4.1 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel
- 4.2 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah dengan mendorong peningkatan daya saing daerah yang berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi lokal dan inovasi strategis

#### **Sasaran Strategis**

- 4.1.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif
- 4.2.1 Meningkatkan efisiensi dan produktivitas pembangunan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan melalui perkembangan teknologi dan komunikasi

Hasil perumusan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi terdiri dari 4 (empat) tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan, serta tujuan dan sasaran Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Sukabumi**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target	
			2024 (Realisasi)	2025 (Target)	2026	
<b>Visi</b>	<b>Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Maju, Unggul, Berbudaya dan Berkah (Mubarakah)</b>					
<b>Misi 1</b>	<b>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Melalui Pengembangan Agroindustri dan Pariwisata</b>					
1.1 Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkah melalui pengembangan agroindustri dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,15	5,08-5,63	5,68	
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah	64,10	64,13	65,42	
	1.1.1 Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah		Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	17,13	16,79	16,91
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,66	2,66	2,68
			Rasio PDRB Penyediaan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	22,58	22,80	22,81
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	n.a	2,46	2,57
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,11	6,15 – 7,05	6,60
		1.1.2 Meningkatnya pertumbuhan investasi dan perdagangan daerah		Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,12	28,34
			Pertumbuhan Nilai Ekspor (%)	496 Juta USD	5	5
	1.1.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,15	65,89	66,15
			Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	N/A	1,25	1,25
	1.2 Terwujudnya pembangunan daerah yang penuh keberkahan untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan melalui pemberdayaan masyarakat, pemerataan akses terhadap sumber daya, serta penguatan nilai-nilai spiritual dan sosial yang		Tingkat Kemiskinan (Persen)	6,87	6,42 - 6,90	6,43
			Indeks Gini (Poin)	0,366	0,345 - 0,358	0,340
1.2.1 Meningkatnya perlindungan sosial yang		Persentase Pencapaian Tingkat Kemiskinan (Persen)	96	100	100	

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target
			2024 (Realisasi)	2025 (Target)	2026
mendukung kesejahteraan berkelanjutan	adaptif (sesuai dengan standar hidup yang layak)	Indeks Gini (Poin)	0,366	0,345 - 0,358	0,340
	1.2.2 Menurunnya tingkat kekurangan gizi	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	N/A	4,76	4,58
<b>Misi 2</b>	<b>Membangun Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Penunjang Perekonomian yang Merata dan Inklusif</b>				
2.1 Meningkatnya pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian yang merata dan inklusif, guna menciptakan daerah yang berkeadilan, sejahtera, dan penuh berkah		Indeks Kualitas Infrastruktur (Poin)	N/A	41,41	43,70
	2.1.1 Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang fungsi permukiman yang berkualitas dan inklusif	Tingkat Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (persen)	32,83	32,47	33,29
	2.1.2 Meningkatnya infrastruktur fisik penunjang perekonomian yang berkualitas dan merata	a. Tingkat Kemantapan Jalan (persen)	60,58	61,37	62,17
		b. Rasio Konektivitas (poin)	56	56	56
		d. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang (persen)	80,94	N/A	81,44
		e. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi (persen)	54,37	54,42	55,13
<b>Misi 3</b>	<b>Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya, Berbasis Iptek dan Imtaq</b>				
3.1 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah dan berkelanjutan melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia yang unggul berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek)		Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	70,18	70,6	71,24
	3.1.1 Meningkatnya integrasi layanan kesehatan secara merata	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	74,85	75,15	75,41
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,30	98,15	98,25
	3.1.2 Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,39	12,41	12,46

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Target
			2024 (Realisasi)	2025 (Target)	2026
3.2 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah dan harmonis melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia yang berbudaya dan berakhlak mulia berbasis iman dan takwa (Imtaq)		Indeks Pembangunan Sosial dan Budaya	N/A	67,05	67,76
	3.2.1 Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Indeks Literasi Daerah	76,93	77,53	78,13
		Persentase Pemajuan Kebudayaan	N/A	24,14	25,64
	3.2.2 Meningkatnya ketahanan keluarga, perlindungan anak, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,533	0,52	0,50
		Penurunan Prevalensi Stunting pada balita	20,5	18,47	16,73
<b>Misi 4</b>	<b>Membangun Pemerintahan yang Kolaboratif, Profesional dan Akuntabel</b>				
4.1 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	82,85	65,00	65,50
	4.1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif	Persentase Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (%)	127	100	100
		Indeks Pelayanan Publik	N/A	4,30 - 4,33	4,34-4,36
4.2 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah dengan mendorong peningkatan daya saing daerah yang berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi lokal dan inovasi strategis		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,67	3,68 - 3,82	3,83 - 3,97
	4.2.1 Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembangunan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan melalui perkembangan teknologi dan komunikasi	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Pilar Institusi (Poin)	NA	NA	0,35

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025-2029

#### 4.1.3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi cara-cara yang diambil tersebut. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa

optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Dengan demikian, Strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang kemudian dijabarkan lebih rinci dengan serangkaian arah kebijakan. Arah Kebijakan perencanaan di tahun 2025 disesuaikan dengan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD atau dengan kata lain Arah Kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 4.2. Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi Kabupaten Sukabumi Tahun 2025**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran Strategis</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
1.1.1 Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	a. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	1.1.1.1 Meningkatkan investasi pada sektor industri pengolahan berbasis sumber daya lokal.	a. Pemberian insentif dan kemudahan investasi industri pengolahan
			b. Fasilitasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Ciambar dan Cikembar
			c. Pembangunan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis potensi daerah
		1.1.1.2 Peningkatan sumber daya manusia (SDM) industri	a. Optimalisasi Gedung Promosi IKM sebagai pusat pelatihan bagi IKM
			b. IKM Motekar: Pelatihan produksi IKM
		1.1.1.3 Mendorong pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) melalui teknologi dan inovasi.	a. Peningkatan akses pasar berbasis digital
			b. Fasilitasi legalitas usaha dan sertifikasi produk (NIB, halal, PIRT, dsb)
			c. IKM Motekar: Peningkatan produktivitas IKM melalui adopsi teknologi dan fasilitasi Sarpras
		1.1.1.4 Memperkuat rantai pasok industri pengolahan agar lebih efisien dan berdaya saing.	a. Mendorong hilirisasi bahan baku produk primer unggulan daerah
			b. Mengembangkan kemitraan dalam penguatan rantai pasok
	c. Menyelaraskan kebijakan hulu-hilir pembangunan sentra (IKM) berbasis potensi daerah		
	b. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1.1.1.5 Meningkatkan daya tarik wisata melalui pengembangan destinasi unggulan	a. Memperkuat tata kelola pengembangan pariwisata berstandar internasional
			b. Pengembangan kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark
			c. PARIWISATA BERDAYA : Penguatan event besar pariwisata
d. PARIWISATA BERDAYA : Revitalisasi amenitas destinasi pariwisata unggulan			
e. PARIWISATA BERDAYA : Peningkatan SDM kepariwisataan berbasis Sapta Pesona melalui pelatihan dan sertifikasi			
f. PARIWISATA BERDAYA : Standarisasi atraksi, amenitas dan promosi wisata			
1.1.1.6 Mendorong ekonomi kreatif subsektor kuliner berdaya saing		a. Fasilitasi perizinan dan insentif bagi pelaku ekonomi kreatif	
	b. Fasilitasi pelatihan, sertifikasi dan sarana produksi		
	c. Penyediaan ruang kreatif/Creative Hub bagi pelaku ekonomi kreatif		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
			d. Penguatan Event Ekonomi Kreatif (Promosi)
			e. Pengembangan Desa Kreatif
		1.1.1.7 Memperkuat promosi pariwisata dan kemitraan strategis.	a. Peningkatan visibilitas identitas daerah dengan mengedepankan unsur kebudayaan dan religiusitas
			b. Mendorong kerjasama pengelolaan destinasi wisata milik Pemda kepada pihak swasta
			c. Penguatan City Branding promosi pariwisata
			d. Penguatan Event Pariwisata Potensi Lokal Berkelanjutan
			e. Mendorong Pengembangan Industri Pariwisata yang Berdaya Saing
	c. Rasio PDRB Penyediaan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	1.1.1.8 Intensifikasi pertanian berbasis teknologi	a. Fasilitasi sarana dan prasarana bagi petani, peternak, dan nelayan
			b. Petani/Peternak/Nelayan Motekar: Fasilitasi pupuk bersubsidi
			c. Penggunaan teknologi tepat guna bagi petani, peternak dan nelayan
		1.1.1.9 Menjaga ketersediaan lahan pertanian	a. Pengembangan sentra produksi
			b. Melindungi lahan pertanian produktif
		1.1.1.10 Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan pertanian dan perikanan	a. Meningkatkan akses pasar untuk produk pertanian, peternakan dan perikanan
			b. Mencetak pelaku usaha (petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan) champion sebagai upaya regenerasi
			c. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan kelembagaan pertanian, peternakan dan perikanan
			d. Fasilitasi sertifikasi produk pertanian, peternakan dan perikanan
	d. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	1.1.1.11 Pengembangan kewirausahaan daerah	a. Memperkuat inkubasi bisnis dan pendampingan wirausaha.
			b. Mempermudah akses pembiayaan dan permodalan.
			c. Fasilitasi pemberian insentif bagi UMKM
			d. Fasilitasi legalitas usaha dan sertifikasi produk bagi UMKM
			e. Mendorong pengembangan wirausaha baru

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
			f. Mengembangkan koperasi berbasis pertanian dan pariwisata
			g. UMKM Motekar : Fasilitasi permodalan dan akses pasar dengan prioritas untuk CPCL yang mengikuti pelatihan produksi dan mendapatkan bantuan sarana produksi (IKM)
			h. SUBSIDI KREDIT MIKRO MITRA MUBAROKAH : Fasilitasi pembiayaan bagi UMKM
	e. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1.1.1.12 Meningkatkan peluang kerja melalui investasi dan sektor ekonomi produktif	a. Penyediaan insentif bagi perusahaan yang menyerap tenaga kerja rentan
			b. Optimalisasi program padat karya dan pemberdayaan masyarakat
			c. Meningkatkan informasi pasar kerja dan layanan bursa kerja yang efektif
		1.1.1.13 Memperkuat program vokasi dan link-and-match dunia industri.	a. Generasi Mencrang : Pengembangan pelatihan berbasis vokasi sesuai kebutuhan industri melalui Balai Latihan Kerja (BLK)
	1.1.1.14 Memberikan dukungan kepada pengembangan wirausaha mandiri sebagai salah satu sumber utama penciptaan lapangan kerja	a. Memfasilitasi sarana produksi untuk mendukung wirausaha mandiri	
		b. Memfasilitasi sarana produksi untuk mendukung wirausaha mandiri	
	1.1.2 Meningkatnya pertumbuhan investasi dan perdagangan daerah	a. Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	1.1.2.1 Meningkatkan investasi daerah melalui penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN)
b. Mengoptimalkan pemberian insentif dan kemudahan investasi			
c. Mendorong ketersediaan <i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO)			
d. Memperkuat digitalisasi layanan perizinan			
e. Memperkuat kolaborasi mendukung iklim investasi yang kondusif			
b. Pertumbuhan Nilai Ekspor (%)		1.1.2.2 Meningkatkan daya saing produk ekspor berbasis sumber daya lokal.	a. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha agar Siap Ekspor
			b. Fasilitasi sertifikasi produk ekspor sesuai standar global
			c. Fasilitasi kerja sama perdagangan dengan mitra strategis
1.1.2.3 Memperluas akses pasar internasional melalui promosi dan diplomasi dagang.	a. Pameran Dagang/Misi Dagang Internasional		
1.1.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	1.1.3.1 Peningkatan Perlindungan dan Konservasi di Kawasan Lindung dan Budidaya untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem	a. Penghijauan dan Penambahan Luasan Kawasan Ruang Terbuka Hijau
			b. Perlindungan kawasan konservasi di Perairan Umum Daratan (PUD)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan		1.1.3.2 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	c. Pembangunan Taman Interaksi Warga (Taman INovasi, TEknologi, olahRAga, Kreativitas dan Silaturahmi Warga)
			a. Penguatan Kebijakan dan Penegakan Hukum Pengendalian Pencemaran Air dan Udara
			b. Pengawasan Kepada Pelaku Usaha terhadap Rencana Pengelolaan dan Pemantauan yang Ditetapkan
			c. Pengendalian Sumber Pencemar terhadap Baku Mutu Kualitas Air dan Udara
	b. Penurunan emisi GRK menuju net zero emission (Ton CO2eq)	1.1.3.3 Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Lingkungan	a. Pengendalian emisi kendaraan bermotor dan penerapan energi ramah lingkungan
			b. Fasilitasi lahan kritis dan ekosistem melalui reforestasi dan peningkatan vegetasi, serta penerapan agroforestri untuk pemulihan sumber daya alam untuk peningkatan kualitas air, udara serta ketahanan iklim
			c. Penerapan pola kegiatan pertanian peternakan yang berkelanjutan dan rendah emisi
		1.1.3.4 Peningkatan Pengelolaan Persampahan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan	a. Penerapan aktivitas ekonomi sirkular melalui pengelolaan " <b>sampah menjadi berkah</b> " berbasis masyarakat
			b. Optimalisasi sistem pengangkutan persampahan berbasis aspek 3R ( <i>reduce, reuse</i> dan <i>recycle</i> )
			c. Peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi dan sarana-prasarana terkait dalam pengelolaan persampahan
1.2.1 Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif (sesuai dengan standar hidup yang layak)	a. Tingkat Kemiskinan (Persen)	1.2.1.1 Verifikasi dan validasi data tunggal kemiskinan Kabupaten Sukabumi	a. Melakukan verifikasi dan validasi lapangan
			1.2.1.2 Mendorong pengurangan kemiskinan daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
		b. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin berbasis data tunggal	
		c. Meminimalkan kantong-kantong kemiskinan berbasis data tunggal	
	b. Indeks Gini (Poin)	1.2.1.3 Mendorong pemerataan pembangunan wilayah	a. Membangun kawasan pertanian tematik untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat
			b. Membangun sentra ekonomi tematik sebagai basis pertumbuhan ekonomi wilayah

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
			c. Mengoptimalkan pembangunan kawasan berbasis tata ruang
1.2.2 Menurunnya tingkat kekurangan gizi	a. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ) (%)	1.2.2.1 Peningkatan Produksi dan Distribusi Pangan Lokal yang Berkelanjutan	a. Peningkatan infrastruktur ketahanan pangan, seperti pembangunan lumbung pangan desa dan optimalisasi cadangan pangan pemerintah.
			b. Penguatan diversifikasi dan fortifikasi pangan
			c. Pengembangan kebijakan pangan asal pertanian dan perikanan berbasis potensi lokal
		1.2.2.2 Penguatan Akses, Keterjangkauan dan Ketahanan Pangan bagi Kelompok Rentan	a. Peningkatan pemahaman pemberdayaan masyarakat terkait ketahanan pangan keluarga
			b. Memastikan ketersediaan gizi yang cukup dengan harga terjangkau bagi ibu hamil, bayi dan balita melalui pemberian makanan tambahan (PMT) bagi Catin, ibu hamil dan balita, serta kampanye pola makan sehat
			c. Pemberian bantuan pangan langsung untuk mendorong keseimbangan kebutuhan gizi masyarakat
2.1.1 Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang fungsi permukiman yang berkualitas dan inklusif	a. Tingkat Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (persen)	2.1.1.1 Meningkatkan pemerataan akses terhadap prasarana, sarana, dan utilitas infrastruktur pelayanan dasar Perumahan dan Permukiman	a. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana air bersih menuju akses air minum aman.
			b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana sanitasi menuju akses sanitasi aman.
		2.1.1.2 Meningkatkan akses hunian permukiman yang layak, terjangkau dan berkelanjutan	a. Pembangunan Rumah SAKINAH (Pembangunan Rumah SehAt, layaK, NYAman, Aman dan berkaH : Membangun rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah
			b. Pembangunan Rumah SAKINAH (Pembangunan Rumah SehAt, layaK, NYAman, Aman dan berkaH : Mengembangkan kawasan permukiman tanggap bencana dan relokasi akibat pembangunan
			c. Meningkatkan penataan kawasan kumuh kewenangan kabupaten untuk meningkatkan fungsi hunian yang berkualitas
			d. Pembangunan Taman Interaksi Warga (Taman INovasi, TEknologi, olahRaga, Kreativitas dan Silaturahmi Warga) : Meningkatkan kualitas PSU Permukiman mendukung hunian layak, nyaman dan berkelanjutan.
			e. Meningkatkan pelayanan publik melalui pembangunan gedung kantor Pemda dan gedung perkantoran prioritas yang laik fungsi
2.1.2 Meningkatnya		2.1.2.1 Meningkatkan kualitas jaringan jalan kabupaten	a. Meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	
infrastruktur fisik penunjang perekonomian yang berkualitas dan merata	1. Tingkat Kemantapan Jalan (Persen)		b. Program TUMANINAH (infrasTrUktur, MANTap, terINtegrasi dan terarAH) : Pembangunan Jalan dan Jembatan Strategis Penunjang Perekonomian	
	2. Rasio Konektivitas (Poin)	2.1.2.2 Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	a. Optimalisasi kinerja pelayanan lalu lintas dan angkutan umum untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan wilayah	
			b. Membangun sarana dan prasarana ASDP yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan strategis	
	3. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang (Persen)	2.1.2.3 Peningkatan pengelolaan ruang sesuai potensi dan daya dukung-daya tampung secara berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan wilayah	a. Penguatan pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berkeadilan berbasis potensi serta daya dukung daya tampung lingkungan	
4. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi (Persen)	2.1.3.1 Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	a. Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan irigasi kabupaten		
3.1.1 Meningkatnya integrasi layanan kesehatan secara merata	a. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun) b. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	3.1.1.1 Meningkatkan sumber daya kesehatan	a. Program SUKABUMI SAKTI (Program Sukabumi SehAt, KuaT, dan Inspiratif) : Pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat miskin	
			b. Program SUKABUMI SAKTI (Program Sukabumi SehAt, KuaT, dan Inspiratif) : Dokter Bina Desa	
			c. Pengembangan dan implementasi sistem informasi kesehatan terintegrasi	
			d. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	
			e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan	
			f. Meningkatkan promosi dan sosialisasi kesehatan masyarakat terutama dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit	
			g. Meningkatkan kualitas hidup ibu hamil, menyusui dan Balita	
			h. Mengembangkan fasilitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan	
			3.1.1.2 Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan	a. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun keluarga sejahtera
				b. Program SUKABUMI SAKTI (Program Sukabumi SehAt, KuaT, dan Inspiratif): Peningkatan pola hidup bersih dan sejahtera
c. Program SUKABUMI SAKTI (Program Sukabumi SehAt, KuaT, dan Inspiratif) : Peningkatan pengetahuan warga tentang gizi seimbang				
d. Penguatan peran aktif lembaga kesehatan dalam peningkatan kualitas kesehatan				

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
3.1.2 Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	a. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	3.1.2.1 Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata.	a. GENERASI MENCERANG (Generasi Mandiri, CeRdas dan gemilANG) : pengembangan kurikulum yang relevan dan kontekstual melalui adaptasi kurikulum nasional agar lebih relevan dengan konteks lokal dengan memasukan muatan lokal yang memperkaya pengetahuan siswa tentang budaya, sejarah dan potensi daerah (pariwisata dan pertanian)
			b. Meningkatkan akreditasi kelembagaan pendidikan.
			c. penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan pengembangan kurikulum
			d. pembangunan dan rehabilitasi sekolah serta penyediaan fasilitas pendukung termasuk fasilitas yang ramah disabilitas
			e. mengimplementasi program pendidikan inklusif yang efektif, untuk memastikan semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah reguler
			f. Penguatan manajemen sekolah
			g. Penguatan kurikulum dan metode pembelajaran
			h. GENERASI MENCERANG (Generasi Mandiri, CeRdas dan gemilANG) : Beasiswa Generasi Mencrang (untuk hafidz Al Quran, anak petani dan buruh migran)
3.2.1 Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	a. Indeks Literasi Daerah	3.2.1.1 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan berbasis budaya melalui penyesuaian kurikulum dan pemanfaatan teknologi	a. Mengembangkan model-model pembelajaran literasi yang inovatif dan kontekstual serta responsif terhadap kebutuhan literasi (membaca, menulis, berhitung, literasi digital, literasi finansial, literasi sains dll)
			b. Mengintegrasikan program literasi ke dalam kegiatan ekstrakurikuler dan program sekolah lainnya
			c. Mengembangkan platform literasi digital yang mudah diakses dan interaktif
		3.2.1.2 Memperkuat ekosistem literasi daerah melalui pembangunan dan revitalisasi perpustakaan berbasis digital serta adanya program literasi berbasis komunitas	a. Mengadakan lomba-lomba literasi, bedah buku dan kegiatan kreatif lainnya untuk menumbuhkan minat baca dan menulis
			b. Memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur literasi, termasuk perpustakaan, Taman bacaan masyarakat (TBM), pojok baca dan akses internet dengan fasilitas yang memadai dan koleksi yang menarik
			c. Memanfaatkan potensi wisata dan budaya lokal sebagai tema dalam pengembangan bahan bacaan dan kegiatan literasi
d. Pemberdayaan komunitas dan lembaga literasi			

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
	b. Persentase Pemajuan Kebudayaan	3.2.1.3 Mengidentifikasi dan mengembangkan program-program unggulan yang fokus pada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan aspek-aspek kebudayaan yang spesifik dan memiliki potensi besar	<p>a. Penguatan tata kelola dan kelembagaan pemajuan kebudayaan</p> <p>b. Revitalisasi kampung adat dan warisan tradisional</p> <p>c. Melaksanakan festival seni dan budaya tahunan yang menampilkan kekayaan seni pertunjukan, musik dan kerajinan lokal</p> <p>d. Mengembangkan platform digital untuk promosi kebudayaan daerah (website, media sosial, konten kreatif berbasis budaya lokal)</p> <p>e. Pengembangan CPUGG sebagai warisan geologi dan keanekaragaman budaya yang unik</p> <p>f. Fasilitasi sarana prasarana kebudayaan berbasis masyarakat untuk menguatkan kesadaran budaya</p>
3.2.2 Meningkatnya ketahanan keluarga, perlindungan anak, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender	a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	3.2.2.1 Memperkuat perlindungan anak dan ketahanan keluarga	a. PROGRAM PERMATA SUCI (Program PERempuan MANDiri dan TANGguh untuk SUKabumi Cemerlang dan Inovatif)
			b. Pembangunan layanan perlindungan anak dan keluarga
			c. Sosialisasi perlindungan anak dan konseling keluarga
		3.2.2.2 Mengembangkan kebijakan berbasis gender yang inklusif	a. Kolaborasi multi-pihak untuk meningkatkan kesetaraan gender
			b. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan berbasis gender
			c. Meningkatkan kesetaraan gender dalam ekonomi dan politik
	b. Prevalensi Stunting Pada Balita	3.2.2.3 Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	a. Penguatan tata kelola kelembagaan gender
			e. Peningkatan Ketahanan Keluarga
			a. Penyadaran, pembinaan dan pengembangan kepemudaan dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat
		b. Pemberdayaan pemuda melalui ekonomi kreatif dan teknologi	
		c. Pembinaan Atlet Daerah	
		d. Pemuda Berkarya Sukabumi Berdaya <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas/keterampilan ketenagakerjaan/kewirausahaan</li> <li>- Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan</li> </ul>	
3.2.2.4 Intervensi Terpadu Lintas Sektor Melalui Pemanfaatan Data Keluarga Berisiko Stunting	a. Intervensi Sensitif dan Spesifik pada Keluarga Berisiko Stunting		
	b. Peningkatan Pengetahuan Warga Tentang Gizi Seimbang		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi	
			c. Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	
4.1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif	a. Indeks Reformasi Birokrasi	4.1.1.1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Negara	a. Penyusunan dan Penerapan Standar Kompetensi Aparatur Negara b. Penerapan Sistem Merit dalam Karir Aparatur Negara	
		4.1.1.2 Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi anggaran daerah	a. Membangun Budaya Birokrasi yang Berintegritas b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah	
			4.1.1.3 Meningkatkan kapasitas fiskal daerah	a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) b. Meningkatkan proporsi PAD terhadap APBD Kabupaten Sukabumi
		4.1.1.4 Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Prosedur Birokrasi		a. Penguatan kebijakan digitalisasi pelayanan publik, penerapan e-government untuk mempercepat proses administrasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas b. Program Usaha Memakmurkan Masjid
			4.1.1.5 Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal	a. Implementasi teknologi digital dalam perencanaan, pengendalian dan pengawasan birokrasi untuk mendeteksi dan mencegah korupsi b. Optimalisasi pengendalian perencanaan pembangunan berbasis sistem c. Peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa
		b. Indeks Pelayanan Publik		4.1.1.6 Inovasi dalam Pelayanan Publik
	4.1.1.7 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) daerah			a. Fasilitasi pemenuhan SPM pendidikan b. Fasilitasi pemenuhan SPM kesehatan c. Fasilitasi pemenuhan SPM pekerjaan umum dan penataan ruang d. Fasilitasi pemenuhan SPM perumahan rakyat dan kawasan permukiman e. Fasilitasi Pemenuhan SPM Sosial f. Fasilitasi pemenuhan SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemulihan pasca bencana
		4.1.1.8 Penyiapan Daerah Otonomi Baru	a. Fasilitasi Daerah Otonomi Kabupaten/Kota Baru	

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
		4.1.1.9 Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada unsur kewilayahan	a. Optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan inovasi di tingkat kecamatan dan kelurahan
4.2.1 Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembangunan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan melalui perkembangan teknologi dan komunikasi	a. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Pilar Institusi (Poin)	4.2.1.1 Meningkatkan akses infrastruktur digital di seluruh daerah dengan membangun jaringan internet di daerah terpencil dan penguatan infrastruktur telekomunikasi	a. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial PROGRAM TRENDI (Program pesanTREN melek Digital)
		4.2.1.2 Optimalisasi layanan publik berbasis digital dengan memanfaatkan big data untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan dan layanan masyarakat	a. Peningkatan infrastruktur digital untuk pemerataan akses dan konektivitas daerah  b. Pengembangan kebijakan yang mendukung transformasi digital dalam layanan publik

Sumber : Hasil analisis Tim Penyusun RPJMD, 2025 -2029

## **4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025**

### **4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah : **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Terdapat 8 (Delapan) prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025 yang meliputi :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) (PN1).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN2).
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi(PN3).
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas (PN4)
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (PN5).
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan(P6).
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan(PN7).
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur(PN8).

### **4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025**

Pada dokumen Rancangan Awal RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029 Program Prioritas Daerah didasarkan pada agenda pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun pada periode RPJMD 2025-2029. Program prioritas daerah ditetapkan dengan mengacu

pada hasil penjabaran strategi sebagai langkah nyata untuk mengimplementasikan kebijakan (*visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan*) pada RPJMD 2025-2029. Provinsi Jawa Barat menetapkan 25 (dua puluh lima) program prioritas daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul
  - a. Program Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan dan Layanan Pengobatan Tradisional;
  - b. Program Penanganan Stunting dan Peningkatan Gizi dan Nutrisi bagi Anak, Balita, serta Ibu Hamil dan Menyusui;
  - c. Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama;
  - d. Program Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Program Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta Pemberian Beasiswa bagi Siswa Berprestasi;
  - f. Program Peningkatan Inovasi.
2. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif
  - a. Program Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
  - b. Program Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD;
  - c. Program Penguatan Integrasi Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.
  - d. Program Peningkatan dan pemerataan investasi;
  - e. Program Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan;
  - f. Program Pengembangan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
  - g. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah;
  - h. Meningkatnya digitalisasi pada sektor-sektor ekonomi strategis;
  - i. Program Penciptaan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Dalam dan Luar Negeri;
  - j. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Kewirausahaan Daerah, Ekonomi Kreatif, dan Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan;
  - k. Program Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja;
  - l. Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan.
3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin Dan Kaya

- a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan serta peningkatan kualitas infrastuktur wilayah;
  - b. Program Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan;
  - c. Program Peningkatan Ketahanan Air dan Energi;
  - d. Program Pengurangan Risiko Bencana;
  - e. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Perubahan Iklim;
  - f. Program Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengarusutamaan Gender, Pembangunan Pemuda dan Perlindungan Kelompok Rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas)
4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip *Good And Clean Governance*
- a. Program Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah;
  - b. Program Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan;
  - c. Program Transformasi Birokrasi berbasis digital dan Penguatan Good Governance, serta Kerjasama Daerah dan Internasional

#### **4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2025**

Program prioritas tahun 2025 untuk penunjang sasaran strategis daerah merupakan program unggulan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja utama (IKU) daerah. Program prioritas tersebut menjadi fokus utama dalam pencapaian sasaran strategis, tujuan daerah, visi daerah. Keterkaitan antara prioritas pembangunan dengan, sasaran strategis, tujuan daerah, misi daerah dan visi daerah tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan dukungan program pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM dapat dilihat pada tabel 4.4.

**Tabel 4.3. Rumusan Sasaran Strategis dan Program Prioritas Kabupaten Sukabumi Tahun 2025.**

Tujuan	Sasaran Strategis	Outcome	Indikator Sasaran Strategis	Program Prioritas
<b>Visi</b>	<b>Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Maju, Unggul, Berbudaya dan Berkah (Mubarakah)</b>			
<b>Misi 1</b>	<b>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan Melalui Pengembangan Agroindustri dan Pariwisata</b>			
1.1 Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkah melalui pengembangan agroindustri dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan	1.1.1 Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	1.1.1.a Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan, akomodasi makan minum dan pertanian untuk mendorong perekonomian daerah	a. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) b. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) c. Rasio PDRB Penyediaan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Pemberdayaan UMKM Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Pemasaran Pariwisata Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Perikanan Budidaya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pertanian
		1.1.1.b Meningkatnya kewirausahaan daerah untuk mendukung produktivitas perekonomian daerah	d. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Program Pengembangan UMKM Program Pemberdayaan UMKM Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		1.1.1.c Menurunnya angka pengangguran daerah	e. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Hubungan Industrial Penempatan Tenaga Kerja Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Perencanaan Tenaga Kerja
	1.1.2 Meningkatnya pertumbuhan investasi dan perdagangan daerah	1.1.2.a Mendorong upaya pengembangan investasi daerah yang berorientasi pada ekspor	a. Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) b. Pertumbuhan Nilai Ekspor (%)	Promosi Penanaman Modal Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Outcome</b>	<b>Indikator Sasaran Strategis</b>	<b>Program Prioritas</b>
		berbasis bahan baku lokal		Program Pengembangan Ekspor
	1.1.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	1.1.3.a Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		1.1.3.b Meningkatnya kegiatan pembangunan rendah karbon (per sektor sesuai kewenangan kabupaten) berorientasi pada penurunan emisi GRK	b. Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Program Penyelenggaraan LLAJ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Program Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1.2 Terwujudnya pembangunan daerah yang penuh keberkahan untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan melalui pemberdayaan masyarakat, pemerataan akses terhadap sumber daya, serta penguatan nilai-nilai spiritual dan sosial yang mendukung kesejahteraan berkelanjutan	1.2.1 Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif (sesuai dengan standar hidup yang layak)	Terjadinya peningkatan kualitas hidup sesuai dengan standar hidup layak melalui Pemerataan Akses Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial	a. Persentase Pencapaian Tingkat Kemiskinan (Persen)	Perlindungan dan jaminan sosial Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil Pengelolaan Profil Kependudukan Perencanaan Tenaga Kerja Penempatan Tenaga Kerja Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Perikanan Budidaya Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Perizinan usaha pertanian Pemberdayaan Sosial Rehabilitasi Sosial Pengelolaan Pendidikan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Hubungan Industrial Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pengelolaan Sumber Daya Air Pengelolaan dan Pengembangan

Tujuan	Sasaran Strategis	Outcome	Indikator Sasaran Strategis	Program Prioritas
				Sistem Penyediaan Air Minum Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Penyelenggaraan Jalan Pengembangan Perumahan Kawasan permukiman Penanganan Kerawanan Pangan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Perencanaan Kawasan Transmigrasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi
		b. Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat yang Ditandai dengan Pemerataan Akses Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan	b. Indeks Gini (Poin)	Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Pengembangan UMKM Program perencanaan dan Pembangunan Industri Penyelenggaraan Penataan Ruang
	1.2.2 Menurunnya tingkat kekurangan gizi	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	a. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	Perlindungan dan jaminan sosial
<b>Misi 2</b>	<b>Membangun Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Penunjang Perekonomian yang Merata dan Inklusif</b>			
2.1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung perekonomian yang merata dan inklusif, guna menciptakan daerah yang berkeadilan, sejahtera, dan penuh berkah	2.1.1 Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang fungsi permukiman yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan	a. Tingkat Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (persen)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Program Penatagunaan Tanah
	2.1.2 Meningkatkan infrastruktur fisik penunjang perekonomian yang berkualitas dan merata	Meningkatnya konektivitas dan kualitas jaringan jalan yang menunjang perekonomian	a. Tingkat Kemantapan Jalan b. Rasio Konektivitas	Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Program Pengelolaan Pelayanan
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	d. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan	e. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Tujuan	Sasaran Strategis	Outcome	Indikator Sasaran Strategis	Program Prioritas
		jaringan irigasi kewenangan Kabupaten		
<b>Misi 3</b>	<b>Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya, Berbasis Iptek dan Imtaq</b>			
3.1 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah dan berkelanjutan melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia yang unggul berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek)	3.1.1 Meningkatnya integrasi layanan kesehatan secara merata	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	a. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun) b. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Akreditasi Pelayanan Kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	3.1.2 Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan yang Berkeadilan untuk Memperpanjang Masa Belajar dan Meningkatkan Kompetensi Generasi Muda	a. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Pengembangan Kurikulum Pendidik dan Tenaga Pendidikan Pengelolaan Pendidikan
3.2 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah dan harmonis melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia yang berbudaya dan berakhlak mulia berbasis iman dan takwa (Imtaq)	3.2.1 Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Memahami Budaya melalui literasi	a. Indeks Literasi Daerah	Pengembangan bahasa dan Sastra Pembinaan perpustakaan
		Menguatnya Identitas dan Ketahanan Budaya Lokal	b. Persentase Pemajuan Kebudayaan	Pengembangan kebudayaan Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Pengembangan kesenian tradisional Pengembangan kebudayaan Pengembangan kebudayaan
	3.2.2 Meningkatnya ketahanan keluarga, perlindungan anak, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender	Peningkatan kesetaraan gender dan peran aktif pemuda di berbagai aspek kehidupan	a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Peningkatan Kualitas Keluarga Perlindungan Khusus Anak Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
<b>Misi 4</b>	<b>Membangun Pemerintahan yang Kolaboratif, Profesional dan Akuntabel</b>			

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Outcome</b>	<b>Indikator Sasaran Strategis</b>	<b>Program Prioritas</b>
4.1 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel	4.1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien, Akuntabel, dan Berorientasi Hasil	a. Persentase pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi	Pengembangan sumber daya manusia Kepegawaian Daerah Penyelenggaraan Pengawasan Pengelolaan keuangan daerah Pengelolaan Barang Milik daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Perekonomian dan Pembangunan Pengelolaan arsip Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Administrasi Pemerintah Desa Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik dan pemerintahan	Indeks Pelayanan Publik	Penelitian dan Pengembangan Daerah Riset dan Inovasi Daerah Pengelolaan Pendidikan Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program pengembangan perumahan Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penanggulangan Bencana Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Pemerintahan dan Otonomi Daerah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4.2 Terwujudnya pembangunan daerah yang berkah dengan mendorong peningkatan daya saing daerah yang berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi lokal dan inovasi strategis	4.2.1 Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembangunan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan melalui perkembangan teknologi dan komunikasi	Menguatnya Kapasitas Pemerintah dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang adaptif	a. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Pilar Institusi (Poin)	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pengelolaan aplikasi informatika

**Tabel.4.4. Dukungan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Terhadap Pelaksanaan SPM**

No	Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Target Tahun 2025	Program perangkat daerah	Kegiatan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pengampu
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	100,00	Program pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) (%)	100,00	Program pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	100,00	Program pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100,00	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemadam Kebakaran
5	Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada (%)	100,00	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamongpraja
6	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00	Program penanggulangan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
7	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00	Program penanggulangan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD
8	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	Program penanggulangan bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD
9	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100,00	Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
10	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100,00	Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
11	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh	100,00	Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,	Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Target Tahun 2025	Program perangkat daerah	Kegiatan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pengampu
	terlantar diluar panti	rehabilitasi sosial dasar diluar panti			Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
12	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial dasar diluar panti	100,00	Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
13	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100,00	Program penanganan bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
14	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari – hari	97,02	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	95,95	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100,00	Program pengembangan perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
17	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kab/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100,00	Program pengembangan perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
19	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
20	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Target Tahun 2025	Program perangkat daerah	Kegiatan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pengampu
				upaya kesehatan masyarakat	Daerah Kabupaten/Kota	
21	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
22	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
23	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
24	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
25	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
26	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga Negara penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
27	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
28	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
29	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah warga Negara dengan terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	100,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

#### **4.2.4. Proyek Prioritas Kabupaten Sukabumi Tahun 2025.**

Proyek prioritas Kabupaten Sukabumi merupakan fokus pembangunan daerah yang berasal dari janji- janji politik Kepala Daerah terpilih dalam upaya mewujudkan visi-misi yang sudah ditetapkan. Terdapat 11 (sebelas) proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada Rancangan RPJMD 2025-2029. Deskripsi proyek prioritas dimaksud adalah sebagai berikut:

##### **1. Generasi Mencrang (Mandiri, Cerdas, dan Gemilang)**

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi yang unggul dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, *Generasi Mencrang* (Mandiri, Cerdas, dan Gemilang) ditetapkan sebagai salah satu Proyek Prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2025-2029. Program ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan sebuah inisiatif strategis yang digagas sebagai realisasi janji politik bupati dan wakil bupati terpilih untuk mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan budaya di tengah-tengah masyarakat. Dengan menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai landasan, *Generasi Mencrang* diharapkan mampu menjadi katalis perubahan sekaligus pintu gerbang kesejahteraan masyarakat Sukabumi yang lebih luas dan merata.

Program utama yang diusung dalam *Generasi Mencrang* mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok-kelompok masyarakat rentan serta upaya mempersiapkan generasi muda yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan, khususnya pada sektor-sektor unggulan daerah. Salah satu pilar utamanya adalah pemberian *Beasiswa Generasi Mencrang*, yang secara khusus menysasar para hafidz al-qur'an serta siswa yang rawan putus sekolah (DO). Program beasiswa ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pendidikan sanggup menjawab tantangan rendahnya capaian pendidikan di kalangan tertentu, namun juga sebagai penghargaan kepada siswa berprestasi di bidang keagamaan. Dengan adanya ruang yang lebih besar bagi para penghafal Al-Qur'an dan anak-anak yang berisiko putus sekolah, diharapkan tidak ada lagi anak usia sekolah di Sukabumi yang tersisih akibat keterbatasan ekonomi maupun sosial.

Tidak hanya berhenti pada pemberian beasiswa, akselerasi kualitas SDM juga dilakukan melalui pengembangan sekolah berbasis vokasi. Kebijakan ini menjadi solusi strategis atas ketimpangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja yang selama ini menjadi tantangan besar, khususnya di Sukabumi yang memiliki potensi besar pada sektor pertanian dan pariwisata. Melalui penguatan sekolah vokasi, para generasi muda didorong untuk mengembangkan keterampilan praktis, pengetahuan teknis, dan mental kewirausahaan yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata dan pertanian lokal. Langkah ini diyakini akan memperkuat daya

saing lulusan sekolah di pasar kerja sekaligus menekan angka pengangguran terdidik di daerah.

Selaras dengan penguatan vokasi, pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis pertanian dan pariwisata merupakan strategi penting lain dalam program ini. Kurikulum ini dirancang agar siswa mengenal, memahami, dan mencintai kekayaan alam, budaya, serta kearifan lokal Sukabumi. Materi pembelajaran yang kontekstual diharapkan dapat menumbuhkan semangat inovasi dan kepedulian terhadap pembangunan daerah sejak dini, sekaligus mendorong lahirnya generasi pelaku usaha baru di bidang pertanian dan pariwisata milik Sukabumi sendiri.

Komitmen pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan juga diwujudkan melalui pemberian beasiswa pendidikan sarjana bagi anak-anak keluarga petani dan buruh migran. Langkah ini merupakan bentuk keberpihakan nyata terhadap kelompok masyarakat yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan daerah namun masih menghadapi beragam keterbatasan, khususnya dalam mengakses pendidikan tinggi. Melalui dukungan dana pendidikan, anak-anak keluarga marginal diharapkan dapat mewujudkan cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya, serta menjembatani kesenjangan sosial yang selama ini masih terasa.

Seluruh poin utama *Generasi Mencrang* menjadi manifestasi dari keseriusan bupati dan wakil bupati terpilih dalam memenuhi janji politik mereka. Program ini akan didorong dalam kerangka kolaboratif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha hingga perguruan tinggi. Melalui keberpihakan dan inovasi, *Generasi Mencrang* diharapkan menjadi lokomotif perubahan, membangun generasi Sukabumi yang mandiri, cerdas, dan gemilang demi terwujudnya masa depan yang lebih baik untuk semua.

### **1.1 Beasiswa pendidikan bagi siswa Hafidz Al-Quran**

Konsep kunci dalam program Generasi Mencrang meliputi upaya strategis pemerintah Kabupaten Sukabumi membuka akses pendidikan yang lebih inklusif, khususnya bagi siswa hafidz Al-Quran dan siswa yang rentan putus sekolah. Program beasiswa pendidikan untuk siswa hafidz Al-Quran diluncurkan sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya pembentukan sumber daya manusia yang religius dan berkarakter sejak usia dini. Sasaran utama program ini adalah siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik yang memiliki kemampuan menghafal Al-Quran (disertai bukti sertifikat dan prestasi), maupun mereka yang terancam putus sekolah akibat kendala ekonomi.

Beasiswa ini tidak hanya bersifat penghargaan, namun juga sebagai strategi menekan angka putus sekolah. Dukungan program ini selaras dengan misi besar pemerintah daerah, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, serta berbasis ilmu pengetahuan dan keimanan-ketaqwaan. Nilai-nilai

tersebut menjadi pondasi dalam menciptakan pendidikan berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi.

Pelaksanaan program beasiswa melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, melalui mekanisme seleksi yang ketat bekerja sama dengan lembaga terkait di bidang hafidz Al-Quran. Selain memastikan penerima tepat sasaran, proses evaluasi juga rutin dilakukan untuk mempertimbangkan kelanjutan pemberian beasiswa berdasarkan perkembangan kemampuan hafalan Al-Quran. Sumber anggaran berasal dari APBD, dengan perencanaan target sebanyak 200 siswa SD dan 300 siswa SMP. Dengan konsep demikian, program ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga pembentukan karakter religius dan penguatan generasi masa depan Sukabumi yang mandiri, cerdas, dan gemilang.

## **1.2 Pengembangan Sekolah Berbasis Vokasi Sesuai Kebutuhan Industri**

Konsep kunci dari program *Pengembangan Sekolah Berbasis Vokasi* tersebut berfokus pada peran strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, terutama di sektor pertanian dan pariwisata. Program ini bertujuan memfasilitasi pengembangan dan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis sektor unggulan daerah, serta memberikan beasiswa vokasi bagi lulusan SMA/ sederajat agar dapat mengakses pendidikan kejuruan yang lebih relevan dengan dunia kerja. Hal ini selaras dengan misi membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan keimanan.

Target program meliputi pendirian dua SMK kejuruan baru di bidang pariwisata dan pertanian serta pemberian beasiswa kepada siswa vokasi, agar terjadi pemerataan pendidikan berkualitas dan penyiapan angkatan kerja yang berdaya saing. Program ini dianggarkan sebesar dua miliar rupiah per tahun yang bersumber dari APBD, dengan penanggung jawab utama adalah Dinas Pendidikan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Pelaksanaan program dilakukan secara kolaboratif. Dinas Pendidikan bertugas membangun jejaring dengan UPTD Provinsi Jawa Barat untuk pendirian SMK, termasuk memastikan masuknya usulan pembangunan ke dokumen perencanaan provinsi dan pengadaan lahan. Sementara untuk beasiswa vokasi, Bagian Kesra memfasilitasi kerja sama dengan lembaga vokasi dalam dan luar negeri, menyeleksi dan menyalurkan hibah pendidikan, sekaligus melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan distribusi dana hibah. Dengan konsep ini, pengembangan sekolah berbasis vokasi diharapkan mendorong terciptanya generasi muda Sukabumi yang

siap masuk dunia kerja sesuai kebutuhan daerah dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

### **1.3 Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis Pertanian dan Pariwisata**

Konsep kunci dari program Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Pertanian dan Pariwisata berfokus pada adaptasi kurikulum nasional agar lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta potensi daerah Kabupaten Sukabumi. Melalui integrasi muatan lokal ke dalam pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler, program ini bertujuan memperkaya wawasan siswa tentang budaya, sejarah, serta kekuatan sektor unggulan daerah seperti pertanian dan pariwisata. Salah satu inovasi utama adalah penerapan kurikulum KASEPUHAN yang mencakup konsep kehidupan alam, agama, seni, etika, peradaban, nilai universal, dan harmoni alam Nusantara. Kurikulum ini dirancang sebagai model yang akan diterapkan di setiap kecamatan, terutama pada jenjang SD dan SMP yang berada di kawasan strategis.

Pelaksanaan program dilakukan melalui beberapa tahapan kunci, mulai dari identifikasi potensi lokal di bidang pertanian dan pariwisata, survei kebutuhan siswa, hingga konsultasi dengan para ahli serta pelaku industri terkait. Materi muatan lokal diintegrasikan dalam beberapa mata pelajaran seperti IPA, IPS, PKn maupun mata pelajaran muatan lokal lainnya, dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman dan kepedulian siswa terhadap potensi daerah. Pembelajaran dirancang dalam bentuk proyek, kunjungan lapangan, praktik langsung, serta modul berbasis pengalaman dan teknologi interaktif. Tidak hanya itu, program ini juga memberi pelatihan kepada guru, mengundang narasumber dari sektor terkait, dan mendorong kolaborasi dengan pelaku industri agar proses pembelajaran menjadi lebih aplikatif dan menarik.

Penanggung jawab utama program ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, dengan dukungan anggaran dari APBD. Seluruh proses dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas integrasi dan relevansi materi, serta mengembangkan keberlanjutan program berdasarkan hasil umpan balik. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemuda Sukabumi tumbuh menjadi generasi yang paham, cinta, dan mampu memajukan potensi daerahnya.

### **1.4 Beasiswa Pendidikan Sarjana untuk Keluarga Petani dan Buruh Migran**

Konsep kunci dari program Beasiswa Pendidikan Sarjana untuk Keluarga Petani dan Buruh Migran adalah pemberian bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa asal Kabupaten Sukabumi, terutama yang berprestasi dan berasal dari keluarga petani dan buruh migran. Bantuan ini tujuannya tidak hanya agar mereka dapat menempuh pendidikan strata satu di universitas dalam negeri, tapi juga untuk

memenuhi kebutuhan sumber daya manusia berkualitas di Kabupaten Sukabumi. Program ini diharapkan dapat mendorong para penerima beasiswa untuk kembali dan mengabdikan di daerahnya setelah menyelesaikan studi, sebagai upaya menciptakan SDM unggul, berbudaya, dan berbasis iptek serta imtaq sesuai misi pembangunan daerah.

Selain aspek bantuan pembiayaan, konsep kunci lain terletak pada upaya mendukung terwujudnya pendidikan berkualitas dan merata bagi kelompok masyarakat yang umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap perguruan tinggi. Dengan sasaran strategis anak-anak petani dan buruh migran yang punya prestasi, program ini berupaya mempersempit kesenjangan sosial serta meningkatkan mobilitas sosial dalam masyarakat. Targetnya adalah pendistribusian beasiswa kepada lebih dari seribu mahasiswa setiap tahun dengan anggaran dari APBD yang dikelola secara hibah atau swakelola melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Pelaksanaan program diawali dengan sosialisasi dan fasilitasi, seleksi calon penerima oleh Dinas Pendidikan, hingga penyaluran hibah ke universitas tujuan. Pengelolaan dan pengawasan dilakukan secara kolaboratif antara Dinas Pendidikan, Bagian Kesra, dan bagian tata pemerintahan, termasuk pembentukan tim pendamping yang bertanggung jawab atas monitoring serta evaluasi. Dengan konsep ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berupaya memastikan tidak ada potensi daerah yang terabaikan dan seluruh anak daerah mendapat peluang maju setara menuju generasi Sukabumi yang mandiri, cerdas, dan gemilang.

## **2. Program Sukabumi Sakti (Sukabumi sehat, kuat, dan inspiratif)**

Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sehat lahir dan batin, Pemerintah Kabupaten Sukabumi merumuskan Program Prioritas Sukabumi Sakti (Sukabumi Sehat, Kuat, dan Inspiratif) untuk tahun 2025–2029. Program ini merupakan gambaran nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkeadilan, penguatan layanan berbasis desa, serta edukasi dan pembiasaan pola hidup sehat. Sukabumi Sakti lahir sebagai respons atas tantangan kesehatan yang masih membayang-bayangi masyarakat Sukabumi, mulai dari kesenjangan akses terhadap layanan medis, rendahnya kesadaran pola hidup bersih dan sehat, sampai permasalahan gizi yang masih menghantui kelompok rentan, terutama masyarakat miskin di wilayah rural maupun urban.

Salah satu pilar utama dari Sukabumi Sakti adalah Pelayanan Kesehatan Gratis untuk Masyarakat Miskin. Pemerintah daerah menegaskan keberpihakannya pada kelompok termarginalkan dengan memastikan masyarakat miskin dapat mengakses fasilitas kesehatan tanpa beban biaya. Program ini dirancang agar seluruh warga yang

memenuhi kriteria kurang mampu, baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan terpencil, dapat layak mendapatkan perawatan medis, layanan rawat jalan, hingga obat-obatan esensial yang mereka butuhkan. Inovasi pembiayaan dan kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi strategi untuk menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. Diharapkan, tidak ada lagi warga Sukabumi yang menunda atau bahkan mengabaikan kebutuhan medisnya hanya karena hambatan ekonomi.

Selanjutnya, pemerintah memperkuat layanan dasar kesehatan melalui inovasi Dokter Bina Desa. Inisiatif ini merupakan langkah strategis guna mendekatkan layanan medis kepada masyarakat, khususnya di desa-desa yang selama ini minim akses terhadap dokter atau tenaga kesehatan profesional. Setiap desa yang masuk program akan didampingi dokter dan tim kesehatan yang secara rutin melakukan kunjungan, pemeriksaan kesehatan, edukasi penyakit, serta pendampingan penanganan kasus berat. Tidak hanya bersifat kuratif, peran Dokter Bina Desa juga mencakup pemberdayaan masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah penyakit sejak dini. Program ini diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat desa terhadap fasilitas medis lokal, serta menurunkan angka penyakit yang tidak tertangani akibat keterbatasan akses layanan.

Sejalan dengan penguatan sisi layanan, Sukabumi Sakti menegaskan pentingnya Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat di keluarga dan lingkungan masyarakat. Pemerintah mendorong perubahan perilaku melalui berbagai bentuk intervensi, baik edukasi langsung, kampanye publik, maupun pelibatan tokoh masyarakat dan lembaga lokal. Kegiatan seperti sosialisasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), gerakan cuci tangan, penyediaan fasilitas sanitasi, hingga pemantauan kebersihan lingkungan dilakukan secara berkesinambungan. Intervensi ini menarget perilaku sederhana namun berdampak besar dalam mencegah penularan penyakit menular ataupun penyakit tidak menular akibat lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran dan praktik hidup bersih, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat menumbuhkan perilaku preventif sejak dini sebagai modal penting menuju Sukabumi yang sehat dan tangguh.

Tak kalah penting, Sukabumi Sakti menempatkan Peningkatan Pengetahuan Warga tentang Gizi Seimbang sebagai program yang diperkuat. Pemerintah daerah mengedepankan edukasi dan layanan konseling gizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan remaja. Melalui penyuluhan, distribusi informasi, serta pendampingan di posyandu dan puskesmas, masyarakat diberdayakan untuk memahami pentingnya asupan gizi seimbang dalam tumbuh kembang anak, peningkatan produktivitas, serta pemeliharaan kesehatan sepanjang hayat. Program ini tidak hanya berupa teori, tetapi juga mengajak masyarakat mempraktikkan pola makan dan menu sehat sesuai potensi pangan lokal. Harapannya, status gizi

masyarakat Sukabumi dapat meningkat signifikan, sekaligus menurunkan angka stunting, anemia remaja, dan masalah gizi lain secara berkelanjutan.

Dengan integrasi keempat pilar utama tersebut, Sukabumi Sakti hadir sebagai bukti nyata bahwa pembangunan berbasis kesehatan adalah fondasi utama dalam mencetak generasi yang sehat, kuat, dan inspiratif. Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk memastikan tidak ada satupun warga yang tertinggal dalam mendapatkan hak atas kesehatan, sembari membangun kultur masyarakat yang peduli akan kebersihan, kesehatan, dan keseimbangan gizi untuk masa depan yang lebih gemilang.

### **2.1. Pelayanan Kesehatan Gratis untuk Masyarakat Miskin**

Konsep kunci dari program Pelayanan Kesehatan Gratis untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Sukabumi adalah pemberian akses layanan kesehatan yang mudah, merata, dan tanpa biaya bagi warga tidak mampu. Program ini secara khusus menyoal masyarakat miskin atau rentan miskin yang sering tidak dapat mengakses layanan kesehatan karena kendala finansial. Salah satu strategi utama dalam program ini adalah memastikan ketersediaan anggaran dari APBD untuk menanggung biaya pelayanan kesehatan dasar di fasilitas milik pemerintah, termasuk puskesmas dan rumah sakit daerah. Dengan pelaksana utama Dinas Kesehatan dan menggandeng Dinas Sosial, pemerintah daerah melakukan proses verifikasi penerima manfaat supaya program tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih dengan skema jaminan kesehatan nasional.

Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan laboratorium sederhana, pengobatan, serta pemberian obat-obatan esensial. Selain itu, program ini juga mendorong kemudahan administrasi melalui sistem rujukan terpadu dan integrasi data penerima program kesehatan nasional agar masyarakat miskin di luar peserta BPJS tetap terlayani dengan baik. Pengelolaan program dilakukan secara terintegrasi antara fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit, disertai prosedur penjaminan klaim yang sederhana namun akuntabel.

Dengan pendekatan ini, program ini tidak sekadar bertujuan meningkatkan angka cakupan layanan medis bagi masyarakat miskin, tetapi juga berupaya menciptakan keadilan sosial serta menurunkan beban biaya kesehatan rumah tangga. Harapannya, ke depan tidak ada lagi warga Sukabumi yang menunda atau bahkan mengabaikan pengobatan karena keterbatasan ekonomi, sehingga tercipta masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Program ini menjadi pijakan utama bagi terwujudnya misi Sukabumi yang sehat, kuat, dan inspiratif.

## **2.2 Dokter Bina Desa**

Konsep kunci dari program Dokter Bina Desa adalah menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat, merata, dan proaktif bagi masyarakat desa di Kabupaten Sukabumi, khususnya yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap tenaga medis profesional. Program ini menempatkan dokter sebagai pendamping tetap di desa-desa prioritas, dimana mereka tidak hanya berperan sebagai pemberi layanan kuratif, tetapi juga menjadi motor penggerak promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Melalui pola pembinaan yang bersifat rutin dan terjadwal, dokter-dokter ini melakukan kunjungan secara periodik untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, konsultasi, penyuluhan penyakit, deteksi dini faktor risiko, serta penanganan masalah-masalah kesehatan masyarakat di tingkat desa.

Kerja sama yang erat antara Dinas Kesehatan, pemerintah desa, dan kader kesehatan desa menjadi bagian sentral dalam menjalankan program ini. Dokter tidak berjalan sendiri, tetapi membangun sinergi dengan tenaga kesehatan lain seperti bidan, perawat, serta kader posyandu agar transfer ilmu dan pemantauan kondisi kesehatan masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan. Salah satu inovasi dalam pelaksanaannya adalah pendataan menyeluruh kondisi kesehatan warga desa dan pelaporan masalah secara sistematis ke dinas terkait agar respons dan tindak lanjut lebih cepat dan tepat.

Selain memperbaiki akses layanan, program Dokter Bina Desa juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan. Edukasi mengenai pola hidup sehat, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, serta pengetahuan tentang sanitasi lingkungan menjadi bagian penting dari pembinaan dokter. Dengan konsep menyeluruh ini, pemerintah daerah berharap terjadi penurunan angka penyakit berbasis lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, mewujudkan Sukabumi yang sehat, kuat, dan inspiratif secara merata di seluruh wilayah, termasuk wilayah terpencil.

## **2.3. Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat**

Program Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan salah satu pilar dalam program strategis Sukabumi SAKTI, yang menekankan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Program ini dirancang untuk mendorong perubahan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat dalam menerapkan kebiasaan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari secara berkelanjutan.

Program ini tidak hanya fokus pada aspek edukatif, tetapi juga membangun sistem sosial dan lingkungan yang mendukung transformasi perilaku sehat melalui kolaborasi lintas sektor dan pelibatan komunitas. Tujuan utama dari program ini mencakup enam poin strategis:

1. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya PHBS;
2. Mendorong perubahan perilaku menuju pola hidup sehat dan bersih;
3. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah melalui perilaku sehat;
4. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya kesehatan;
5. Memperkuat peran keluarga sebagai unit terkecil penggerak PHBS;
6. Mendorong kemandirian masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan lingkungan.

Pelaksanaan program ini disinergikan dengan lokasi-lokasi prioritas Kabupaten Sukabumi Sehat, guna mendukung pencapaian status Wistara Paripurna, melalui penataan dan pembinaan terhadap sembilan tatanan Kabupaten Sehat. Target utama dari program ini adalah penguatan dan penataan sembilan tatanan tersebut, yang mencakup antara lain tatanan kawasan permukiman, satuan pendidikan, pasar, tempat kerja, dan tempat ibadah.

Total kebutuhan anggaran untuk mendukung program ini adalah Rp500 juta, yang dialokasikan melalui dua mekanisme:

- APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi,
- Hibah kepada Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat untuk memperluas jangkauan dan efektivitas implementasi di lapangan.

Program ini berada dalam kerangka besar Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), dan dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

Rangkaian aktivitas utama meliputi:

- Pembinaan terhadap sembilan tatanan Kabupaten Sukabumi Sehat untuk menciptakan lingkungan hidup yang mendukung PHBS;
- Penerapan sistem penghargaan dan insentif (reward) kepada wilayah/lokus yang berhasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam penerapan PHBS;
- Pelibatan tokoh lokal, komunitas sosial, dan relawan, yang secara aktif menyebarluaskan edukasi PHBS melalui kampanye digital, media sosial, dan kegiatan komunitas berbasis event offline.

Program ini secara langsung mendukung arah pembangunan Kabupaten Sukabumi, dengan kontribusi nyata terhadap:

1. Misi pembangunan SDM unggul dan berbudaya berbasis Iptek dan Imtaq;
2. Sasaran strategis meningkatnya integrasi layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;

3. Arah kebijakan peningkatan sumber daya kesehatan dan peran aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan dan perilaku sehari-hari.

Dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan, Program Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat diharapkan menjadi salah satu pengungkit utama dalam membentuk masyarakat Kabupaten Sukabumi yang sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan semangat Sukabumi SAKTI.

#### **2.4 Peningkatan Pengetahuan Warga Tentang Gizi Seimbang**

Program Peningkatan Pengetahuan Warga Tentang Gizi Seimbang merupakan program keempat dari program prioritas dalam inisiatif Sukabumi SAKTI, yang berfokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam aspek kesehatan dan gizi masyarakat. Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan masyarakat dalam memilih, mengolah, dan mengonsumsi makanan sesuai prinsip gizi seimbang—sebagai fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang, daya tahan tubuh, serta produktivitas masyarakat di semua jenjang usia.

Program ini menyasar seluruh lapisan masyarakat, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, ibu hamil, dan lansia, yang disinergikan dengan upaya konvergensi percepatan penurunan stunting, khususnya pada 142.539 keluarga berisiko stunting di Kabupaten Sukabumi.

Pelaksanaan program ini dibiayai melalui mekanisme reguler yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp7,5 miliar.

Program ini akan dilaksanakan melalui kerangka Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Turunan kegiatan dari program ini berada dalam lingkup Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, khususnya melalui sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.

Adapun bentuk aktivitas konkret dari sub kegiatan tersebut meliputi:

- Posyandu Gizi sebagai garda terdepan dalam layanan gizi berbasis masyarakat;
- Kampanye “Isi Piringku” untuk mengedukasi masyarakat tentang komposisi makanan sehat sehari-hari;
- Intervensi Stunting dengan pendekatan multidimensi berbasis keluarga risiko stunting;

- Edukasi Gizi di Sekolah dan Komunitas, untuk membentuk pola konsumsi sehat sejak usia dini dan memperkuat peran masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi keluarga.

Pelaksanaan Program Peningkatan Pengetahuan Warga Tentang Gizi Seimbang mendukung pencapaian arah pembangunan daerah melalui:

1. Misi: Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, serta berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan keimanan (Iptek dan Imtaq);
3. Sasaran Strategis: Terwujudnya integrasi layanan kesehatan yang merata dan berkesinambungan;
4. Arah Kebijakan: Meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan serta memperkuat peran aktif masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.

Melalui pendekatan kolaboratif, edukatif, dan berbasis data, Program Peningkatan Pengetahuan Warga Tentang Gizi Seimbang diharapkan dapat menjadi motor penggerak perbaikan pola hidup sehat di tingkat rumah tangga, serta turut berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka stunting dan memperkuat ketahanan keluarga di Kabupaten Sukabumi.

### **3. Pemuda Berkarya Sukabumi Berdaya**

Program Pemuda Berkarya Sukabumi Berdaya merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang komprehensif dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Program ini dirancang sebagai langkah strategis dalam membangun generasi muda yang berdaya saing, kreatif, inovatif, mandiri, dan memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, serta nasionalisme.

Melalui pendekatan berbasis penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan, program ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi pemuda dalam berbagai sektor kehidupan, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun kepemimpinan.

Program ini memiliki tujuan utama untuk:

- Meningkatkan keterampilan dan kapasitas pemuda dalam bidang kewirausahaan dan kepemimpinan,
- Mendorong pembentukan karakter dan jiwa kebangsaan di kalangan pemuda,
- Memberikan ruang kreasi dan aktualisasi bagi organisasi kepemudaan dan pemuda berprestasi,
- Mengembangkan ekosistem kepemudaan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Sasaran utama dari Program Pemuda Berkarya Sukabumi Berdaya adalah:

- Pemuda umum sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 40 Tahun 2009,
- Wirausaha muda dan pemuda kreatif,
- Organisasi kepemudaan tingkat lokal,
- Pemuda berprestasi yang memiliki potensi untuk menjadi pelopor pembangunan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, program ini mencakup beberapa kegiatan inti yang dilaksanakan secara terstruktur, dengan total anggaran sebesar Rp2 miliar, bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi melalui skema pembiayaan reguler dan hibah. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

1. Festival Kreativitas Pemuda

Diselenggarakan sebagai ajang kolaborasi dan aktualisasi kreativitas pemuda melalui Youth Camp tingkat kabupaten yang menampilkan festival seni, budaya, serta forum diskusi kepemudaan. Kegiatan ini termasuk dalam sub kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda.

2. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

Fokus pada peningkatan kapasitas dan daya saing wirausaha muda melalui pelatihan kewirausahaan, sertifikasi kompetensi (BNSP), pengembangan konten kreatif digital, serta fasilitasi sarana inkubasi usaha. Ini menjadi bagian dari sub kegiatan pengembangan wirausaha pemuda tingkat kabupaten.

3. Pameran Produk Kreatif Pemuda

Menyediakan ruang ekspresi dan promosi bagi produk inovatif karya wirausaha muda melalui gelar produk kreatif pemuda. Pameran ini sekaligus menjadi ajang membangun jejaring pasar dan kolaborasi lintas sektor.

4. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Memberikan dukungan berupa hibah dan pelatihan tata kelola organisasi, serta pelatihan softskill kepemimpinan dan kepeloporan. Tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas organisasi pemuda agar lebih adaptif dan profesional.

Program ini diimplementasikan melalui kerangka besar Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan, dengan kegiatan utama berupa:

- Kegiatan dalam bentuk Youth Camp,
- Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral dan komunitas,
- Peningkatan kompetensi dan karakter pemuda secara berkelanjutan.
- Gelar Produk Wirausaha pemuda pemula

Program Pemuda Berkarya Sukabumi Berdaya memberikan kontribusi nyata dalam mendukung arah pembangunan daerah, dengan peran strategis terhadap:

1. Misi: Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan keimanan;
2. Sasaran Strategis: Meningkatkan ketahanan keluarga, perlindungan anak, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender;
3. Arah Kebijakan: Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah secara aktif dan kolaboratif.

Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan, Program Pemuda Berkarya Sukabumi Berdaya diharapkan menjadi motor penggerak kemajuan pemuda Kabupaten Sukabumi menuju generasi yang tangguh, cakap, dan mampu berperan sebagai agen perubahan di masa depan.

#### **4. Program Permata Suci (Program PERempuan MAndiri dan TAngguh untuk SUkabumi Cemerlang dan Inovatif)**

Program Permata Suci adalah program Pemberdayaan perempuan dalam upaya mewujudkan kesetaraan peran, akses, partisipasi perempuan di segala bidang. Program Permata Suci menekankan pada peningkatan kapasitas/keterampilan perempuan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, mencapai kesetaraan gender, serta mengurangi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Permata Suci memiliki lima fokus utama, yaitu: Pendidikan, Kesetaraan gender, Kesehatan, Ekonomi dan Pengembangan potensi diri perempuan.

Tujuan Program Permata Suci adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga, mencapai kesetaraan gender, serta mengurangi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Sasaran Program ini adalah Kelompok perempuan yang pernah mendapatkan pelatihan program Perempuan Hebat untuk Keluarga yang Berkualitas dengan target peserta 4700 orang perempuan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Permata Suci dibiayai melalui mekanisme anggaran regular yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi dengan proyeksi anggaran sebesar 1 (satu) miliar.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam Program Permata Suci melibatkan beberapa dinas terkait, yaitu: DP3A, DKUKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Disnakertrans. DP3A dalam implementasi Program Permata Suci melaksanakan program Peningkatan Kualitas Keluarga. Kegiatan yang dilaksanakannya adalah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Rancangan aksi kegiatannya dibagi kedalam dua kegiatan, yaitu Pelatihan Pemberdayaan ekonomi keluarga dan Pemberian bantuan permodalan kepada kelompok perempuan

Program Permata Suci merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung misi Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq dengan sasaran strategis meningkatnya ketahanan keluarga, perlindungan anak, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender serta arah kebijakan meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

#### **5. Program Trendi (Program pesantREN melek Digital)**

Program Trendi merupakan Program Pemberdayaan Pesantren melalui Penerapan Teknologi Informasi baik di bidang pendidikan, sosial dan ekonomi (Pengembangan Kewirausahaan Pesantren Berbasis Digital). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memasarkan produk ekonomi secara digital dan kemampuan membuat laporan keuangan usaha ekonomi berbasis digital. Program ini difokuskan pada pesantren-pesantren yang memiliki usaha ekonomi. Program Trendi menargetkan 10 pesantren untuk dibina setiap tahunnya.

Program Trendi dilaksanakan oleh DKUKM dirancang melalui program pemberdayaan UMKM. Program Pemberdayaan UMKM yang difokuskan untuk pesantren diturunkan dalam kegiatan berupa Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. Rancangan aktivitas yang disusun dalam sub kegiatan ini adalah:

- Bimbingan Teknis Digitalisasi Pemasaran Usaha Ekonomi Bagi Pesantren
- Bimbingan Teknis Literasi Keuangan Berbasis Digital Bagi Pesantren
- Bimbingan Teknis Visualisasi, Fotografi dan Videografi Produk Pelaku Usaha Mikro Berbasis Pesantren

#### **6. Program Usaha Memakmurkan Masjid**

Program Usaha Memakmurkan Masjid merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dengan menitik beratkan pada upaya pembangunan masjid sebagai rumah peribadatan yang mengedepankan pemberdayaan masjid serta pembinaan kaum muslimin.

Proyek Prioritas Usaha Memakmurkan Masjid bertujuan untuk Meningkatkan fungsi masjid, Membangun dan membina masjid. Mendorong pendidikan keagamaan, dan Memperkuat peran masjid dalam membentuk karakter dan moral masyarakat. Sasaran Program ini adalah masjid dan mushola. Pada Program Usaha Memakmurkan Masjid, target yang ingin dicapai adalah membina 47 masjid/mushola setiap tahun. Proyek Prioritas ini dilaksanakan secara terpadu lintas perangkat daerah dan organisasi keagamaan di bawah koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi. Proyek prioritas ini difasilitasi melalui kegiatan

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Program/Kegiatan/subkegiatan yang relevan di setiap Perangkat Daerah.

Rancangan aktivitas yang akan dilakukan meliputi:

- Pembangunan/rehabilitasi sarana keagamaan
- Pembentukan Qoryah Mubarakah melalui strategi pemberdayaan masjid. Pola pemberdayaan yang dilakukan bersifat lintas sektor dan bersinergi dengan beberapa program pemberdayaan lainnya. Beberapa pemberdayaan yang bisa dilakukan, Contohnya:
  - ❖ Diskusi keislaman untuk generasi muda
  - ❖ Pelatihan membaca Al-Qur'an bagi anak-anak dan dewasa
  - ❖ Pelatihan kewirausahaan berbasis syariah
  - ❖ Perpustakaan Islam yang terbuka untuk masyarakat.
  - ❖ Pelatihan manajemen masjid agar lebih efektif dalam pelayanan
  - ❖ Pemanfaatan teknologi dalam dakwah, seperti media sosial atau podcast Islami.
  - ❖ Peningkatan ketangguhan Umat dalam menghadapi bencana
  - ❖ dan pemberdayaan lainnya sesuai kondisi lokal
- Optimalisasi Kebijakan Majelis Taklim Aparatur
- Pembiasaan Akhlak Mubarakah di Sekolah Kewenangan Kabupaten

Kegiatan-kegiatan dalam Proyek Prioritas Usaha Memakmurkan Masjid mendukung terhadap misi membangun pemerintahan yang kolaboratif, profesional dan akuntabel, sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif, serta arah kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Prosedur Birokrasi.

### **7. Petani, Nelayan, UMKM-IKM Motekar (Mandiri dengan Optimalisasi TEKnologi secara terARah)**

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha di sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, dan IKM. Upaya ini dilakukan melalui intervensi teknologi tepat guna yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta skalabilitas usaha masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya diarahkan untuk memperkuat daya saing pelaku usaha lokal, tetapi juga untuk memperluas akses terhadap pembiayaan, pasar, serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia.

Program ini mendukung misi pembangunan daerah dalam menciptakan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal dan daya saing daerah. Dengan sasaran strategis peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah

yang merata, arah kebijakan difokuskan pada pemberdayaan dan pendampingan pelaku usaha melalui fasilitasi sarana produksi, penguatan kapasitas kewirausahaan, serta pengembangan ekosistem usaha yang inovatif dan adaptif terhadap teknologi. Melalui dukungan lintas perangkat daerah (Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, KUKM, dan Daging) serta pemanfaatan anggaran yang terintegrasi, intervensi ini diharapkan mampu menciptakan pelaku usaha unggul yang menjadi motor penggerak perekonomian lokal.

Untuk mendukung pengembangan UMKM Motekar, Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan melaksanakan program pembiayaan bagi pelaku usaha mikro berupa **Subsidi Kredit Mikro Mitra Mubarakah**, yaitu program pembiayaan dengan subsidi bunga yang difokuskan bagi usaha mikro Produktif agar dapat lebih mengembangkan usahanya, sehingga diharapkan menjadi UMKM Naik Kelas dan berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas yang menangani urusan UMKM bekerjasama dengan perbankan.

#### **8. Pariwisata Berdaya (Berstandar dan Berbudaya)**

Sebagai bagian dari upaya strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengembangkan program penguatan sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi kreatif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing pariwisata berbasis potensi lokal melalui : Penguatan kelembagaan pengelola destinasi pariwisata, Penguatan Tata Kelola destinasi pariwisata, Penataan sarana dasar pariwisata, Penguatan Promosi Pariwisata, terutama penguatan event dan digitalisasi promosi, Penguatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui pelatihan dan sertifikasi, Standarisasi pariwisata dalam aspek promosi, amenitas, dan standar pengelolaan destinasi.

Program ini sejalan dengan misi pembangunan daerah untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan agroindustri dan pariwisata. Sasaran strategisnya mencakup Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah. Arah kebijakan difokuskan pada Meningkatkan daya tarik wisata melalui pengembangan destinasi unggulan; Mendorong ekonomi kreatif subsektor kuliner berdaya saing; Memperkuat promosi pariwisata dan kemitraan strategis. Dengan alokasi anggaran yang memadai dan pendekatan kolaboratif, pengembangan pariwisata ini diharapkan mampu menjadi pendorong signifikan dalam meningkatkan citra daerah dan perekonomian lokal secara berkelanjutan.

#### **9. Pembangunan Rumah Sakinah**

Dalam rangka memperkuat pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang merata dan inklusif, Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mendorong penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin dan warga terdampak bencana. Program penyediaan rumah layak huni ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar tempat tinggal, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan sosial serta ekonomi penghuninya.

Program ini mendukung misi pembangunan daerah dalam menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Sasaran strategis program ini meliputi peningkatan kualitas permukiman, pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh, serta rehabilitasi rumah warga yang terdampak bencana. Melalui mekanisme hibah yang bersumber dari APBD, dan berpedoman pada Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 46 Tahun 2019, program ini menargetkan pembangunan dan perbaikan setidaknya 1.100 unit rumah per tahun. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, diharapkan tercipta lingkungan permukiman yang manusiawi serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

#### **10. Taman Interaksi Warga**

Penyediaan Taman berbasis ruang terbuka hijau yang dirancang dengan konsep atau tema tertentu untuk menciptakan pengalaman unik bagi pengunjung serta peningkatan kualitas hidup. Tema yang digunakan bisa berdasarkan unsur alam, budaya, hiburan, edukasi, atau konsep kreatif lainnya yang dilengkapi fasilitas informasi teknologi. Program Taman Interaksi Warga ini bertujuan untuk menciptakan Pembangunan taman-taman tematik yang dapat menjadi pusat aktivitas warga dengan dilengkapi berbagai fasilitas seperti fasilitas teknologi informasi, olahraga, dan lain-lain.

Program ini mendukung misi pembangunan membangun infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian yang merata dan inklusif. Sasaran strategis program ini meliputi peningkatan kualitas permukiman, pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh, serta rehabilitasi rumah warga yang terdampak bencana. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang fungsi permukiman yang berkualitas dan inklusif. Arah kebijakan difokuskan Untuk meningkatkan akses hunian permukiman yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk menghadirkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta taman-taman tematik yang unik, kreatif, dan fungsional. Kami percaya bahwa ruang-ruang publik yang tertata baik bukan hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga menjadi pusat interaksi sosial, ruang ekspresi budaya, serta

sarana edukatif dan rekreatif bagi seluruh lapisan masyarakat. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya kami membangun lingkungan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

### **11. Program Tumaninah**

Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan wilayah dan penguatan konektivitas antar kawasan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menginisiasi Program Tumaninah, yakni program strategis pembangunan jalan baru dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan. Program ini dirancang untuk memperlancar mobilitas barang dan jasa, membuka keterisolasian wilayah, serta menciptakan stimulus pertumbuhan ekonomi dan sosial yang merata. Melalui konektivitas yang andal, akses masyarakat terhadap pelayanan publik, kawasan produktif, dan pusat pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan secara signifikan.

Program ini merupakan bagian dari implementasi misi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian yang merata dan inklusif. Sasaran strategisnya adalah tersedianya infrastruktur fisik penunjang perekonomian yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah kabupaten. Dengan arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas jaringan jalan kabupaten, kegiatan ini mencakup pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan strategis, pengentasan kawasan kumuh melalui penyediaan prasarana dan sarana dasar, serta penataan infrastruktur perdesaan dan gedung pemerintahan.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan dan preservasi ruas jalan strategis dan pembangunan beberapa jembatan prioritas di berbagai kecamatan. Selain itu, program ini juga mencakup pengadaan tanah, penyusunan dokumen teknis perencanaan (DED dan RC), serta pembangunan gedung perkantoran sebagai bagian dari lanjutan penataan kawasan Jajaway.

Melalui sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, DPTR, dan OPD lainnya, pelaksanaan Program Tumaninah diharapkan mampu mewujudkan infrastruktur wilayah yang tangguh, mendukung aktivitas ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

**Tabel 4.5. Keterkaitan Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan dengan  
Proyek Prioritas Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2029**

<b>Visi</b>	<b>Misi</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Proyek Prioritas</b>	<b>Program Prioritas</b>
Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarakah)	Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq	Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata.	Generasi Mencrang  1. Beasiswa pendidikan bagi siswa Hafidz Al-Quran	Pengelolaan Pendidikan
	Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq	Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata.	Generasi Mencrang  2. Pengembangan Sekolah Berbasis Vokasi Sesuai Kebutuhan Industri	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq	Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata	Generasi Mencrang  3. Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis Pertanian dan Pariwisata	Pengembangan Kurikulum
	Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq	Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata	Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata	Generasi Mencrang  4. Beasiswa pendidikan sarjana untuk keluarga petani dan buruh migran	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq	Meningkatnya integrasi layanan kesehatan secara merata	1. Meningkatkan sumber daya kesehatan 2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan	Program Sukabumi Sakti  1. Pelayanan Kesehatan Gratis untuk Masyarakat Miskin	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq	Meningkatnya integrasi layanan kesehatan secara merata	1. Meningkatkan sumber daya kesehatan 2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan	Program Sukabumi Sakti  2. Dokter Bina Desa	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq	Meningkatnya integrasi layanan kesehatan secara merata	1. Meningkatkan sumber daya kesehatan 2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan	Program Sukabumi Sakti  3. Peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq	Meningkatnya integrasi layanan kesehatan secara merata	1. Meningkatkan sumber daya kesehatan 2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan	Program Sukabumi Sakti  4. Peningkatan Pengetahuan Warga Tentang Gizi Seimbang	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Membangun sumber daya manusia yang	Meningkatnya ketahanan keluarga, perlindungan anak,	Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Pemuda Berkarya Sukabumi Berdaya	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Visi	Misi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Proyek Prioritas	Program Prioritas
	unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq	kualitas pemuda, dan kesetaraan gender			
	Membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis Iptek dan Imtaq	Meningkatnya ketahanan keluarga, perlindungan anak, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender	Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Program Permata Suci	Peningkatan Kualitas Keluarga
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan agroindustri dan pariwisata	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pengembangan kewirausahaan daerah	Program Trendi	Program Pemberdayaan UMKM
	Membangun pemerintahan yang kolaboratif, profesional dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif	Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Prosedur Birokrasi	Program Usaha Memakmurkan Masjid	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program relevan di Perangkat Daerah
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan agroindustri dan pariwisata	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Intensifikasi pertanian berbasis teknologi, Peningkatan sumber daya manusia (SDM) industri, Mendorong pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) melalui teknologi dan inovasi, Pengembangan kewirausahaan daerah	Petani, Nelayan, UMKM-IKM Motekar	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan agroindustri dan pariwisata	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Meningkatkan daya tarik wisata melalui pengembangan destinasi unggulan; Mendorong ekonomi kreatif subsektor kuliner berdaya saing; Memperkuat promosi pariwisata dan kemitraan strategis	Pariwisata Berdaya	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Membangun infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang fungsi permukiman yang berkualitas dan	Meningkatkan akses hunian permukiman yang layak, terjangkau dan berkelanjutan	Pembangunan Rumah Sakinah	Program Pengembangan Perumahan Program Perumahan dan

<b>Visi</b>	<b>Misi</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Proyek Prioritas</b>	<b>Program Prioritas</b>
	yang merata dan inklusif	inklusif			Kawasan Permukiman Kumuh
	Membangun infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian yang merata dan inklusif	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang fungsi permukiman yang berkualitas dan inklusif	Meningkatkan akses hunian permukiman yang layak, terjangkau dan berkelanjutan	Taman Interaksi Warga	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	Membangun infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian yang merata dan inklusif	Meningkatnya infrastruktur fisik penunjang perekonomian yang berkualitas dan merata	Meningkatkan kualitas jaringan jalan kabupaten	Program Tumaninah	Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Program Kawasan Permukiman Program Penataan Bangunan Gedung

*Sumber: Hasil Analisis Tim RPJMD 2025-2029, Bappelitbangda 2025*

#### 4.2.5. Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025 merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi dalam RKPD Kabupaten Sukabumi tahun 2025. Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan hasil kajian dan pembahasan dari Badan Anggaran DPRD dan Pimpinan Fraksi-fraksi yang ditelaah dan dianalisis terhadap kondisi aktual yang dihadapi oleh daerah dan masyarakat sebagai permasalahan dalam pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, hasil evaluasi dari pelaksanaan rencana pembangunan Pemerintah Daerah yang diperoleh DPRD melalui hasil rapat/hearing, penjangkaran aspirasi melalui reses atau saran dan masukan dari masyarakat dan Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan lainnya.

Adapun saran dan masukan DPRD berupa arah kebijakan, program dan kegiatan yang perlu diakomodir dalam RKPD Tahun 2025, antara lain:

**Tabel 4.6** Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sukabumi

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Perangkat Daerah
1	Urusan Kesehatan	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Kesehatan
	Peningkatan kualitas dan akses Sarana Prasarana Kesehatan.			
	Penyediaan Tenaga kesehatan terutama tenaga medis (dokter) di puskesmas dan Rumah Sakit			
	Optimalisasi Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan peningkatan akses fasilitasi JKN bagi masyarakat			
	Ketersediaan Dokter di daerah terpencil.			
	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di RSUD dan Puskesmas			
	program penambahan untuk perbaikan gizi masyarakat penanganan dan pencegahan Stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka Kematian Bayi (AKB),			
2	Urusan Pendidikan	Persentase APK Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas dan Akses Sarana dan Prasarana Pendidikan			
	Standarisasi penyebaran /penempatan guru di setiap sekolah perlu dilakukan secara optimal.			
	Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD dan SMP.			

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Perangkat Daerah
	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas SD dan SMP.			
	Meningkatkan dan menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam bidang sosial kemasyarakatan dan keagamaan, yang relevan untuk mewujudkan visi daerah			
3	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	Persentase tingkat kemantapan kondisi jalan Kabupaten	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Pekerjaan Umum
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan dan Jembatan Jalan Kabupaten			
	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Kabupaten			
	Peningkatan status jalan, seperti jalan desa menjadi jalan Kabupaten.			
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			
4	Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman di kabupaten yang memiliki PSU kualitas baik	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan Jalan Permukiman dan Drainase Permukiman.			
	pemeliharaan PSU perumahan di Kabupaten Sukabumi.			
	Peningkatan pemenuhan Sarana Air Bersih, Sanitasi lingkungan MCK			
	Menyusun <i>grand design</i> dan <i>plan action</i> pencapaian target Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).			
5	Urusan sosial	Persentase kebijakan dibidang bina mental dan spritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Sekretariat Daerah
	bidang keagamaan mulai sarana dan prasarana ibadah serta pendidikan keagamaan yang disampaikan masyarakat perlu diakomodir serta direncanakan dan dikelola secara transparan dan akuntabel oleh Pemerintah Daerah, karena hal tersebut sejalan dengan visi daerah untuk mewujudkan masyarakat yang religius.			
6	Urusan tenaga kerja dan transmigrasi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program padat karya bagi masyarakat.			
	Program meningkatkan kesempatan dan produktivitas kerja serta perluasan kesempatan kerja dalam mengurangi angka			

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Perangkat Daerah
	pengangguran di Kabupaten Sukabumi.			
	Peningkatan pengangguran terbuka, perlu diantisipasi melalui pelatihan produktif seperti Pelatihan Menjahit Non Institusional, Pelatihan Perbengkelan Sepeda Motor Non Institusional.			
	Kompetensi tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga yang perlu mendapat perhatian agar daya saing pekerja menjadi pertimbangan utama selain soal upah yang makin kompetitif antar daerah.			
7	Urusan pangan	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Ketanahan Pangan
	Pengembangan potensi lokal hasil pertanian di Kabupaten Sukabumi seperti padi, ubi kayu dan lainnya.			
	Mengoptimalkan peran Perumda Agrobisnis dalam penyediaan ketersediaan pangan / ketahanan pangan dan pengstabilan harga.			
8	Urusan lingkungan hidup	Persentase pengelolaan sampah pada wilayah yang ditangani	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatkan koordinasi terhadap pengelolaan hutan pemanfaatnya, agar memperhatikan kelestarian hayati, terutama untuk daerah serapan air.			
	Perhatian terhadap pengelolaan sampah terpadu			
	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Publik di setiap wilayah Kecamatan.			
9	Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil
	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil sampai tingkat Desa.			
10	Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase status desa mandiri	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pembekalan kepada Para Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan Desa, agar lebih sinergis dengan rencana pembangunan di tingkat daerah.			
	Mengoptimalkan dan mengembangkan potensi Desa, seperti pembentukan dan			

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Perangkat Daerah
	pengembangan Desa Wisata, pengembangan BUMDES.			
11	Urusan perhubungan	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten (PJU)			
12	Urusan persandian, komunikasi dan informatika	Persentase Informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah, disampaikan secara cepat dan tepat	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
	Peningkatan pelayanan jaringan untuk daerah-daerah yang blankspot, melalui kerjasama dengan penyedia jaringan (operator seluler).			
	Pengelolaan Berita dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terintegrasi, cepat dan aman.			
13	Urusan Koperasi, usaha kecil, dan menengah	Persentase pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dari sisi akses modal dan pemasaran	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Koperasi dan UKM
	fasilitasi bantuan untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Sukabumi.			
	fasilitasi untuk promosi dan pemasaran produk-produk UMKM Kabupaten Sukabumi.			
	Fasilitas bantuan untuk perizinan dan lisensi produk UMKM			
14	Urusan kebudayaan, pemudaan dan olah raga	Prosentase Peningkatan Olahraga Pendidikan, penyelenggaraan olahraga tingkat Kabupaten dan Provinsi, Organisasi Olahraga dan Olahraga Rekreasi yang dibina dan dikembangkan	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga.			
	Pemberdayaan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah.			
15	Urusan pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata Yang Dibangun	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Pariwisata
	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten dan Pengembangan Destinasi Wisata berbasis potensi lokal			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten yang perlu ditambah sebagai sumber PAD.			

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Perangkat Daerah
	Peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana untuk pengembangan Destinasi wisata geopark ciletuh-Palabuhanratu, sebagai destinasi wisata wisatawan lokal dan mancanegara.			
16	Urusan pertanian,	Persentase sarana pertanian yang dimanfaatkan oleh petani	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Pertanian
	Sarana dan prasarana fasilitas jalan dan irigasi untuk penunjang lahan pertanian			
	Bantuan untuk fasilitasi alat-alat pertanian dan sarana produksi pertanian			
	Penertiban Lahan pertanian yang beralih fungsi.			
	Fasilitasi Pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan para petani.			
17	Urusan Peternakan	Persentase sarana peternakan yang dimanfaatkan oleh peternak	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Peternakan
	Pengadaan bibit ternak (kambing, domba, sapi potong dan sapi perah)			
	Peningkatan dan fasilitasi pengembangan ternak yang dikelola oleh masyarakat			
19	Urusan perdagangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral,	Persentase Jumlah IKM Mandiri	Tersebar di Kabupaten Sukabumi	Dinas Peragangan dan Perindustrian
	Fasilitasi Desain dan Cetak Kemasan Produk IKM (Pelatihan, Pengadaan Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Akses Pasar).			
	Mengembangkan sumber energi yang ramah lingkungan dan murah bagi masyarakat.			

### **4.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH**

Kebijakan pembangunan wilayah mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi yang dirumuskan secara komprehensif memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, potensi sektoral, potensi investasi, dan struktur permukiman yang sudah terbentuk secara eksisting maupun proyeksi dalam jangka waktu 20 tahun. Amanat keterkaitan rencana pembangunan daerah dengan rencana tata ruang menekankan perlunya integrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara khusus disebutkan bahwa rencana pembangunan mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, melalui penyesuaian antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. RTRW mengarahkan lokasi dan menjadi dasar menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sukabumi.

Penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Sukabumi dilaksanakan dengan koordinasi yang mantap dan sistematis serta memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan, maka dari itu perlu ditetapkan prioritas penataan ruang Kabupaten Sukabumi untuk pencapaian tujuan dan sasaran penataan ruang Kabupaten Sukabumi. Secara substantif, prioritas penataan ruang tersebut diharapkan selain dapat menjawab sasaran penataan ruang Kabupaten Sukabumi, juga mampu menjawab isu utama penataan ruang yang meliputi aspek sosial-ekonomi, lingkungan, kewilayahan, dan kelembagaan.

#### **4.3.1 Kebijakan Penataan Ruang**

Tujuan penataan ruang Kabupaten Sukabumi yaitu mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing dibidang agribisnis, pariwisata dan industri berwawasan lingkungan menuju kabupaten yang religious, maju dan sejahtera. Penjabaran kebijakan dan strategi, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka pencapaian tujuan penataan ruang adalah sebagai berikut.

##### **➤ Aman**

- Kebijakan dan Strategi
  1. Kebijakan pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkaun pelayanannya. Dilakukan dengan strategi mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan DAS dan mitigasi bencana.

2. Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Dilakukan dengan strategi mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.
- **Arahan Pemanfaatan Ruang**
    1. Pengembangan sistem mitigasi bencana dan pengelolaan Kawasan Rawan Bencana (KRB)
    2. Program inventarisasi data spasial dan penetapan jaringan evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana
    3. Pengoptimalan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan yang ada
  - **Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**
    1. Pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi kawasan pertahanan dan keamanan
    2. Kegiatan budi daya dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana
- **Nyaman**
- **Kebijakan dan Strategi**
    1. Kebijakan peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan. Dilakukan dengan strategi mengembangkan infrastruktur dasar kawasan perdesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi.
    2. Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan industri bertumpu pada potensi sumber daya local. Dilakukan dengan strategi menata kawasan peruntukan industri, membangun dan mengembangkan kawasan industri, dan membatasi pertumbuhan industri besar di luar kawasan industri.
  - **Arahan Pemanfaatan Ruang**
    1. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di PPL
    2. Pengendalian perkembangan industri besar di luar kawasan peruntukan industri
    3. Pengembangan kawasan peruntukkan industri
    4. Program perencanaan dan pembangunan industri
  - **Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**
    1. Pelarangan kegiatan pembangunan industri baru di luar Kawasan Peruntukan Industri (KPI) untuk skala menengah dan besar di sepanjang jalur arteri primer
    2. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur peningkatan kegiatan perdesaan
- **Efisien**
- **Kebijakan dan Strategi**

1. Kebijakan peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan. Dilakukan dengan strategi meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam
  2. Kebijakan pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan. Dilakukan dengan strategi meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran
- **Arahan Pemanfaatan Ruang**
    1. Pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan seperti pelabuhan perikanan, sentra kegiatan perikanan tangkap, dan sentra kegiatan perikanan budidaya
    2. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif
  - **Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**
    1. Menstabilkan penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian
    2. Pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari
- **Produktif**
- **Kebijakan dan Strategi**
    1. Kebijakan pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya. Dilakukan dengan strategi mengembangkan PKW, PKL, PPL, dan PPL sesuai dengan fungsi dan perannya
    2. Kebijakan pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan. Dilakukan dengan strategi mengembangkan kawasan agrobisnis berorientasi agropolitan
  - **Arahan Pemanfaatan Ruang**
    1. Pengembangan fasilitas bisnis pariwisata berskala internasional
    2. Program pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan
    3. Pengembangan kawasan agrobisnis purabaya
  - **Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Pada PKW diperbolehkan kegiatan perkotaan berskala provinsi, didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan antar daerah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta
- **Berkelanjutan**
- **Kebijakan dan Strategi**
    1. Kebijakan pengendalian dan pelestarian kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya

buatan, dan pengurangan risiko bencana. Dilakukan dengan strategi menjaga kawasan lindung dari kegiatan budi daya serta mempertahankan luasannya

2. Kebijakan pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan. Dilakukan dengan strategi melakukan percepatan penetapan kawasan LP2B pada kawasan tanaman pangan

- **Arahan Pemanfaatan Ruang**

1. Perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya
2. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)

- **Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

1. Tidak diperbolehkan memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan lindung
2. Tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah dan merusak fungsi KP2B yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan

➤ **Berdaya saing**

- **Kebijakan dan Strategi**

1. Kebijakan pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Dilakukan dengan strategi mengembangkan komoditas wisata berorientasi pasar mancanegara pelestarian lingkungan dan penelitian

2. Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan industri bertumpu pada potensi sumber daya local. Dilakukan dengan strategi meningkatkan kemitraan antar-industri

- **Arahan Pemanfaatan Ruang**

1. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya Tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten
2. Pengembangan kawasan Ciletuh Palabuhanratu UNESCO Global Geopark
3. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional

- **Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

1. Wajib menggunakan tata busana adat daerah pada petugas jasa pariwisata sesuai dengan jenis jasa yang disediakan
2. Pemanfaatan ruang kegiatan industri harus sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya

Kebijakan pengembangan wilayah memberi acuan fokus pengembangan dan arahan pengembangan secara kewilayahan sesuai karakteristik, potensi pengembangan (kebijakan nasional dan infrastruktur strategis eksisting), serta daya dukung lingkungan untuk mendukung pembangunan. Kebijakan pengembangan wilayah ditujukan untuk meminimalisasi ketimpangan, meningkatkan konektivitas wilayah, dan pengembangan potensi serta komoditas unggulan daerah. Ketimpangan wilayah di Kabupaten Sukabumi cenderung terjadi antara kecamatan-kecamatan di wilayah utara, dengan kecamatan-kecamatan di bagian selatan. Kondisi ini secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh perbedaan ketersediaan infrastruktur di kedua wilayah.

Ketersediaan infrastuktur Kabupaten Sukabumi wilayah selatan masih rendah, yang menyebabkan rendahnya tingkat konektivitas kawasan selatan Kabupaten Sukabumi baik antar kecamatan, maupun askes antar kabupaten. Rendahnya ketersediaan infrastruktur dan akses konektivitas wilayah selatan Kabupaten Sukabumi menyebabkan kurang optimalnya pengembangan potensi dan komoditas unggulan daerah yang didominasi oleh sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta pariwisata. Hal tersebut menyebabkan pengembangan dan pertumbuhan wilayah bagian selatan tidak berjalan secara optimal, sehingga terjadi ketimpangan wilayah selatan dan utara Kabupaten Sukabumi.

Dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan wilayah, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang percepatan pengembangan kawasan rebana dan kawasan jawa barat bagian selatan, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat merumuskan rencana induk pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Selatan, yang terdiri dari rencana induk pengembangan infrastruktur, rencana induk pengembangan sektor agribisnis, rencana induk pengembangan sektor kelautan, dan rencana induk pengembangan sektor pariwisata. Rencana pengembangan wilayah yang dituangkan dalam RKPDP tahun 2025 ini memiliki konsep yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 dan rancangan rencana induk kawasan Jawa Barat Bagian Selatan yaitu menggunakan konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis sumber daya alam. Pengembangan Jabar Selatan di Kabupaten Sukabumi diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis pariwisata serta kelautan dan perikanan. Kawasan pengembangan tersebut akan didukung dengan pembangunan infrastruktur pada masing-masing program di setiap wilayah, berupa pengembangan infrastruktur dasar, perhubungan, jalan, sumber daya air, serta infrastruktur lainnya. Konsep tersebut diharapkan dapat menghasilkan *positif spillover (spread effect)* dari pengembangan pusat pertumbuhan (*growth center*) kepada kawasan *hinterland*-nya. Oleh karena itu, untuk mendorong terbentuknya keterkaitan antar dan intra pusat pertumbuhan

(*spacial lag dependent*) dengan kawasan *hinterland*-nya, perlu dikembangkan komoditas unggulan (pertanian, kelautan dan perikanan, serta pariwisata) sebagai *prime mover* bagi pusat pertumbuhan tersebut. Dengan mengusung konsep pembangunan kolaboratif yang mengintegrasikan proyek pembangunan startegis nasional dan pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan termasuk di dalamnya pengembangan Ciletuh-Palabuhanratu Unesco Global Geopark (CPUGGp) dengan proyek strategis Kabupaten sukabumi dan proyek pendukung lainnya di wilayah Sukabumi selatan diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi meningkat yang berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan dan terwujudnya masyarakat kabupaten sukabumi sejahtera lahir batin.

#### **4.3.2 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang**

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Berkaitan dengan pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Sukabumi, selain merujuk kepada penetapan sistem perkotaan dalam RTRWN Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Barat yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, juga didasarkan atas tipologi kecamatan. Tipologi Kecamatan adalah pengklasifikasian kecamatan berdasarkan karakteristik dan potensi masing-masing kecamatan. Tipologi kecamatan yang dimaksud adalah berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik serta kapasitas tumbuh-kembang wilayah kecamatan tersebut. Secara normatif, kecamatan dengan sarana dan prasarana lebih lengkap ditempatkan pada hirarki lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan dengan sarana dan prasarananya yang kurang lengkap. Begitu pula dengan kapasitas tumbuh-kembang wilayah tersebut.

Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. Pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya;
- b. Peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan; dan
- c. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung sistem pusat permukiman, pertanian, pariwisata dan industri yang terpadu dan merata di wilayah kabupaten.

Rencana pengembangan sistem pusat kegiatan di Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. PKW

Kabupaten Sukabumi berupa Perkotaan Palabuhanratu yang berada di Kecamatan Palabuhanratu.

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di Kabupaten Sukabumi terdiri atas:
  - a. PKL Cibadak;
  - b. PKL Cicurug;
  - c. PKL Jampangkulon; dan
  - d. PKL Sagaranten.
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. PPK di Kabupaten Sukabumi terdiri atas:
  - a. Perkotaan Ciemas;
  - b. Perkotaan Cikakak;
  - c. Perkotaan Cikembar;
  - d. Perkotaan Cisaat;
  - e. Perkotaan Cisolok;
  - f. Perkotaan Gunungguruh;
  - g. Perkotaan Jampangtengah;
  - h. Perkotaan Kebonpedes;
  - i. Perkotaan Nyalindung;
  - j. Perkotaan Parungkuda;
  - k. Perkotaan Simpenan;
  - l. Perkotaan Sukabumi;
  - m. Perkotaan Sukaraja; dan
  - n. Perkotaan Surade.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa. PPL di Kabupaten Sukabumi terdiri atas:
  - a. Perdesaan Bantargadung;
  - b. Perdesaan Bojonggenteng;
  - c. Perdesaan Caringin;
  - d. Perdesaan Ciambar;
  - e. Perdesaan Cibitung;
  - f. Perdesaan Cicantayan;
  - g. Perdesaan Cidadap;
  - h. Perdesaan Cidahu;
  - i. Perdesaan Cidolog;

- j. Perdesaan Cikidang;
- k. Perdesaan Cimanggu;
- l. Perdesaan Ciracap;
- m. Perdesaan Cireunghas;
- n. Perdesaan Curugkembar;
- o. Perdesaan Gegerbitung;
- p. Perdesaan Kabandungan;
- q. Perdesaan Kadudampit;
- r. Perdesaan Kalapanunggal;
- s. Perdesaan Kalibunder;
- t. Perdesaan Lengkong;
- u. Perdesaan Nagrak;
- v. Perdesaan Pabuaran;
- w. Perdesaan Parakansalak;
- x. Perdesaan Purabaya;
- y. Perdesaan Sukalarang;
- z. Perdesaan Tegalbuleud;
- aa. Perdesaan Waluran; dan
- bb. Perdesaan Warungkiara.

#### **4.3.3 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang**

Pola ruang adalah distribusi peruntukkan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana pola ruang untuk ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi wilayah kabupaten diatur dengan pedoman tersendiri dan harus mengikuti peraturan perundang - undangan terkait.

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- d. Kebijakan pengembangan kawasan lindung; dan
  - e. Kebijakan pengembangan kawasan budi daya.
1. Kawasan Lindung

Kebijakan pengembangan kawasan lindung terdiri atas:

- f. Pencapaian luas kawasan lindung hutan dan non hutan;
- g. Pengendalian pemanfaatan dan pelestarian kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan pengurangan risiko bencana; dan
- h. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Kawasan lindung terdiri atas:

- badan air;
- kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan hutan lindung;
- kawasan perlindungan setempat;
- kawasan konservasi, terdiri atas kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (taman nasional dan taman wisata alam);
- kawasan lindung geologi, berupa cagar alam geologi (kawasan keunikan bentang alam).

## 2. Kawasan Budi Daya

Kebijakan pengembangan kawasan budi daya terdiri atas:

- i. Pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan;
- j. Pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya;
- k. Pengembangan kawasan peruntukan industri bertumpu pada potensi sumber daya lokal; dan
- l. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kawasan budi daya terdiri atas:

- Badan jalan;
- Kawasan hutan produksi, terdiri atas kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap;
- Kawasan pertanian, terdiri atas kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan;
- Kawasan perikanan, berupa kawasan perikanan budi daya;
- Kawasan pertambangan dan energi, berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik;
- Kawasan peruntukan industri;
- Kawasan pariwisata;
- Kawasan permukiman, terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan;
- Kawasan transportasi; dan
- Kawasan pertahanan dan keamanan.

### **4.3.4 Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)**

Kawasan strategis yang berada di Kabupaten Sukabumi terdiri dari kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten. Kebijakan pengembangan KSK

yaitu pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, social, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, social, budaya, dan/atau lingkungan.

Kawasan strategis provinsi berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu KSP Sukabumi Bagian Selatan berada di:

1. Kecamatan Ciemas;
2. Kecamatan Ciracap;
3. Kecamatan Simpenan;
4. Kecamatan Palabuhanratu;
5. Kecamatan Cikakak;
6. Kecamatan Cisolok;
7. Kecamatan Waluran; dan
8. Kecamatan Surade.

Kawasan strategis kabupaten berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:

1. KSK Palabuhanratu, dengan tujuan untuk mengembangkan pusat pemerintahan kabupaten sekaligus sebagai pusat kegiatan wilayah yang diprioritaskan dapat mendorong perekonomian Jawa Barat Bagian Selatan;
2. Kawasan agrobisnis purabaya berada di Kecamatan Sagaranten, dengan tujuan untuk mengembangkan kawasan yang mampu memberikan pelayanan handal dan pendorong pertumbuhan dibagian selatan Kabupaten Sukabumi;
3. KSK Koridor Cicurug-Sukabumi-Sukalarang, dengan tujuan pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh dan mengembangkan koridor yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan peningkatan layanan sosial budaya dan lingkungan Kabupaten Sukabumi Utara khususnya dan WP Sukabumi dan sekitarnya ; dan
4. KSK Ujunggenteng, dengan tujuan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata dan pertanian yang menjadi bagian pengembangan Sukabumi bagian selatan.

#### **4.3.5 Arahan Pemanfaatan Ruang**

Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:

1. Ketentuan KKPR, terdiri dari:
  - KKPR untuk kegiatan berusaha;

- KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
  - KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
2. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan, terdiri dari:
    - Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2023-2028;
    - Indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2029-2033;
    - Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2033-2038; dan
    - Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2039-2043;
  3. Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyesuaian indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

#### **4.3.6 Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

##### **A. Ketentuan Umum Zonasi**

Ketentuan umum peraturan zonasi digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan zonasi. Ketentuan umum peraturan zonasi tersebut juga digunakan sebagai pedoman bagi Kabupaten dalam menerbitkan perizinan. Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- b. ketentuan umum zonasi rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- c. ketentuan umum zonasi rencana kawasan strategis; dan
- d. ketentuan khusus.

##### **B. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk memastikan:

- kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan pada periode:

- selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan

- pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

#### C. Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:

- meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
- meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.

Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sejalan dengan RTRW Kabupaten. Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan RTRW Kabupaten. Insentif dan disinsentif diberikan dalam bentuk fiscal maupun non fiscal. Insentif dan disinsentif diberikan dalam bentuk fiscal dapat berupa keringanan pajak atau pengenaan pajak (retribusi yang tinggi). Insentif dan disinsentif diberikan dalam bentuk non fiscal dapat berupa pemberian kompensasi atau kewajiban memberi kompensasi maupun dalam bentuk lainnya.

#### D. Arahan Sanksi.

Sanksi dikenakan atas pelanggaran rencana tata ruang yang mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif. Sanksi dikenakan setiap orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.

Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten meliputi:

- pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR;
- pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR dan/atau dokumen pemanfaatan ruang yang diterbitkan instansi berwenang; dan
- menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Arahan sanksi administratif dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan KKPR atau dokumen pemanfaatan ruang yang diterbitkan instansi berwenang;
- f. pembatalan KKPR;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang;
- i. denda administratif

## **BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Pagu indikatif setiap perangkat daerah dan setiap program yang tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 dan rekapitulasi penyesuaian jumlah program dan pagu perangkat daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1. Program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 merupakan rekapitulasi yang disusun menggunakan matrik program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Penjelasan lebih rinci terkait program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025. Total belanja daerah Kabupaten Sukabumi pada RKPD Murni tahun 2025 adalah sebesar 4.515.863.306.743, lalu pada APBD Murni 2025 adalah sebesar 4.523.211.793.090 dan pada perubahan RKPD tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 4.634.183.973.527. Rekapitulasi penyesuaian jumlah program dan pagu perangkat daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 5.1.

**Tabel 5.1. Rekapitulasi penyesuaian jumlah program dan pagu perangkat daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025**

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2	3	3	4
<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>1,289,515,268,572.00</b>	<b>1,301,019,355,669.00</b>	<b>1,331,072,712,907.00</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	755,520,665,550.00	818,890,199,769.00	838,463,530,885.00	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	502,183,863,022.00	445,905,562,100.00	455,994,798,922.00	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1,619,000,000.00	1,590,160,000.00	1,516,869,300.00	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	29,231,500,000.00	33,746,397,400.00	34,089,597,400.00	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	513,210,000.00	215,050,000.00	215,050,000.00	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	447,030,000.00	671,986,400.00	792,866,400.00	Dinas Pendidikan
<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>405,216,263,875.00</b>	<b>370,416,668,137.00</b>	<b>460,549,132,608.00</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	140,127,676,222.00	159,508,230,986.00	161,646,126,495.00	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	229,169,442,373.00	175,047,055,786.00	264,957,496,566.00	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	32,098,547,280.00	35,329,962,365.00	35,193,252,365.00	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1,509,919,000.00	331,419,000.00	83,331,500.00	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2,310,679,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	Dinas Kesehatan
<b>UPTD RSUD Palabuhanratu</b>	<b>142,588,019,008.00</b>	<b>115,232,681,507.00</b>	<b>117,136,618,407.00</b>	<b>UPTD RSUD Palabuhanratu</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	96,000,000,000.00	110,856,828,216.00	110,856,828,216.00	UPTD RSUD Palabuhanratu
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	46,588,019,008.00	4,375,853,291.00	6,279,790,191.00	UPTD RSUD Palabuhanratu
<b>UPTD RSUD Sekarwangi</b>	<b>165,188,141,569.00</b>	<b>158,677,217,569.00</b>	<b>158,627,217,569.00</b>	<b>UPTD RSUD Sekarwangi</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	128,729,343,779.00	156,058,017,569.00	156,008,017,569.00	UPTD RSUD Sekarwangi
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	36,358,292,790.00	2,519,200,000.00	2,519,200,000.00	UPTD RSUD Sekarwangi
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100,505,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	UPTD RSUD Sekarwangi
<b>UPTD Puskesmas Karawang</b>	<b>2,813,570,432.00</b>	<b>3,027,001,533.00</b>	<b>3,186,242,666.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Karawang</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,936,105,932.00	2,038,038,533.00	2,038,038,533.00	UPTD Puskesmas Karawang
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	792,324,500.00	986,111,000.00	1,145,352,133.00	UPTD Puskesmas Karawang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	85,140,000.00	2,852,000.00	2,852,000.00	UPTD Puskesmas Karawang
<b>UPTD Puskesmas Sukaraja</b>	<b>4,774,791,149.00</b>	<b>4,690,232,031.00</b>	<b>4,864,556,364.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Sukaraja</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,731,761,649.00	3,776,324,031.00	3,776,324,031.00	UPTD Puskesmas Sukaraja
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	964,379,500.00	908,000,000.00	1,082,324,333.00	UPTD Puskesmas Sukaraja
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	78,650,000.00	5,908,000.00	5,908,000.00	UPTD Puskesmas Sukaraja
<b>UPTD Puskesmas Limbangan</b>	<b>2,659,522,264.00</b>	<b>2,935,170,885.00</b>	<b>3,047,640,385.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Limbangan</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,742,382,749.00	1,884,861,885.00	1,884,861,885.00	UPTD Puskesmas Limbangan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	862,049,515.00	1,045,995,000.00	1,158,464,500.00	UPTD Puskesmas Limbangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	55,090,000.00	4,314,000.00	4,314,000.00	UPTD Puskesmas Limbangan

Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
<b>UPTD Puskesmas Kebonpedes</b>	<b>2,436,986,233.00</b>	<b>2,555,205,009.00</b>	<b>2,669,102,676.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Kebonpedes</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,729,724,233.00	1,762,635,009.00	1,762,635,009.00	UPTD Puskesmas Kebonpedes
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	652,453,000.00	785,960,000.00	899,857,667.00	UPTD Puskesmas Kebonpedes
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	54,809,000.00	6,610,000.00	6,610,000.00	UPTD Puskesmas Kebonpedes
<b>UPTD Puskesmas Cireunghas</b>	<b>3,029,150,936.00</b>	<b>3,186,599,151.00</b>	<b>3,350,147,884.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Cireunghas</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,287,653,977.00	2,340,218,151.00	2,340,218,151.00	UPTD Puskesmas Cireunghas
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	698,302,000.00	824,848,000.00	988,396,733.00	UPTD Puskesmas Cireunghas
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	43,194,959.00	21,533,000.00	21,533,000.00	UPTD Puskesmas Cireunghas
<b>UPTD Puskesmas Sukalarang</b>	<b>3,513,343,243.00</b>	<b>3,838,623,730.00</b>	<b>3,979,911,397.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Sukalarang</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,469,055,743.00	2,486,865,730.00	2,486,865,730.00	UPTD Puskesmas Sukalarang
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	948,487,500.00	1,346,588,000.00	1,487,875,667.00	UPTD Puskesmas Sukalarang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	95,800,000.00	5,170,000.00	5,170,000.00	UPTD Puskesmas Sukalarang
<b>UPTD Puskesmas Gegerbitung</b>	<b>3,732,878,065.00</b>	<b>3,971,190,480.00</b>	<b>4,126,888,147.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Gegerbitung</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,114,328,065.00	3,024,965,480.00	3,024,965,480.00	UPTD Puskesmas Gegerbitung
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	582,590,000.00	940,688,000.00	1,096,385,667.00	UPTD Puskesmas Gegerbitung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	35,960,000.00	5,537,000.00	5,537,000.00	UPTD Puskesmas Gegerbitung
<b>UPTD Puskesmas Nyalindung</b>	<b>2,272,547,330.00</b>	<b>2,558,075,935.00</b>	<b>2,613,977,935.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Nyalindung</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,518,799,330.00	1,585,631,935.00	1,585,631,935.00	UPTD Puskesmas Nyalindung
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	612,748,000.00	968,490,000.00	1,024,392,000.00	UPTD Puskesmas Nyalindung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	141,000,000.00	3,954,000.00	3,954,000.00	UPTD Puskesmas Nyalindung
<b>UPTD Puskesmas Cijangkar</b>	<b>1,766,854,455.00</b>	<b>1,677,785,439.00</b>	<b>1,734,549,106.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Cijangkar</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	981,162,455.00	1,016,138,439.00	1,016,138,439.00	UPTD Puskesmas Cijangkar
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	728,812,000.00	656,986,000.00	713,749,667.00	UPTD Puskesmas Cijangkar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	56,880,000.00	4,661,000.00	4,661,000.00	UPTD Puskesmas Cijangkar
<b>UPTD Puskesmas Purabaya</b>	<b>3,707,993,678.00</b>	<b>3,905,277,577.00</b>	<b>3,984,312,577.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Purabaya</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,859,687,678.00	2,993,537,577.00	2,993,537,577.00	UPTD Puskesmas Purabaya
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	801,794,000.00	906,355,000.00	985,390,000.00	UPTD Puskesmas Purabaya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	46,512,000.00	5,385,000.00	5,385,000.00	UPTD Puskesmas Purabaya
<b>UPTD Puskesmas Sagaranten</b>	<b>3,647,421,044.00</b>	<b>3,700,075,564.00</b>	<b>3,814,072,231.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Sagaranten</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,801,376,044.00	2,884,539,564.00	2,884,539,564.00	UPTD Puskesmas Sagaranten
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	786,185,000.00	806,803,000.00	920,799,667.00	UPTD Puskesmas Sagaranten
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	59,860,000.00	8,733,000.00	8,733,000.00	UPTD Puskesmas Sagaranten
<b>UPTD Puskesmas Cidolog</b>	<b>1,443,366,283.00</b>	<b>1,271,246,474.00</b>	<b>1,305,786,474.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Cidolog</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	739,973,283.00	717,353,474.00	717,353,474.00	UPTD Puskesmas Cidolog
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	665,107,000.00	552,693,000.00	587,233,000.00	UPTD Puskesmas Cidolog

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	38,286,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	UPTD Puskesmas Cidolog
<b>UPTD Puskesmas Cidadap</b>	<b>1,860,040,152.00</b>	<b>1,712,443,265.00</b>	<b>1,787,089,265.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Cidadap</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,131,153,152.00	1,138,557,265.00	1,138,557,265.00	UPTD Puskesmas Cidadap
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	677,488,000.00	564,085,000.00	638,731,000.00	UPTD Puskesmas Cidadap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	51,399,000.00	9,801,000.00	9,801,000.00	UPTD Puskesmas Cidadap
<b>UPTD Puskesmas Curugkembar</b>	<b>2,804,014,064.00</b>	<b>2,809,989,563.00</b>	<b>2,859,702,230.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Curugkembar</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,011,807,064.00	1,815,550,563.00	1,815,550,563.00	UPTD Puskesmas Curugkembar
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	759,737,000.00	986,757,000.00	1,036,471,667.00	UPTD Puskesmas Curugkembar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	32,470,000.00	7,682,000.00	7,680,000.00	UPTD Puskesmas Curugkembar
<b>UPTD Puskesmas Pabuaran</b>	<b>3,131,211,425.00</b>	<b>3,345,632,056.00</b>	<b>3,426,311,189.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Pabuaran</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,406,442,425.00	2,386,088,056.00	2,386,088,056.00	UPTD Puskesmas Pabuaran
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	702,579,000.00	947,643,000.00	1,028,322,133.00	UPTD Puskesmas Pabuaran
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	22,190,000.00	11,901,000.00	11,901,000.00	UPTD Puskesmas Pabuaran
<b>UPTD Puskesmas Bangbayang</b>	<b>1,199,231,926.00</b>	<b>1,266,706,018.00</b>	<b>1,329,846,018.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Bangbayang</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	509,224,926.00	475,876,018.00	475,876,018.00	UPTD Puskesmas Bangbayang
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	657,357,000.00	786,970,000.00	850,110,000.00	UPTD Puskesmas Bangbayang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	32,650,000.00	3,860,000.00	3,860,000.00	UPTD Puskesmas Bangbayang
<b>UPTD Puskesmas Tegalbuleud</b>	<b>1,863,204,240.00</b>	<b>1,827,133,016.00</b>	<b>1,945,011,216.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Tegalbuleud</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,221,988,240.00	1,255,927,016.00	1,255,927,016.00	UPTD Puskesmas Tegalbuleud
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	603,716,000.00	567,391,000.00	685,269,200.00	UPTD Puskesmas Tegalbuleud
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	37,500,000.00	3,815,000.00	3,815,000.00	UPTD Puskesmas Tegalbuleud
<b>UPTD Puskesmas Cibitung</b>	<b>2,325,234,861.00</b>	<b>2,303,765,159.00</b>	<b>2,401,555,159.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Cibitung</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,642,225,861.00	1,605,951,159.00	1,605,951,159.00	UPTD Puskesmas Cibitung
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	607,529,000.00	694,039,000.00	791,829,000.00	UPTD Puskesmas Cibitung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	75,480,000.00	3,775,000.00	3,775,000.00	UPTD Puskesmas Cibitung
<b>UPTD Puskesmas Surade</b>	<b>3,514,194,052.00</b>	<b>3,824,530,255.00</b>	<b>3,972,161,255.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Surade</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,627,660,052.00	2,665,192,255.00	2,665,192,255.00	UPTD Puskesmas Surade
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	826,240,000.00	1,155,418,000.00	1,303,049,000.00	UPTD Puskesmas Surade
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	60,294,000.00	3,920,000.00	3,920,000.00	UPTD Puskesmas Surade
<b>UPTD Puskesmas Buniwangi</b>	<b>2,426,647,662.00</b>	<b>2,560,838,651.00</b>	<b>2,714,596,651.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Buniwangi</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,639,326,662.00	1,666,467,651.00	1,666,467,651.00	UPTD Puskesmas Buniwangi
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	723,378,000.00	891,513,000.00	1,045,271,000.00	UPTD Puskesmas Buniwangi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	63,943,000.00	2,858,000.00	2,858,000.00	UPTD Puskesmas Buniwangi
<b>UPTD Puskesmas Ciracap</b>	<b>3,914,080,463.00</b>	<b>4,303,542,100.00</b>	<b>4,432,744,433.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Ciracap</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,950,278,463.00	3,039,175,100.00	3,039,175,100.00	UPTD Puskesmas Ciracap

Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	890,637,000.00	1,259,947,000.00	1,389,149,333.00	UPTD Puskesmas Ciracap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	73,165,000.00	4,420,000.00	4,420,000.00	UPTD Puskesmas Ciracap
<b>UPTD Puskesmas Ciemas</b>	<b>1,982,639,494.00</b>	<b>1,994,732,444.00</b>	<b>2,062,048,777.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Ciemas</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,353,136,494.00	1,396,032,944.00	1,396,032,944.00	UPTD Puskesmas Ciemas
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	605,898,000.00	594,867,500.00	662,183,833.00	UPTD Puskesmas Ciemas
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	23,605,000.00	3,832,000.00	3,832,000.00	UPTD Puskesmas Ciemas
<b>UPTD Puskesmas Tamanjaya</b>	<b>2,361,052,423.00</b>	<b>2,385,655,466.00</b>	<b>2,468,569,799.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Tamanjaya</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,513,273,423.00	1,487,739,466.00	1,487,739,466.00	UPTD Puskesmas Tamanjaya
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	840,206,000.00	891,152,000.00	974,066,333.00	UPTD Puskesmas Tamanjaya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7,573,000.00	6,764,000.00	6,764,000.00	UPTD Puskesmas Tamanjaya
<b>UPTD Puskesmas Waluran</b>	<b>2,322,234,925.00</b>	<b>2,514,051,156.00</b>	<b>2,608,976,023.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Waluran</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,596,810,925.00	1,555,279,156.00	1,555,279,156.00	UPTD Puskesmas Waluran
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	693,804,000.00	954,683,000.00	1,049,607,867.00	UPTD Puskesmas Waluran
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	31,620,000.00	4,089,000.00	4,089,000.00	UPTD Puskesmas Waluran
<b>UPTD Puskesmas Jampangkulon</b>	<b>4,436,763,939.00</b>	<b>4,828,513,698.00</b>	<b>5,033,638,765.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Jampangkulon</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,566,245,939.00	3,569,172,698.00	3,569,172,698.00	UPTD Puskesmas Jampangkulon
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	812,745,000.00	1,251,589,000.00	1,456,714,067.00	UPTD Puskesmas Jampangkulon
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	57,773,000.00	7,752,000.00	7,752,000.00	UPTD Puskesmas Jampangkulon
<b>UPTD Puskesmas Kalibunder</b>	<b>2,677,466,270.00</b>	<b>2,732,585,659.00</b>	<b>2,868,948,992.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Kalibunder</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,740,804,770.00	1,883,631,659.00	1,883,631,659.00	UPTD Puskesmas Kalibunder
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	890,835,500.00	845,745,000.00	982,108,333.00	UPTD Puskesmas Kalibunder
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	45,826,000.00	3,209,000.00	3,209,000.00	UPTD Puskesmas Kalibunder
<b>UPTD Puskesmas Cimanggu</b>	<b>2,317,651,604.00</b>	<b>2,194,426,834.00</b>	<b>2,262,839,501.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Cimanggu</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,575,367,604.00	1,569,229,834.00	1,569,229,834.00	UPTD Puskesmas Cimanggu
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	674,926,000.00	621,672,000.00	690,084,667.00	UPTD Puskesmas Cimanggu
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	67,358,000.00	3,525,000.00	3,525,000.00	UPTD Puskesmas Cimanggu
<b>UPTD Puskesmas Warungkiara</b>	<b>5,358,483,565.00</b>	<b>4,855,575,594.00</b>	<b>4,947,227,594.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Warungkiara</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,264,759,565.00	3,500,142,094.00	3,500,142,094.00	UPTD Puskesmas Warungkiara
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,027,364,000.00	1,350,301,500.00	1,441,953,500.00	UPTD Puskesmas Warungkiara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	66,360,000.00	5,132,000.00	5,132,000.00	UPTD Puskesmas Warungkiara
<b>UPTD Puskesmas Bantargadung</b>	<b>2,897,433,781.00</b>	<b>2,936,818,302.00</b>	<b>2,994,964,302.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Bantargadung</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,072,331,781.00	2,183,800,302.00	2,183,800,302.00	UPTD Puskesmas Bantargadung
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	772,602,000.00	748,755,000.00	806,901,000.00	UPTD Puskesmas Bantargadung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	52,500,000.00	4,263,000.00	4,263,000.00	UPTD Puskesmas Bantargadung
<b>UPTD Puskesmas Citarik</b>	<b>3,680,624,209.00</b>	<b>3,811,011,859.00</b>	<b>3,912,120,192.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Citarik</b>

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,917,053,209.00	3,040,992,859.00	3,040,992,859.00	UPTD Puskesmas Citarik
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	675,579,000.00	766,138,000.00	867,246,333.00	UPTD Puskesmas Citarik
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	87,992,000.00	3,881,000.00	3,881,000.00	UPTD Puskesmas Citarik
<b>UPTD Puskesmas Simpenan</b>	<b>4,218,265,392.00</b>	<b>5,017,182,234.00</b>	<b>5,174,228,501.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Simpenan</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,273,860,392.00	3,413,044,234.00	3,413,044,234.00	UPTD Puskesmas Simpenan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	891,660,000.00	1,594,988,000.00	1,752,034,267.00	UPTD Puskesmas Simpenan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	52,745,000.00	9,150,000.00	9,150,000.00	UPTD Puskesmas Simpenan
<b>UPTD Puskesmas Palabuhanratu</b>	<b>4,643,959,120.00</b>	<b>5,142,176,702.00</b>	<b>5,313,036,769.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Palabuhanratu</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,561,119,120.00	3,699,037,702.00	3,699,037,702.00	UPTD Puskesmas Palabuhanratu
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,048,790,000.00	1,415,788,000.00	1,586,648,067.00	UPTD Puskesmas Palabuhanratu
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	34,050,000.00	27,351,000.00	27,351,000.00	UPTD Puskesmas Palabuhanratu
<b>UPTD Puskesmas Cikakak</b>	<b>3,993,630,240.00</b>	<b>4,444,464,865.00</b>	<b>4,587,572,665.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Cikakak</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,198,171,240.00	3,425,864,865.00	3,425,864,865.00	UPTD Puskesmas Cikakak
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	744,569,000.00	1,015,945,000.00	1,159,052,800.00	UPTD Puskesmas Cikakak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	50,890,000.00	2,655,000.00	2,655,000.00	UPTD Puskesmas Cikakak
<b>UPTD Puskesmas Cisolok</b>	<b>6,325,721,574.00</b>	<b>6,298,838,292.00</b>	<b>6,451,534,425.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Cisolok</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,173,941,574.00	4,634,592,292.00	4,634,592,292.00	UPTD Puskesmas Cisolok
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,043,780,000.00	1,656,859,000.00	1,809,555,133.00	UPTD Puskesmas Cisolok
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	108,000,000.00	7,387,000.00	7,387,000.00	UPTD Puskesmas Cisolok
<b>UPTD Puskesmas Cikidang</b>	<b>5,252,353,898.00</b>	<b>5,405,620,929.00</b>	<b>5,587,271,262.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Cikidang</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,263,918,898.00	4,380,966,929.00	4,380,966,929.00	UPTD Puskesmas Cikidang
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	934,395,000.00	1,016,404,000.00	1,198,054,333.00	UPTD Puskesmas Cikidang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	54,040,000.00	8,250,000.00	8,250,000.00	UPTD Puskesmas Cikidang
<b>UPTD Puskesmas Kabandungan</b>	<b>4,610,464,090.00</b>	<b>4,686,664,935.00</b>	<b>4,788,026,268.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Kabandungan</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,674,997,090.00	3,536,969,935.00	3,536,969,935.00	UPTD Puskesmas Kabandungan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	873,987,000.00	1,138,505,000.00	1,239,866,333.00	UPTD Puskesmas Kabandungan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	61,480,000.00	11,190,000.00	11,190,000.00	UPTD Puskesmas Kabandungan
<b>UPTD Puskesmas Kalapanunggal</b>	<b>4,248,645,142.00</b>	<b>4,290,750,051.00</b>	<b>4,357,281,718.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Kalapanunggal</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,373,516,142.00	3,416,418,051.00	3,416,418,051.00	UPTD Puskesmas Kalapanunggal
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	815,229,000.00	870,531,000.00	937,062,667.00	UPTD Puskesmas Kalapanunggal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	59,900,000.00	3,801,000.00	3,801,000.00	UPTD Puskesmas Kalapanunggal
<b>UPTD Puskesmas Bojonggenteng</b>	<b>3,302,673,036.00</b>	<b>3,297,252,101.00</b>	<b>3,507,447,434.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Bojonggenteng</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,457,463,036.00	2,567,236,101.00	2,567,236,101.00	UPTD Puskesmas Bojonggenteng
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	774,281,000.00	728,420,000.00	938,615,333.00	UPTD Puskesmas Bojonggenteng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	70,929,000.00	1,596,000.00	1,596,000.00	UPTD Puskesmas Bojonggenteng

Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
<b>UPTD Puskesmas Parakansalak</b>	<b>3,611,752,928.00</b>	<b>3,582,886,015.00</b>	<b>3,703,757,682.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Parakansalak</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,652,881,928.00	2,632,819,015.00	2,632,819,015.00	UPTD Puskesmas Parakansalak
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	919,628,000.00	941,233,000.00	1,062,104,667.00	UPTD Puskesmas Parakansalak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	39,243,000.00	8,834,000.00	8,834,000.00	UPTD Puskesmas Parakansalak
<b>UPTD Puskesmas Parungkuda</b>	<b>4,964,743,450.00</b>	<b>4,882,531,065.00</b>	<b>5,160,365,398.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Parungkuda</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,265,613,330.00	3,604,922,065.00	3,604,922,065.00	UPTD Puskesmas Parungkuda
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,661,095,120.00	1,270,887,000.00	1,548,721,333.00	UPTD Puskesmas Parungkuda
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	38,035,000.00	6,722,000.00	6,722,000.00	UPTD Puskesmas Parungkuda
<b>UPTD Puskesmas Cidahu</b>	<b>4,502,357,464.00</b>	<b>5,250,239,470.00</b>	<b>5,537,882,503.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Cidahu</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,460,753,464.00	3,619,676,470.00	3,619,676,470.00	UPTD Puskesmas Cidahu
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	959,767,000.00	1,625,415,000.00	1,913,058,033.00	UPTD Puskesmas Cidahu
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	81,837,000.00	5,148,000.00	5,148,000.00	UPTD Puskesmas Cidahu
<b>UPTD Puskesmas Cicurug</b>	<b>5,647,820,778.00</b>	<b>6,670,271,655.00</b>	<b>7,183,777,322.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Cicurug</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,522,075,278.00	4,710,268,655.00	4,710,268,655.00	UPTD Puskesmas Cicurug
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,063,977,500.00	1,956,907,000.00	2,470,412,667.00	UPTD Puskesmas Cicurug
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	61,768,000.00	3,096,000.00	3,096,000.00	UPTD Puskesmas Cicurug
<b>UPTD Puskesmas Cipari</b>	<b>1,607,782,643.00</b>	<b>1,508,853,058.00</b>	<b>1,585,816,391.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Cipari</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	807,768,643.00	809,665,058.00	809,665,058.00	UPTD Puskesmas Cipari
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	787,931,000.00	695,229,000.00	772,192,333.00	UPTD Puskesmas Cipari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12,083,000.00	3,959,000.00	3,959,000.00	UPTD Puskesmas Cipari
<b>UPTD Puskesmas Ciambar</b>	<b>3,469,999,569.00</b>	<b>3,796,284,786.00</b>	<b>3,983,713,786.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Ciambar</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,749,363,569.00	2,796,107,786.00	2,796,107,786.00	UPTD Puskesmas Ciambar
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	672,566,000.00	995,639,000.00	1,183,068,000.00	UPTD Puskesmas Ciambar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	48,070,000.00	4,538,000.00	4,538,000.00	UPTD Puskesmas Ciambar
<b>UPTD Puskesmas Girijaya</b>	<b>2,400,196,678.00</b>	<b>2,383,426,016.00</b>	<b>2,428,669,016.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Girijaya</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,561,375,678.00	1,596,563,016.00	1,596,563,016.00	UPTD Puskesmas Girijaya
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	810,361,000.00	782,693,000.00	827,936,000.00	UPTD Puskesmas Girijaya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	28,460,000.00	4,170,000.00	4,170,000.00	UPTD Puskesmas Girijaya
<b>UPTD Puskesmas Nagrak</b>	<b>4,254,416,868.00</b>	<b>4,184,372,213.00</b>	<b>4,273,945,213.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Nagrak</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,366,495,868.00	3,359,333,213.00	3,359,333,213.00	UPTD Puskesmas Nagrak
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	848,088,000.00	818,469,000.00	908,042,000.00	UPTD Puskesmas Nagrak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	39,833,000.00	6,570,000.00	6,570,000.00	UPTD Puskesmas Nagrak
<b>UPTD Puskesmas Sekarwangi</b>	<b>4,290,164,950.00</b>	<b>3,863,191,421.00</b>	<b>4,012,633,754.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Sekarwangi</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,358,185,450.00	2,843,015,421.00	2,843,015,421.00	UPTD Puskesmas Sekarwangi
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	884,369,500.00	1,016,959,000.00	1,166,401,333.00	UPTD Puskesmas Sekarwangi

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	47,610,000.00	3,217,000.00	3,217,000.00	UPTD Puskesmas Sekarwangi
<b>UPTD Puskesmas Cibadak</b>	<b>3,115,720,814.00</b>	<b>3,264,733,950.00</b>	<b>3,381,363,283.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Cibadak</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,322,407,314.00	2,427,984,950.00	2,427,984,950.00	UPTD Puskesmas Cibadak
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	779,393,500.00	832,653,000.00	949,282,333.00	UPTD Puskesmas Cibadak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13,920,000.00	4,096,000.00	4,096,000.00	UPTD Puskesmas Cibadak
<b>UPTD Puskesmas Ciantayan</b>	<b>3,677,161,470.00</b>	<b>3,837,619,604.00</b>	<b>3,941,800,604.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Ciantayan</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,596,072,470.00	2,651,120,604.00	2,651,120,604.00	UPTD Puskesmas Ciantayan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	978,520,000.00	1,181,019,000.00	1,285,200,000.00	UPTD Puskesmas Ciantayan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	102,569,000.00	5,480,000.00	5,480,000.00	UPTD Puskesmas Ciantayan
<b>UPTD Puskesmas Caringin</b>	<b>3,613,201,268.00</b>	<b>3,986,069,370.00</b>	<b>4,126,651,570.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Caringin</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,669,354,268.00	2,677,876,370.00	2,677,876,370.00	UPTD Puskesmas Caringin
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	834,212,000.00	1,302,627,000.00	1,443,209,200.00	UPTD Puskesmas Caringin
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	109,635,000.00	5,566,000.00	5,566,000.00	UPTD Puskesmas Caringin
<b>UPTD Puskesmas Cisaat</b>	<b>5,284,950,731.00</b>	<b>5,647,458,451.00</b>	<b>5,990,138,518.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Cisaat</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,415,146,231.00	4,606,733,451.00	4,606,733,451.00	UPTD Puskesmas Cisaat
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	788,924,500.00	1,036,705,000.00	1,379,385,067.00	UPTD Puskesmas Cisaat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	80,880,000.00	4,020,000.00	4,020,000.00	UPTD Puskesmas Cisaat
<b>UPTD Puskesmas Selajambe</b>	<b>1,697,026,622.00</b>	<b>1,736,441,815.00</b>	<b>1,805,895,815.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Selajambe</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	991,257,622.00	1,027,078,815.00	1,027,078,815.00	UPTD Puskesmas Selajambe
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	677,631,000.00	699,691,000.00	769,145,000.00	UPTD Puskesmas Selajambe
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	28,138,000.00	9,672,000.00	9,672,000.00	UPTD Puskesmas Selajambe
<b>UPTD Puskesmas Cibolang</b>	<b>1,951,941,253.00</b>	<b>2,689,822,463.00</b>	<b>2,756,460,463.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Cibolang</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,109,403,253.00	1,125,837,463.00	1,125,837,463.00	UPTD Puskesmas Cibolang
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	774,538,000.00	1,561,720,000.00	1,628,358,000.00	UPTD Puskesmas Cibolang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	68,000,000.00	2,265,000.00	2,265,000.00	UPTD Puskesmas Cibolang
<b>UPTD Puskesmas Kadudampit</b>	<b>3,757,992,254.00</b>	<b>3,920,706,014.00</b>	<b>4,086,663,014.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Kadudampit</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,852,680,254.00	2,961,413,014.00	2,961,413,014.00	UPTD Puskesmas Kadudampit
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	868,628,000.00	954,154,000.00	1,120,111,000.00	UPTD Puskesmas Kadudampit
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	36,684,000.00	5,139,000.00	5,139,000.00	UPTD Puskesmas Kadudampit
<b>UPTD Puskesmas Lengkong</b>	<b>3,037,431,080.00</b>	<b>3,115,668,235.00</b>	<b>3,257,098,902.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Lengkong</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,272,501,080.00	2,222,530,235.00	2,222,530,235.00	UPTD Puskesmas Lengkong
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	715,416,000.00	888,569,000.00	1,029,999,667.00	UPTD Puskesmas Lengkong
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	49,514,000.00	4,569,000.00	4,569,000.00	UPTD Puskesmas Lengkong
<b>UPTD Puskesmas Jampangtengah</b>	<b>4,199,893,368.00</b>	<b>4,551,235,333.00</b>	<b>4,750,214,333.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Jampangtengah</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,249,909,368.00	3,382,755,333.00	3,382,755,333.00	UPTD Puskesmas Jampangtengah

Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	902,970,000.00	1,166,145,000.00	1,365,124,000.00	UPTD Puskesmas Jampangtengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	47,014,000.00	2,335,000.00	2,335,000.00	UPTD Puskesmas Jampangtengah
<b>UPTD Puskesmas Gunungguruh</b>	<b>2,467,516,974.00</b>	<b>2,780,154,516.00</b>	<b>2,884,746,183.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Gunungguruh</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,670,277,974.00	1,716,959,516.00	1,716,959,516.00	UPTD Puskesmas Gunungguruh
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	751,420,000.00	1,059,408,000.00	1,163,999,667.00	UPTD Puskesmas Gunungguruh
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	45,819,000.00	3,787,000.00	3,787,000.00	UPTD Puskesmas Gunungguruh
<b>UPTD Puskesmas Cikembar</b>	<b>3,890,380,703.00</b>	<b>4,416,874,668.00</b>	<b>4,659,209,068.00</b>	<b>UPTD Puskesmas Cikembar</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,839,697,703.00	2,915,053,668.00	2,915,053,668.00	UPTD Puskesmas Cikembar
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	975,235,000.00	1,493,629,000.00	1,735,963,400.00	UPTD Puskesmas Cikembar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	75,448,000.00	8,192,000.00	8,192,000.00	UPTD Puskesmas Cikembar
<b>UPTD Gudang Farmasi</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>UPTD Gudang Farmasi</b>
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	150,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	UPTD Gudang Farmasi
<b>UPTD Klinik Kesehatan Daerah dan Laboratorium Kesehatan Daerah</b>	<b>1,360,049,756.00</b>	<b>1,531,074,318.00</b>	<b>1,531,074,318.00</b>	<b>UPTD Laboratorium dan Klinik Kesehatan Daerah</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,260,049,756.00	1,531,074,318.00	1,531,074,318.00	UPTD Klinik Kesehatan Daerah dan Laboratorium Kesehatan Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100,000,000.00	0.00	0.00	UPTD Klinik Kesehatan Daerah dan Laboratorium Kesehatan Daerah
<b>UPTD RSUD Sagaranten</b>	<b>13,305,920,145.00</b>	<b>26,377,264,625.00</b>	<b>26,275,489,257.00</b>	<b>UPTD RSUD Sagaranten</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,106,815,800.00	10,340,064,625.00	10,340,064,625.00	UPTD RSUD Sagaranten
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2,199,104,345.00	16,037,200,000.00	15,935,424,632.00	UPTD RSUD Sagaranten
<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>	<b>186,718,649,514.00</b>	<b>204,301,787,192.00</b>	<b>173,773,776,301.00</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34,433,273,534.00	38,512,223,499.00	39,911,198,135.00	Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	29,828,299,155.00	43,631,753,000.00	21,387,442,097.00	Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	122,266,280,817.00	121,967,014,685.00	111,974,340,061.00	Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	190,796,008.00	190,796,008.00	500,796,008.00	Dinas Pekerjaan Umum
<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>236,791,471,571.00</b>	<b>262,625,606,716.00</b>	<b>264,651,707,448.00</b>	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16,256,046,995.00	14,137,618,531.00	14,306,116,891.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	30,900,000,000.00	28,054,549,000.00	28,628,490,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	8,174,071,300.00	988,265,600.00	979,265,600.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3,225,475,000.00	2,564,750,000.00	2,449,999,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	77,593,569,474.00	30,516,779,250.00	31,800,634,250.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	26,175,828,802.00	129,632,895,611.00	130,684,345,047.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	7,100,000,000.00	1,714,055,633.00	1,677,539,433.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	22,580,019,200.00	27,293,831,476.00	26,107,366,812.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	16,000,000,000.00	16,130,000,000.00	15,946,144,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	28,786,460,800.00	11,592,861,615.00	12,071,806,415.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>	<b>31,377,633,235.00</b>	<b>19,775,261,455.00</b>	<b>19,717,558,825.00</b>	<b>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17,899,666,635.00	15,954,377,655.00	15,945,185,025.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	13,477,966,600.00	3,820,883,800.00	3,772,373,800.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>25,315,500,000.00</b>	<b>10,137,638,994.00</b>	<b>10,538,620,207.00</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,157,940,000.00	6,687,838,894.00	7,458,052,607.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	16,157,560,000.00	3,449,800,100.00	3,080,567,600.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>11,158,950,570.00</b>	<b>12,309,471,359.00</b>	<b>13,003,316,108.00</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,978,335,570.00	10,484,731,359.00	11,580,875,108.00	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,180,615,000.00	1,824,740,000.00	1,422,441,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>Dinas Sosial</b>	<b>29,950,210,755.00</b>	<b>14,450,480,066.00</b>	<b>15,669,743,869.00</b>	<b>Dinas Sosial</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,367,070,315.00	6,117,465,826.00	6,351,124,829.00	Dinas Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2,332,499,000.00	2,006,099,000.00	1,843,931,800.00	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	5,425,000.00	5,425,000.00	3,110,000.00	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	14,858,110,000.00	2,005,337,000.00	3,061,785,000.00	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2,940,000,000.00	3,445,594,000.00	3,050,768,000.00	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3,354,000,000.00	863,452,800.00	1,352,622,800.00	Dinas Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	93,106,440.00	7,106,440.00	6,401,440.00	Dinas Sosial
<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>13,328,880,254.00</b>	<b>15,671,977,353.00</b>	<b>15,542,865,994.00</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,853,707,254.00	10,488,693,353.00	10,683,165,494.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	20,000,000.00	0.00	0.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	816,453,200.00	1,682,200,000.00	1,641,688,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1,125,719,800.00	3,021,300,000.00	2,700,642,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	310,000,000.00	305,000,000.00	376,087,500.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	130,000,000.00	115,736,000.00	94,667,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	73,000,000.00	59,048,000.00	46,616,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>10,371,329,411.00</b>	<b>10,810,312,381.00</b>	<b>10,329,773,896.00</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,176,329,411.00	6,355,642,781.00	6,936,975,296.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	325,000,000.00	235,000,000.00	235,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	300,000,000.00	227,535,000.00	253,960,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2,950,000,000.00	2,847,500,000.00	1,701,709,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	235,000,000.00	330,529,600.00	330,529,600.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	295,000,000.00	724,105,000.00	781,600,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>	<b>13,102,699,214.00</b>	<b>8,085,936,013.00</b>	<b>9,400,807,000.00</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,874,695,714.00	6,395,714,013.00	7,405,565,600.00	Dinas Ketahanan Pangan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	255,000,000.00	185,000,000.00	316,000,000.00	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	4,687,142,500.00	1,192,522,000.00	1,107,773,000.00	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	345,000,000.00	78,500,000.00	117,700,000.00	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	940,861,000.00	234,200,000.00	453,768,400.00	Dinas Ketahanan Pangan
<b>Dinas Pertanian dan Tata Ruang</b>	<b>15,060,412,532.00</b>	<b>11,950,941,368.00</b>	<b>12,207,824,152.00</b>	<b>Dinas Pertanian dan Tata Ruang</b>
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,500,000,000.00	312,500,000.00	245,242,000.00	Dinas Pertanian dan Tata Ruang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,549,412,532.00	5,068,332,368.00	5,657,410,152.00	Dinas Pertanian dan Tata Ruang
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	250,000,000.00	200,000,000.00	166,811,000.00	Dinas Pertanian dan Tata Ruang
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	6,061,000,000.00	5,631,000,000.00	5,476,514,000.00	Dinas Pertanian dan Tata Ruang
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	100,000,000.00	50,000,000.00	37,883,000.00	Dinas Pertanian dan Tata Ruang
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	100,000,000.00	0.00	0.00	Dinas Pertanian dan Tata Ruang
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1,500,000,000.00	689,109,000.00	623,964,000.00	Dinas Pertanian dan Tata Ruang
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>37,224,130,210.00</b>	<b>58,751,148,485.00</b>	<b>61,100,485,204.00</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0.00	0.00	0.00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21,409,202,830.00	17,812,942,485.00	18,519,521,204.00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	370,000,000.00	340,000,000.00	315,640,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	695,769,500.00	853,700,000.00	1,205,641,500.00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	163,000,000.00	638,000,000.00	624,757,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	22,000,000.00	22,000,000.00	4,803,500.00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	65,000,000.00	78,500,000.00	71,510,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	40,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	50,000,000.00	36,700,000.00	35,030,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	20,000,000.00	20,000,000.00	19,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	14,376,657,880.00	38,876,806,000.00	40,232,082,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>19,455,642,235.00</b>	<b>19,768,438,926.00</b>	<b>19,543,551,282.00</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,175,893,235.00	18,191,495,926.00	18,534,896,082.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	302,891,000.00	181,807,000.00	105,438,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	420,398,000.00	332,557,000.00	272,558,200.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	459,462,000.00	1,016,769,000.00	584,849,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	96,998,000.00	45,810,000.00	45,810,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>24,299,274,008.00</b>	<b>21,619,265,594.00</b>	<b>21,552,620,028.00</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,523,274,008.00	8,349,428,994.00	8,865,255,228.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENATAAN DESA	300,000,000.00	361,847,600.00	273,240,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	150,000,000.00	135,000,000.00	61,140,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1,566,000,000.00	406,500,000.00	240,261,800.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	13,760,000,000.00	12,366,489,000.00	12,112,723,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>55,719,696,761.00</b>	<b>54,483,159,715.00</b>	<b>54,854,070,715.00</b>	<b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25,570,776,761.00	27,794,859,715.00	28,224,139,715.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	965,920,000.00	1,064,314,000.00	1,107,274,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	15,703,000,000.00	13,802,786,000.00	13,788,457,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	13,480,000,000.00	11,821,200,000.00	11,734,200,000.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>59,566,796,567.00</b>	<b>56,892,721,057.00</b>	<b>57,242,518,769.00</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37,180,989,096.00	20,239,843,857.00	21,109,174,369.00	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	21,015,807,771.00	35,852,877,200.00	35,364,674,400.00	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1,369,999,700.00	800,000,000.00	768,670,000.00	Dinas Perhubungan
<b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian</b>	<b>17,574,786,278.00</b>	<b>19,230,855,341.00</b>	<b>19,020,321,235.00</b>	<b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,446,226,278.00	11,337,028,841.00	11,789,691,135.00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4,258,560,000.00	6,365,160,000.00	6,021,992,000.00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2,335,000,000.00	1,100,000,000.00	872,250,000.00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	225,000,000.00	142,318,000.00	142,318,000.00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	310,000,000.00	286,348,500.00	194,070,100.00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>12,401,529,423.00</b>	<b>11,677,027,318.00</b>	<b>12,993,999,261.00</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,239,529,423.00	8,435,787,318.00	9,428,529,561.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	125,000,000.00	43,758,000.00	34,358,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	300,000,000.00	98,992,000.00	135,551,900.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	400,000,000.00	42,250,000.00	24,982,800.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	312,000,000.00	412,000,000.00	398,180,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	825,000,000.00	405,000,000.00	1,113,820,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1,550,000,000.00	1,389,240,000.00	1,206,492,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	650,000,000.00	850,000,000.00	652,085,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>13,423,999,082.00</b>	<b>7,592,760,695.00</b>	<b>8,235,559,881.00</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,558,820,082.00	6,642,499,895.00	7,516,079,281.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	587,500,000.00	85,702,000.00	5,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1,700,000,000.00	280,000,000.00	180,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	700,000,000.00	354,934,800.00	319,464,600.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	777,679,000.00	209,624,000.00	195,016,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga</b>	<b>36,551,937,958.00</b>	<b>36,013,635,117.00</b>	<b>35,462,237,251.00</b>	<b>Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga</b>
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3,350,000,000.00	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	18,433,000,000.00	20,851,968,000.00	20,458,974,800.00	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1,872,440,000.00	1,427,440,000.00	1,427,440,000.00	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,596,497,958.00	9,138,271,117.00	8,754,866,451.00	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,300,000,000.00	1,110,000,000.00	1,335,000,000.00	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	100,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	200,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	250,000,000.00	197,162,000.00	197,162,000.00	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1,450,000,000.00	1,383,794,000.00	1,383,794,000.00	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
<b>Dinas Arsip dan Perpustakaan</b>	<b>12,441,682,524.00</b>	<b>12,052,675,162.00</b>	<b>13,075,537,644.00</b>	<b>Dinas Arsip dan Perpustakaan</b>
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1,200,000,000.00	1,144,997,000.00	1,144,997,000.00	Dinas Arsip dan Perpustakaan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	300,000,000.00	282,512,000.00	282,512,000.00	Dinas Arsip dan Perpustakaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,634,532,835.00	10,180,961,462.00	11,349,483,394.00	Dinas Arsip dan Perpustakaan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	700,000,000.00	277,159,600.00	177,347,950.00	Dinas Arsip dan Perpustakaan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	607,149,689.00	167,045,100.00	121,197,300.00	Dinas Arsip dan Perpustakaan
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	0.00	0.00	0.00	Dinas Arsip dan Perpustakaan
<b>Dinas Perikanan</b>	<b>36,643,239,772.00</b>	<b>21,223,736,644.00</b>	<b>25,864,711,466.00</b>	<b>Dinas Perikanan</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,865,159,863.00	9,328,580,344.00	9,868,340,666.00	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	10,644,093,601.00	8,640,880,000.00	9,618,008,600.00	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	10,478,986,308.00	2,547,458,100.00	5,500,366,200.00	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	325,000,000.00	16,000,000.00	40,832,000.00	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	4,330,000,000.00	690,818,200.00	837,164,000.00	Dinas Perikanan
<b>Dinas Pariwisata</b>	<b>19,836,178,578.00</b>	<b>13,792,673,276.00</b>	<b>17,154,052,195.00</b>	<b>Dinas Pariwisata</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,189,887,578.00	9,422,673,276.00	11,411,563,695.00	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5,474,000,000.00	1,050,000,000.00	740,700,000.00	Dinas Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	6,097,758,000.00	2,720,000,000.00	3,772,827,500.00	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	150,000,000.00	150,000,000.00	650,000,000.00	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	924,533,000.00	450,000,000.00	578,961,000.00	Dinas Pariwisata
<b>Dinas Peternakan</b>	<b>22,398,068,440.00</b>	<b>14,899,029,651.00</b>	<b>15,081,808,518.00</b>	<b>Dinas Peternakan</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,372,592,140.00	9,860,521,651.00	10,489,386,518.00	Dinas Peternakan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4,734,372,000.00	3,662,752,000.00	3,516,050,900.00	Dinas Peternakan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5,164,743,300.00	435,000,000.00	360,000,000.00	Dinas Peternakan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1,846,581,000.00	772,556,000.00	552,046,100.00	Dinas Peternakan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	50,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	Dinas Peternakan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	43,200,000.00	31,575,000.00	27,700,000.00	Dinas Peternakan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	186,580,000.00	111,625,000.00	111,625,000.00	Dinas Peternakan
<b>Dinas Pertanian</b>	<b>132,761,856,696.00</b>	<b>53,150,984,242.00</b>	<b>60,572,989,672.00</b>	<b>Dinas Pertanian</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41,986,856,696.00	29,234,753,742.00	32,093,319,172.00	Dinas Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	17,825,000,000.00	3,152,720,000.00	3,430,820,000.00	Dinas Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	61,400,000,000.00	17,805,000,000.00	21,515,122,000.00	Dinas Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1,550,000,000.00	211,010,500.00	176,010,500.00	Dinas Pertanian
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	900,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	Dinas Pertanian

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	9,100,000,000.00	2,647,500,000.00	3,257,718,000.00	Dinas Pertanian
<b>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>39,965,264,072.00</b>	<b>30,160,420,262.00</b>	<b>35,874,021,263.00</b>	<b>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</b>
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	200,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	250,000,000.00	180,000,000.00	104,600,000.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	7,314,053,000.00	4,242,185,500.00	4,974,778,000.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	750,000,000.00	450,000,000.00	280,746,500.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	950,000,000.00	400,000,000.00	256,280,000.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	908,611,000.00	690,200,000.00	622,377,500.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	600,000,000.00	280,000,000.00	251,007,000.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23,022,600,072.00	20,658,133,462.00	22,958,498,363.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4,820,000,000.00	1,966,372,800.00	5,034,485,400.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	250,000,000.00	125,000,000.00	196,163,000.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	900,000,000.00	568,528,500.00	595,085,500.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>96,328,414,907.00</b>	<b>107,332,505,420.00</b>	<b>106,300,006,618.00</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	69,638,657,907.00	60,209,792,420.00	61,916,579,818.00	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	21,254,312,000.00	41,458,095,000.00	40,144,576,700.00	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	5,435,445,000.00	5,664,618,000.00	4,238,850,100.00	Sekretariat Daerah
<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>59,228,048,551.00</b>	<b>87,894,068,289.00</b>	<b>89,381,390,716.00</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41,789,527,501.00	54,937,417,369.00	53,109,239,996.00	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	17,438,521,050.00	32,956,650,920.00	36,272,150,720.00	Sekretariat DPRD
<b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>24,090,000,000.00</b>	<b>20,934,908,811.00</b>	<b>20,581,713,787.00</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,600,000,000.00	14,227,645,944.00	15,167,433,876.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3,125,000,000.00	2,441,236,200.00	2,267,765,775.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5,365,000,000.00	2,926,418,667.00	2,011,776,136.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2,000,000,000.00	1,339,608,000.00	1,134,738,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
<b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>759,783,862,194.00</b>	<b>871,881,595,361.00</b>	<b>849,407,053,640.00</b>	<b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65,639,231,543.00	80,795,978,978.00	83,674,737,452.00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	690,246,630,851.00	789,382,883,485.00	764,215,378,290.00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3,897,999,800.00	1,702,732,898.00	1,516,937,898.00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>36,604,655,010.00</b>	<b>34,693,708,447.00</b>	<b>32,683,774,818.00</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26,398,276,810.00	25,670,618,147.00	25,809,703,518.00	Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10,206,378,200.00	9,023,090,300.00	6,874,071,300.00	Badan Pendapatan Daerah
<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>23,959,111,872.00</b>	<b>26,447,073,239.00</b>	<b>26,842,446,893.00</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14,082,296,272.00	17,223,555,439.00	18,844,532,493.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6,701,815,600.00	6,121,843,000.00	5,290,598,400.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3,175,000,000.00	3,101,674,800.00	2,707,316,000.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>Inspektorat</b>	<b>21,008,411,147.00</b>	<b>28,426,605,123.00</b>	<b>23,980,187,123.00</b>	<b>Inspektorat</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,144,301,147.00	17,346,605,123.00	17,407,723,123.00	Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4,605,500,000.00	9,692,912,000.00	5,927,677,500.00	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1,258,610,000.00	1,387,088,000.00	644,786,500.00	Inspektorat
<b>Kecamatan Bantargadung</b>	<b>2,579,806,221.00</b>	<b>2,820,824,273.00</b>	<b>3,071,040,850.00</b>	<b>Kecamatan Bantargadung</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,494,806,221.00	2,730,824,273.00	2,981,040,850.00	Kecamatan Bantargadung
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Bantargadung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Bantargadung
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Bantargadung
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Bantargadung
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Bantargadung
<b>Kecamatan Bojonggenteng</b>	<b>2,184,628,705.00</b>	<b>2,500,508,031.00</b>	<b>2,724,385,116.00</b>	<b>Kecamatan Bojonggenteng</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,145,878,705.00	2,441,598,031.00	2,665,475,116.00	Kecamatan Bojonggenteng
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6,000,000.00	26,160,000.00	26,160,000.00	Kecamatan Bojonggenteng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14,750,000.00	14,750,000.00	14,750,000.00	Kecamatan Bojonggenteng
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	Kecamatan Bojonggenteng
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	Kecamatan Bojonggenteng
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	Kecamatan Bojonggenteng
<b>Kecamatan Caringin</b>	<b>2,938,181,885.00</b>	<b>3,157,443,913.00</b>	<b>3,179,737,721.00</b>	<b>Kecamatan Caringin</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,855,981,885.00	3,067,443,913.00	3,089,737,721.00	Kecamatan Caringin
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Caringin
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Caringin
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22,200,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Caringin
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Caringin
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Caringin
<b>Kecamatan Ciambar</b>	<b>2,448,406,918.00</b>	<b>2,634,274,662.00</b>	<b>2,730,924,817.00</b>	<b>Kecamatan Ciambar</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,384,126,918.00	2,552,974,662.00	2,649,624,817.00	Kecamatan Ciambar
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8,520,000.00	28,520,000.00	28,520,000.00	Kecamatan Ciambar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14,100,000.00	14,160,000.00	14,160,000.00	Kecamatan Ciambar
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15,720,000.00	14,830,000.00	14,830,000.00	Kecamatan Ciambar
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17,420,000.00	15,010,000.00	15,010,000.00	Kecamatan Ciambar
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8,520,000.00	8,780,000.00	8,780,000.00	Kecamatan Ciambar
<b>Kecamatan Cibadak</b>	<b>5,123,186,387.00</b>	<b>5,146,414,503.00</b>	<b>5,314,262,572.00</b>	<b>Kecamatan Cibadak</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,184,686,387.00	4,161,414,503.00	4,329,262,572.00	Kecamatan Cibadak
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	Kecamatan Cibadak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	863,500,000.00	910,000,000.00	910,000,000.00	Kecamatan Cibadak

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cibadak
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	Kecamatan Cibadak
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cibadak
<b>Kecamatan Cibitung</b>	<b>2,627,308,243.00</b>	<b>3,085,655,047.00</b>	<b>3,285,023,110.00</b>	<b>Kecamatan Cibitung</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,555,308,243.00	3,010,655,047.00	3,210,023,110.00	Kecamatan Cibitung
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Cibitung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Kecamatan Cibitung
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cibitung
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Kecamatan Cibitung
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Kecamatan Cibitung
<b>Kecamatan Cicantayan</b>	<b>2,855,560,716.00</b>	<b>3,027,042,317.00</b>	<b>3,227,057,621.00</b>	<b>Kecamatan Cicantayan</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,785,560,716.00	2,937,042,317.00	3,137,057,621.00	Kecamatan Cicantayan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Cicantayan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cicantayan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cicantayan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cicantayan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cicantayan
<b>Kecamatan Cicurug</b>	<b>5,204,547,385.00</b>	<b>5,092,628,651.00</b>	<b>5,369,496,303.00</b>	<b>Kecamatan Cicurug</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,180,642,945.00	4,102,468,651.00	4,379,336,303.00	Kecamatan Cicurug
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15,540,000.00	30,160,000.00	30,160,000.00	Kecamatan Cicurug
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	924,904,440.00	915,000,000.00	915,000,000.00	Kecamatan Cicurug
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	36,840,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cicurug
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,540,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cicurug
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31,080,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cicurug
<b>Kecamatan Cidadap</b>	<b>2,373,312,551.00</b>	<b>2,762,366,903.00</b>	<b>3,023,310,615.00</b>	<b>Kecamatan Cidadap</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,295,616,551.00	2,677,510,903.00	2,938,454,615.00	Kecamatan Cidadap
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15,018,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Cidadap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16,028,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cidadap
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21,794,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cidadap
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12,428,000.00	12,428,000.00	12,428,000.00	Kecamatan Cidadap
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12,428,000.00	12,428,000.00	12,428,000.00	Kecamatan Cidadap
<b>Kecamatan Cidahu</b>	<b>2,365,836,625.00</b>	<b>2,554,862,042.00</b>	<b>2,867,146,548.00</b>	<b>Kecamatan Cidahu</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,290,836,625.00	2,464,862,042.00	2,777,146,548.00	Kecamatan Cidahu
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Cidahu
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cidahu
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cidahu
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cidahu
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cidahu
<b>Kecamatan Cidolog</b>	<b>2,519,106,698.00</b>	<b>2,660,526,882.00</b>	<b>2,766,046,522.00</b>	<b>Kecamatan Cidolog</b>

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,469,106,698.00	2,590,541,882.00	2,696,061,522.00	Kecamatan Cidolog
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,000,000.00	28,368,000.00	28,368,000.00	Kecamatan Cidolog
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10,000,000.00	9,073,000.00	9,073,000.00	Kecamatan Cidolog
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10,000,000.00	15,568,000.00	15,568,000.00	Kecamatan Cidolog
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10,000,000.00	8,248,000.00	8,248,000.00	Kecamatan Cidolog
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10,000,000.00	8,728,000.00	8,728,000.00	Kecamatan Cidolog
<b>Kecamatan Ciemas</b>	<b>2,454,672,526.00</b>	<b>2,356,298,985.00</b>	<b>2,435,964,534.00</b>	<b>Kecamatan Ciemas</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,373,782,526.00	2,270,408,985.00	2,350,074,534.00	Kecamatan Ciemas
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9,930,000.00	29,930,000.00	29,930,000.00	Kecamatan Ciemas
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Ciemas
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Ciemas
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10,960,000.00	10,960,000.00	10,960,000.00	Kecamatan Ciemas
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Ciemas
<b>Kecamatan Cikakak</b>	<b>2,394,298,148.00</b>	<b>2,329,486,285.00</b>	<b>2,669,293,016.00</b>	<b>Kecamatan Cikakak</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,314,148,148.00	2,239,486,285.00	2,579,293,016.00	Kecamatan Cikakak
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Cikakak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16,275,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cikakak
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23,875,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cikakak
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cikakak
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cikakak
<b>Kecamatan Cikembar</b>	<b>2,920,579,079.00</b>	<b>3,019,035,709.00</b>	<b>3,217,817,278.00</b>	<b>Kecamatan Cikembar</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,835,579,079.00	2,929,035,709.00	3,127,817,278.00	Kecamatan Cikembar
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Cikembar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cikembar
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cikembar
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cikembar
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cikembar
<b>Kecamatan Cikidang</b>	<b>2,930,616,472.00</b>	<b>3,076,219,375.00</b>	<b>3,312,423,563.00</b>	<b>Kecamatan Cikidang</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,845,616,472.00	2,988,519,375.00	3,224,723,563.00	Kecamatan Cikidang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,000,000.00	28,800,000.00	28,800,000.00	Kecamatan Cikidang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,000,000.00	14,200,000.00	14,200,000.00	Kecamatan Cikidang
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cikidang
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cikidang
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	14,700,000.00	14,700,000.00	Kecamatan Cikidang
<b>Kecamatan Cimanggu</b>	<b>2,832,219,083.00</b>	<b>3,100,024,684.00</b>	<b>3,139,183,309.00</b>	<b>Kecamatan Cimanggu</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,742,219,083.00	3,010,024,684.00	3,049,183,309.00	Kecamatan Cimanggu
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Cimanggu
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cimanggu
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cimanggu

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cimanggu
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cimanggu
<b>Kecamatan Ciracap</b>	<b>2,915,659,060.00</b>	<b>3,153,004,220.00</b>	<b>3,350,680,282.00</b>	<b>Kecamatan Ciracap</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,830,659,060.00	3,063,004,220.00	3,260,680,282.00	Kecamatan Ciracap
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Ciracap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Ciracap
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Ciracap
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Ciracap
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Ciracap
<b>Kecamatan Cireunghas</b>	<b>3,326,745,126.00</b>	<b>3,191,672,596.00</b>	<b>3,239,010,281.00</b>	<b>Kecamatan Cireunghas</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,248,564,126.00	3,101,709,596.00	3,149,047,281.00	Kecamatan Cireunghas
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9,976,000.00	29,976,000.00	29,976,000.00	Kecamatan Cireunghas
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14,999,000.00	14,999,000.00	14,999,000.00	Kecamatan Cireunghas
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23,192,000.00	14,997,000.00	14,997,000.00	Kecamatan Cireunghas
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,004,000.00	14,992,000.00	14,992,000.00	Kecamatan Cireunghas
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,010,000.00	14,999,000.00	14,999,000.00	Kecamatan Cireunghas
<b>Kecamatan Cisaat</b>	<b>3,244,715,951.00</b>	<b>3,493,185,805.00</b>	<b>3,751,609,587.00</b>	<b>Kecamatan Cisaat</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,209,715,951.00	3,413,185,805.00	3,671,609,587.00	Kecamatan Cisaat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	Kecamatan Cisaat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Kecamatan Cisaat
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	Kecamatan Cisaat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Kecamatan Cisaat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	Kecamatan Cisaat
<b>Kecamatan Cisolak</b>	<b>2,442,259,754.00</b>	<b>2,783,516,343.00</b>	<b>2,918,329,728.00</b>	<b>Kecamatan Cisolak</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,366,659,754.00	2,695,116,343.00	2,829,929,728.00	Kecamatan Cisolak
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Cisolak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cisolak
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22,200,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Cisolak
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14,200,000.00	14,200,000.00	14,200,000.00	Kecamatan Cisolak
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14,200,000.00	14,200,000.00	14,200,000.00	Kecamatan Cisolak
<b>Kecamatan Curugkembar</b>	<b>3,151,183,116.00</b>	<b>2,710,267,850.00</b>	<b>2,750,426,486.00</b>	<b>Kecamatan Curugkembar</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,056,183,116.00	2,620,267,850.00	2,660,426,486.00	Kecamatan Curugkembar
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15,000,000.00	32,500,000.00	32,500,000.00	Kecamatan Curugkembar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Curugkembar
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25,000,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	Kecamatan Curugkembar
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,000,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	Kecamatan Curugkembar
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	Kecamatan Curugkembar
<b>Kecamatan Gegerbitung</b>	<b>2,296,902,993.00</b>	<b>2,516,330,866.00</b>	<b>2,516,330,866.00</b>	<b>Kecamatan Gegerbitung</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,226,902,993.00	2,426,330,866.00	2,426,330,866.00	Kecamatan Gegerbitung

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Gegerbitung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Gegerbitung
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Gegerbitung
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Gegerbitung
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Gegerbitung
<b>Kecamatan Gunungguruh</b>	<b>2,787,349,057.00</b>	<b>3,222,790,946.00</b>	<b>3,453,762,055.00</b>	<b>Kecamatan Gunungguruh</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,714,063,057.00	3,140,706,946.00	3,371,678,055.00	Kecamatan Gunungguruh
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8,500,000.00	28,500,000.00	28,500,000.00	Kecamatan Gunungguruh
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17,584,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Gunungguruh
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19,950,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Gunungguruh
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18,668,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Gunungguruh
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8,584,000.00	8,584,000.00	8,584,000.00	Kecamatan Gunungguruh
<b>Kecamatan Jampang Kulon</b>	<b>5,333,211,035.00</b>	<b>5,274,358,518.00</b>	<b>5,534,276,013.00</b>	<b>Kecamatan Jampang Kulon</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,348,211,035.00	4,284,358,518.00	4,544,276,013.00	Kecamatan Jampang Kulon
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Jampang Kulon
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	915,000,000.00	915,000,000.00	915,000,000.00	Kecamatan Jampang Kulon
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Jampang Kulon
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Jampang Kulon
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Jampang Kulon
<b>Kecamatan Jampang Tengah</b>	<b>2,384,651,795.00</b>	<b>2,301,164,936.00</b>	<b>2,668,803,110.00</b>	<b>Kecamatan Jampang Tengah</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,299,678,795.00	2,211,191,936.00	2,578,830,110.00	Kecamatan Jampang Tengah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Jampang Tengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Jampang Tengah
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Jampang Tengah
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Jampang Tengah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14,973,000.00	14,973,000.00	14,973,000.00	Kecamatan Jampang Tengah
<b>Kecamatan Kabandungan</b>	<b>2,694,428,588.00</b>	<b>2,695,063,017.00</b>	<b>2,831,756,725.00</b>	<b>Kecamatan Kabandungan</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,614,428,588.00	2,620,063,017.00	2,756,756,725.00	Kecamatan Kabandungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Kabandungan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Kabandungan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Kecamatan Kabandungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Kecamatan Kabandungan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Kecamatan Kabandungan
<b>Kecamatan Kadudampit</b>	<b>2,411,577,190.00</b>	<b>2,354,433,356.00</b>	<b>2,904,710,717.00</b>	<b>Kecamatan Kadudampit</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,332,064,190.00	2,265,070,356.00	2,815,347,717.00	Kecamatan Kadudampit
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Kadudampit
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Kadudampit
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25,150,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Kadudampit
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14,363,000.00	14,363,000.00	14,363,000.00	Kecamatan Kadudampit

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Kadudampit
<b>Kecamatan Kalapanunggal</b>	<b>2,535,935,554.00</b>	<b>2,912,676,012.00</b>	<b>3,096,726,963.00</b>	<b>Kecamatan Kalapanunggal</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,477,635,554.00	2,840,576,012.00	3,024,626,963.00	Kecamatan Kalapanunggal
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	Kecamatan Kalapanunggal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	Kecamatan Kalapanunggal
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21,200,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Kalapanunggal
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	Kecamatan Kalapanunggal
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	Kecamatan Kalapanunggal
<b>Kecamatan Kalibunder</b>	<b>2,386,694,612.00</b>	<b>2,636,125,010.00</b>	<b>2,713,201,621.00</b>	<b>Kecamatan Kalibunder</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,301,694,612.00	2,546,125,010.00	2,623,201,621.00	Kecamatan Kalibunder
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Kalibunder
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Kalibunder
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Kalibunder
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Kalibunder
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Kalibunder
<b>Kecamatan Kebonpedes</b>	<b>3,004,923,782.00</b>	<b>2,935,726,554.00</b>	<b>3,114,958,169.00</b>	<b>Kecamatan Kebonpedes</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,948,923,782.00	2,865,226,554.00	3,044,458,169.00	Kecamatan Kebonpedes
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	Kecamatan Kebonpedes
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,500,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Kebonpedes
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Kebonpedes
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	Kecamatan Kebonpedes
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Kecamatan Kebonpedes
<b>Kecamatan Lengkong</b>	<b>2,234,046,742.00</b>	<b>2,656,320,269.00</b>	<b>2,747,915,310.00</b>	<b>Kecamatan Lengkong</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,156,846,742.00	2,566,320,269.00	2,657,915,310.00	Kecamatan Lengkong
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Lengkong
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Lengkong
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22,200,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Lengkong
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Lengkong
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Lengkong
<b>Kecamatan Nagrak</b>	<b>2,817,205,782.00</b>	<b>3,217,852,912.00</b>	<b>3,360,089,639.00</b>	<b>Kecamatan Nagrak</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,732,205,782.00	3,127,852,912.00	3,270,089,639.00	Kecamatan Nagrak
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Nagrak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Nagrak
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Nagrak
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Nagrak
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Nagrak
<b>Kecamatan Nyalindung</b>	<b>3,370,221,872.00</b>	<b>3,823,582,217.00</b>	<b>4,020,510,908.00</b>	<b>Kecamatan Nyalindung</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,238,903,872.00	3,738,582,217.00	3,935,510,908.00	Kecamatan Nyalindung
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22,685,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Nyalindung

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29,238,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Nyalindung
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30,190,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Nyalindung
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,010,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Nyalindung
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34,195,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Kecamatan Nyalindung
<b>Kecamatan Pabuaran</b>	<b>2,721,628,034.00</b>	<b>2,872,776,707.00</b>	<b>3,091,552,876.00</b>	<b>Kecamatan Pabuaran</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,643,820,034.00	2,782,796,707.00	3,001,572,876.00	Kecamatan Pabuaran
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14,928,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Pabuaran
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Pabuaran
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14,980,000.00	14,980,000.00	14,980,000.00	Kecamatan Pabuaran
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Pabuaran
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,900,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Pabuaran
<b>Kecamatan Parakansalak</b>	<b>2,492,495,683.00</b>	<b>2,692,943,248.00</b>	<b>2,800,723,610.00</b>	<b>Kecamatan Parakansalak</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,432,495,683.00	2,615,063,248.00	2,722,843,610.00	Kecamatan Parakansalak
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Parakansalak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17,000,000.00	14,880,000.00	14,880,000.00	Kecamatan Parakansalak
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	Kecamatan Parakansalak
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	Kecamatan Parakansalak
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Kecamatan Parakansalak
<b>Kecamatan Parungkuda</b>	<b>2,516,585,943.00</b>	<b>2,732,066,842.00</b>	<b>2,965,612,805.00</b>	<b>Kecamatan Parungkuda</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,431,505,943.00	2,642,066,842.00	2,875,612,805.00	Kecamatan Parungkuda
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15,520,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Parungkuda
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Parungkuda
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15,520,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Parungkuda
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,520,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Parungkuda
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,520,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Parungkuda
<b>Kecamatan Palabuhanratu</b>	<b>4,596,332,111.00</b>	<b>4,837,898,314.00</b>	<b>5,165,210,399.00</b>	<b>Kecamatan Palabuhanratu</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,619,532,111.00	3,856,098,314.00	4,183,410,399.00	Kecamatan Palabuhanratu
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Palabuhanratu
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	915,000,000.00	915,000,000.00	915,000,000.00	Kecamatan Palabuhanratu
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Palabuhanratu
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	Kecamatan Palabuhanratu
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Palabuhanratu
<b>Kecamatan Purabaya</b>	<b>2,630,666,530.00</b>	<b>2,596,699,790.00</b>	<b>2,654,914,518.00</b>	<b>Kecamatan Purabaya</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,480,665,030.00	2,506,711,790.00	2,564,926,518.00	Kecamatan Purabaya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Purabaya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Purabaya
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30,001,500.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Purabaya
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30,000,000.00	15,005,000.00	15,005,000.00	Kecamatan Purabaya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30,000,000.00	14,983,000.00	14,983,000.00	Kecamatan Purabaya

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
<b>Kecamatan Sagaranten</b>	<b>2,420,906,883.00</b>	<b>2,664,571,863.00</b>	<b>2,860,507,071.00</b>	<b>Kecamatan Sagaranten</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,338,364,883.00	2,576,385,863.00	2,772,321,071.00	Kecamatan Sagaranten
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9,068,000.00	29,252,000.00	29,252,000.00	Kecamatan Sagaranten
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19,046,000.00	18,890,000.00	18,890,000.00	Kecamatan Sagaranten
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25,310,000.00	18,180,000.00	18,180,000.00	Kecamatan Sagaranten
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14,718,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	Kecamatan Sagaranten
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14,400,000.00	11,664,000.00	11,664,000.00	Kecamatan Sagaranten
<b>Kecamatan Simpenan</b>	<b>2,876,070,514.00</b>	<b>2,679,332,458.00</b>	<b>2,915,582,247.00</b>	<b>Kecamatan Simpenan</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,771,070,514.00	2,589,332,458.00	2,825,582,247.00	Kecamatan Simpenan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Simpenan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Simpenan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Simpenan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Simpenan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Simpenan
<b>Kecamatan Sukabumi</b>	<b>3,375,608,771.00</b>	<b>3,563,514,153.00</b>	<b>3,708,357,617.00</b>	<b>Kecamatan Sukabumi</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,290,608,771.00	3,473,514,153.00	3,618,357,617.00	Kecamatan Sukabumi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Sukabumi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Sukabumi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Sukabumi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Sukabumi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Sukabumi
<b>Kecamatan Sukaraja</b>	<b>3,469,057,406.00</b>	<b>3,754,482,779.00</b>	<b>4,121,745,098.00</b>	<b>Kecamatan Sukaraja</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,394,057,406.00	3,664,482,779.00	4,031,745,098.00	Kecamatan Sukaraja
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Sukaraja
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Sukaraja
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Sukaraja
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Sukaraja
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Sukaraja
<b>Kecamatan Surade</b>	<b>4,778,391,077.00</b>	<b>4,663,901,929.00</b>	<b>5,075,882,288.00</b>	<b>Kecamatan Surade</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,723,391,077.00	3,698,901,929.00	4,110,882,288.00	Kecamatan Surade
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Surade
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,010,000,000.00	910,000,000.00	910,000,000.00	Kecamatan Surade
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Kecamatan Surade
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Kecamatan Surade
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Surade
<b>Kecamatan Tegalbuleud</b>	<b>2,624,750,815.00</b>	<b>2,847,928,669.00</b>	<b>2,899,005,321.00</b>	<b>Kecamatan Tegalbuleud</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,552,238,815.00	2,759,428,669.00	2,810,505,321.00	Kecamatan Tegalbuleud
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8,500,000.00	28,500,000.00	28,500,000.00	Kecamatan Tegalbuleud
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Tegalbuleud

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19,012,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Tegalbuleud
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Tegalbuleud
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Tegalbuleud
<b>Kecamatan Waluran</b>	<b>2,321,549,532.00</b>	<b>2,501,191,344.00</b>	<b>2,501,191,344.00</b>	<b>Kecamatan Waluran</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,242,514,532.00	2,411,191,344.00	2,411,191,344.00	Kecamatan Waluran
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	Kecamatan Waluran
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Waluran
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24,035,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Waluran
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Waluran
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Kecamatan Waluran
<b>Kecamatan Warungkiara</b>	<b>2,516,753,777.00</b>	<b>2,451,544,309.00</b>	<b>2,711,837,319.00</b>	<b>Kecamatan Warungkiara</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,465,153,777.00	2,379,944,309.00	2,640,237,319.00	Kecamatan Warungkiara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6,500,000.00	26,500,000.00	26,500,000.00	Kecamatan Warungkiara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	Kecamatan Warungkiara
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	Kecamatan Warungkiara
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Kecamatan Warungkiara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	Kecamatan Warungkiara
<b>Kecamatan Sukalarang</b>	<b>2,970,359,534.00</b>	<b>2,990,043,815.00</b>	<b>3,313,179,342.00</b>	<b>Kecamatan Sukalarang</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,910,024,534.00	2,914,874,315.00	3,238,009,842.00	Kecamatan Sukalarang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7,190,000.00	27,188,500.00	27,188,500.00	Kecamatan Sukalarang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,447,000.00	14,997,000.00	14,997,000.00	Kecamatan Sukalarang
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19,686,000.00	14,982,000.00	14,982,000.00	Kecamatan Sukalarang
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9,938,000.00	9,928,000.00	9,928,000.00	Kecamatan Sukalarang
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8,074,000.00	8,074,000.00	8,074,000.00	Kecamatan Sukalarang
<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>30,787,385,690.00</b>	<b>21,592,317,151.00</b>	<b>21,176,421,809.00</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,621,090,090.00	5,894,641,151.00	6,337,872,509.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,894,275,200.00	1,075,000,000.00	963,754,300.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	12,489,078,000.00	9,974,794,000.00	9,844,595,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	990,704,000.00	623,465,000.00	341,310,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1,324,862,000.00	498,991,000.00	260,732,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	5,467,376,400.00	3,525,426,000.00	3,428,158,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>TOTAL</b>	<b>4,515,863,306,743</b>	<b>4,523,211,793,090</b>	<b>4,634,183,973,527</b>	

Sumber : SIPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 (Diolah)

## **BAB VI. PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 dilaksanakan karena terdapat ketidaksesuaian antara RKPD Tahun 2025 dengan perkembangan keadaan di Kabupaten Sukabumi, diantaranya: perlu adanya penyesuaian RKPD Tahun 2025 dengan visi, misi kepala daerah terpilih, perkembangan kebijakan nasional maupun provinsi Jawa Barat, diantaranya: Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Perubahan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 memuat proses perencanaan pembangunan, dimana pelaksanaannya diturunkan kedalam sasaran, indikator dan target pembangunan yang dicapai melalui strategi dan kebijakan. Selanjutnya penetapan prioritas pembangunan Tahun 2025, mengacu pada proyek prioritas Kabupaten Sukabumi yang disinergikan dengan kebijakan kewilayahan dan isu-isu strategis, serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan isu-isu global.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan pada perubahan tahun 2025, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025;
2. Perubahan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS, serta Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025;
3. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan serta didukung oleh pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga mempunyai nilai manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Pada akhirnya pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 akan dapat terwujud secara optimal dan mencapai sasaran pembangunan apabila didukung penuh oleh seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi mengajak semua pihak bersinergi dan berkolaborasi yang meliputi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku bisnis, masyarakat, dan media dalam mewujudkan pemantapan pelayanan publik dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi daerah Kabupaten Sukabumi.

**BUPATI SUKABUMI,**

ttd

**ASEP JAPAR**